



**PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2019-2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2021**



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR // TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

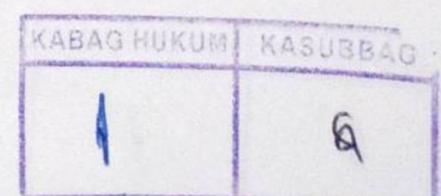
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandnag perlu untuk diselaraskan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target pencapaian sasaran serta nomenklatur program sampai dengan akhir periode perencanaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandnag perlu meleakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	2

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 281.a);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAN
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunung Mas, meliputi :
 - a. Indeks kualitas infrastruktur;
 - b. Indeks konektivitas wilayah;
 - c. Rasio rumah layak huni;
 - d. Indeks pembangunan manusia;
 - e. Indeks pendidikan;
 - f. Indeks kesehatan;
 - g. Indeks pembangunan gender;
 - h. Angka prevalensi stunting;
 - i. Laju pembangunan ekonomi;
 - j. Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan;
 - k. Tingkat pertumbuhan nilai investasi;
 - l. Tingkat kemiskinan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- m. Tingkat pengangguran terbuka;
 - n. Indeks gini;
 - o. Pendapatan per kapita;
 - p. Indeks reformasi birokrasi;
 - q. Nilai SAKIP;
 - r. Indeks kepuasan masyarakat;
 - s. Indeks kerukunan antar umat beragama;
 - t. Angka kriminalitas yang tertangani;
 - u. Persentase budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya;
 - v. Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah;
 - w. Indeks kualitas lingkungan hidup;
 - x. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca.
- (2) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyusunan Perubahan RPJMD telah diselaraskan dengan kebijakan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
- (2) Perubahan RPJMD telah menajamkan prioritas pembangunan Daerah sebagai pedoman RKPD tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, meliputi :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas (keterkaitan) wilayah;
 - b. Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitas yang sehat, layak dan aman;
 - c. Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - d. Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu;
 - e. Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif;
 - f. Peningkatan keterampilan perempuan;
 - g. Peningkatan dukungan terwujudnya program *Food Estate* di Gunung Mas;
 - h. Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya;
 - i. Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerja sama investasi;
 - j. Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan;
 - k. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat;
 - l. Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah;
 - m. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - n. Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik;
 - o. Peningkatan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, TNI dan Kepolisian;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
t	G

- l. Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah;
 - m. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - n. Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik;
 - o. Peningkatan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, TNI dan Kepolisian;
 - p. Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan; dan
 - q. Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan.
- (3) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, permasalahan dan isu strategis Daerah serta kemampuan riil keuangan Daerah.
- (4) Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.
3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 November 2021


BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 November 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

YANS PETERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021
NOMOR 295

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG
MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 11,85/2021

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Perubahan RPJMD digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024; bahan penyusunan dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 hingga 2024. Perubahan RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi pelaku kepentingan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 terdiri dari 9 bab dan 13 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Gunung Mas, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan sehingga dimampukan untuk menyusun Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, dengan tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan, program pembangunan disertai pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator pencapaian pembangunan.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 sudah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, serta perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022-2024.

Adapun perubahan mencakup gambaran umum kondisi daerah hingga tahun 2020, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja dan program serta pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

Oleh karena keterbatasan sebagai manusia maka Perubahan RPJMD ini tidak luput dari kesalahan ataupun kekeliruan, sehingga dibutuhkan saran dan pendapat yang berguna untuk penyempurnaan dokumen perencanaan pada tahun selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan saran dan pendapat dalam penyusunan Perubahan RPJMD ini mulai dari Konsultasi Publik, Musrenbang hingga pada pembahasan Raperda Perubahan RPJMD ini.

Semoga melalui dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 ini, cita-cita Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 yaitu **“Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri”** dapat terwujud.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah	II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.3 Demografi	II-12
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-15
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	II-19
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-24
2.3.1 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-24
2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-29
2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan	II-36
2.3.4 Urusan Penunjang	II-38
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-39
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-39
2.4.2 Fokus Investasi	II-41
2.4.3 Fokus Infrastruktur	II-41
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia	II-41
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III-8
3.2.1 Analisis Pembiayaan	III-11
3.3. Kerangka Pendanaan	III-13
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Isu -Isu Strategis	IV-17
4.2.1 Isu Internasional	IV-17
4.2.2 Isu Strategis Nasional	IV-24
4.2.3 Isu Strategis Regional	IV-31
4.2.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025	IV-31
4.2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026	IV-33
4.2.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035	IV-33

4.2.3.4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005 – 2025	IV-34
4.2.3.5	Telaahan RPJMD Kabupaten/ Kota sekitar Kabupaten Gunung Mas	IV-37
4.2.3.6	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas	IV-40
BAB V	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1.	Visi	V-1
5.2.	Misi	V-3
5.3.	Tujuan dan Sasaran	V-7
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1.	Strategi	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan	VI-10
6.2.1	Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	VI-11
6.3.	Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis	VI-21
6.3.1	Pengembangan Potensi Prioritas di Kabupaten Gunung Mas	VI-21
6.3.2	Prioritas Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Gunung Mas	VI-24
6.3.3	Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunung Mas	VI-25
6.4.	Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	VI-27
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1	Kerangka Pendanaan	VII-2
7.2.	Program Perangkat Daerah	VII-3
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VIII-1
8.1.1.	Indikator Kinerja Makro Pembangunan	VIII-1
8.1.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII-2
8.1.3.	Indikator Kinerja Kunci	VIII-3
8.1.4.	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VIII-23
8.1.5.	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	VIII-41
BAB IX	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	IX-1
9.1.	Pedoman Transisi	IX-1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	IX-3

DAFTAR TABEL

		Hal	
Tabel	2.1	Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020	II-2
Tabel	2.2	Statistik Klimatologi Kabupaten Gunung Mas, tahun 2019	II-7
Tabel	2.2	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan, tahun 2020	II-8
Tabel	2.3	Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunung Mas	II-8
Tabel	2.4	Rencana Sistem Pusat Perkotaan/Kegiatan	II-10
Tabel	2.5	Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Sensus Penduduk 2020	II-13
Tabel	2.6	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas (Persen)	II-16
Tabel	2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2016-2020	II-17
Tabel	2.8	Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen Penyusunnya Kabupaten Gunung Mas, 2016-2020	II-20
Tabel	2.9	Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2015 -2019	II-25
Tabel	2.10	Indikator Kinerja Urusan Pemukiman Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2015 - 2019	II-27
Tabel	2.11	Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kabupaten Gunung Mas 2016-2020	II-27
Tabel	2.12	Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2015 – 2019	II-32
Tabel	2.13	Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas tahun 2019- 2020	II-35
Tabel	2.14	Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 - 2019	II-36
Tabel	2.15	Perkembangan Jumlah Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Gunung MasTahun 2016 – 2020	II-37
Tabel	2.16	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2020	II-38
Tabel	2.17	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-201	II-39
Tabel	2.18	Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2019	II-43
Tabel	2.19	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2017 – 2018	II-58
Tabel	2.20	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal	II-61

		Bidang Kesehatan Tahun 2013 – 2018	
Tabel	2.21	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial	II-63
Tabel	2.22	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-64
Tabel	2.23	Capaian TPB Kabupaten Gunung Mas	II-67
Tabel	3.1	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020 (Jutaan Rupiah)	III-2
Tabel	3.2	Kinerja Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan Daerah) Kabupaten Gunung Mas 2016-2019 (dalam jutaan)	III-4
Tabel	3.3	Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam jutaan)	III-7
Tabel	3.4	Realisasi Pengeluaran Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2019 (dalam jutaan)	III-10
Tabel	3.5	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2019 (dalam jutaan)	III-12
Tabel	3.6	Proyeksi Kerangka Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 (dalam jutaan)	III-14
Tabel	3.7	Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 (dalam jutaan)	III-19
Tabel	3.8	Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 (dalam jutaan)	III-18
Tabel	3.9	Alokasi Anggaran Kapasitas Riil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	III-21
Tabel	4.1	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2020	IV-6
Tabel	4.2	Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020	IV-9
Tabel	4.3	Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2020	IV-11
Tabel	4.4	Visi dan Misi RPJMD Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Murung Raya	IV-37
Tabel	4.5	Sandingan/Keselarasan Program RTRW dan Program RPJMD	IV-45
Tabel	5.1	Rumusan tujuan dan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	V-8
Tabel	5.2	Sandingan RPJMD sebelum dan sesudah perubahan	V-13
Tabel	5.3	Keterkaitan antara Visi, Misi, tujuan dan	V-17

		Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	
Tabel	5.4	Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	V-23
Tabel	6.1	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024	VI-2
Tabel	6.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	VI-15
Tabel	6.3	Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah	VI-18
Tabel	6.4	Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Karet Kabupaten Gunung Mas	VI-20
Tabel	7.1	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024	VII-3
Tabel	7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024	VII-4
Tabel	8.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024	VIII-1
Tabel	8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	VIII-2
Tabel	8.3	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	VIII-6
Tabel	8.4	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	VIII-24
Tabel	8.5	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	VIII-32
Tabel	8.6	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial	VIII-35
Tabel	8.7	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	VIII-37
Tabel	8.8	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana	VIII-38
Tabel	8.9	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	VIII-39
Tabel	8.10	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota	VIII-39
Tabel	8.11	Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024	VIII-42

DAFTAR GAMBAR

		Hal	
Gambar	1.1	Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-9
Gambar	2.1	Peta Kabupaten Gunung Mas	II-3
Gambar	2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2016-2020	II-14
Gambar	2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019	II-15
Gambar	2.4	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas, 2016-2020 (juta Rupiah)	II-16
Gambar	2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas 2016-2020	II-18
Gambar	2.6	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2015-2020 (Juta Rupiah)	II-19
Gambar	2.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020	II-20
Gambar	2.8	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020	II-22
Gambar	2.9	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2018	II-23
Gambar	2.10	Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020	II-24
Gambar	2.11	Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Cabang Gunung Mas Tahun 2020	II-26
Gambar	2.12	Persentase Air Yang Disalurkan Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020	II-26
Gambar	2.13	Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2019	II-28
Gambar	2.14	Pengeluaran Konsumsi Perkapita Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020	II-29
Gambar	2.15	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020	II-30
Gambar	2.16	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020	II-31
Gambar	2.17	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Gunung Mas	II-33
Gambar	2.18	Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gunung Mas	II-34
Gambar	2.19	Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2020	II-40
Gambar	2.20	Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Non Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2020	II-40
Gambar	2.20	Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020	II-42
Gambar	2.21	Capaian Indikator TPB Kabupaten Gunung Mas	II-69

Gambar	2.22	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas	II-70
Gambar	2.23	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar sosial	II-71
Gambar	2.24	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar ekonomi	II-72
Gambar	2.25	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar lingkungan hidup	II-73
Gambar	2.26	Persentase Status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam tatakelola pemerintahan	II-74
Gambar	4.1	Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas	IV-3
Gambar	4.2	Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020	IV-4
Gambar	4.3	Persentase Angkatan Kerja menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020	IV-12
Gambar	4.4	Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	IV-13
Gambar	5.1	Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi	V-3
Gambar	5.2	Keterkaitan antara Visi dan Misi	V-5
Gambar	5.3	Keterkaitan antara Visi, Misi, Smart Agro, Smart Human Resources, Smart Tourism	V-7
Gambar	6.1	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahunan Tahun 2020-2024	VI-10
Gambar	6.2	Pengembangan Potensi (Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas)	VI-19
Gambar	6.3	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Gunung Mas	VI-21



- BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Pembangunan Kabupaten Gunung Mas telah memasuki arah pembangunan jangka menengah ke-III (2019-2024) dengan tujuan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Gunung Mas telah menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan jangka menengah nasional dan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah (Teknokratik 2021-2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional maupun pembangunan provinsi, dengan mengedepankan pada kekhasan dan sasaran pembangunan daerah sesuai permasalahan dan isu strategis Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu pada tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan terus meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Mendalami hal tersebut, pada RPJM ketiga ini Kabupaten Gunung Mas akan memprioritaskan perhatian pembangunan pada upaya mempertahankan pembangunan berkelanjutan demi terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.

Prioritas terhadap pembangunan perekonomian daerah yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dan pertanian dalam rangka mewujudkan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan maka Kabupaten Gunung Mas pada RPJPD ketiga ini akan berkonsentrasi pada produktivitas kegiatan perekonomian; ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh perkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien; terwujudnya konservasi sumberdaya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta pengembangan infrastruktur perdesaan yang akan



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

terus di kembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dalam rangka mensejahterakan masyarakat Gunung Mas.

Dengan dilantiknya Bupati (**Jaya Samaya Monong, S.E., M.Si**) dan Wakil Bupati (**Ir. Efrensia L.P. Umbing, M.Si**), Visi pembangunan “Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (**BERJUANG BERSAMA**)”. Visi pembangunan kepala daerah terpilih akan dijabarkan kedalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2010 tentang RPJP Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028, serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Keterkaitan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Provinsi), akan menjamin keterpaduan arah pembangunan melalui program-program pembangunan yang akan dilakukan di daerah.

Pada tahun 2019, RPJMD Kabupaten Gunung Mas sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. Hingga tahun 2021, pelaksanaan perencanaan RPJMD tersebut sudah memasuki tahun ke-2 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun 2021), dimana dalam penyusunannya terjadi inkosisten dari Program pada RKPD terhadap RPJMD, hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan yang mendasar pada kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang dimaksud adalah :

1. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Dan Keuangan Daerah, beserta pemutahirannya yang diatur pada Kepmen;

5. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Disamping itu adanya Bencana Non Alam yaitu Pandemi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, ikut mempengaruhi perencanaan pembangunan dimana prioritas pembangunan mulai dari tahun 2020 hingga 2021 difokuskan pada penanganan Covid-19 sehingga alokasi anggaran untuk sektor lain yang dianggap tidak kalah penting menjadi terhambat. Wabah Covid-19 masih akan menjadi isu strategis hingga masa waktu yang tidak bisa diprediksi kapan wabah itu akan mereda, sehingga perlu ada perencanaan dari waktu ke waktu agar proporsi pelaksanaan pembangunan yang lain dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, karena dari 2020 penanganan Covid-19 sudah terlaksana hingga kedepannya, maka perencanaan penanganan Covid-19 perlu dirumuskan dan disusun dalam dokumen RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut, penyesuaian dan perubahan terhadap dokumen perencanaan dalam menghadapi kondisi yang ada, perlu dilakukan. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana non alam maupun perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD diikuti dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program PD dan lintas PD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra PD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4. Pelaksanaan musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Kabupaten Gunung Mas. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Gunung Mas menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Gunung Mas.

5. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala PD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

6. Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Penetapan Perda tentang RPJMD yaitu mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

- 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2010 tentang RPJP Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2014 tentang RTRW Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210); dan
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kuala Kurun 2020-2040 (Lembaran Daerah



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Kabupaten Gunung Mas Nomor 281, Tambahan Tembaran daerah 281.a).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan tentang kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah tahap III RPJPD 2009-2028 yang akan dimulai tahun 2019.

Adapun tujuan kegiatan Penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan RAPBD;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi lain yang berdekatan;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
5. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati terpilih periode 2019-2024;
6. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
7. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas; dan
8. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran



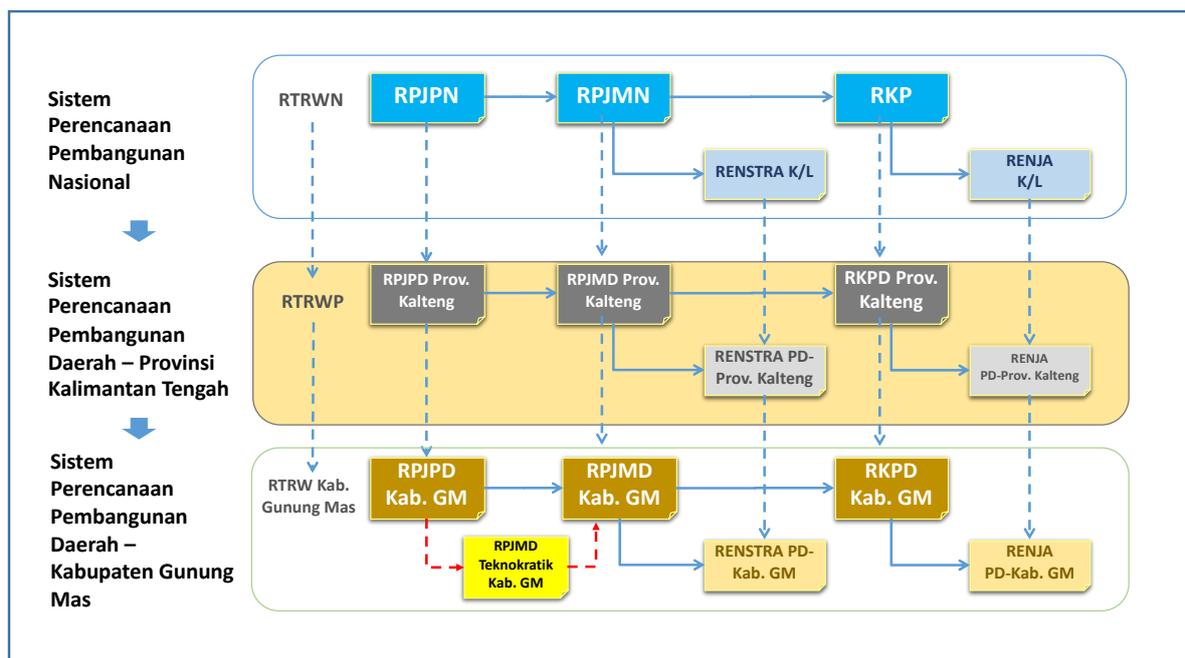
PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

Pada dasarnya, RPJMD ini merupakan rancangan kebijakan pembangunan sesuai visi dan misi Bupati terpilih hasil pilkada serentak tahun 2018 untuk periode 2019-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD), RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Pengintegrasian setiap dokumen perencanaan harus memiliki garis lurus berupa pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum pada UUD 1945. Selain itu, dokumen RPJMD selanjutnya akan menjadi dasar perumusan dokumen perencanaan struktur dibawahnya seperti RKPD maupun Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunannya, RPJMD harus selalu terintegrasi dengan perencanaan penganggaran daerah. Hal tersebut untuk mengefisiensikan kemampuan pendanaan daerah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan agar program prioritas yang dipilih dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.



Gambar 1. 1



Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan gambar 1.1, RPJMD ini merupakan bahan baku utama penyusunan RPJMD mengingat sebagian bab dari RPJMD dapat disusun mendahului pelantikan kepala daerah terpilih, namun tetap harus diperbaharui dengan data kinerja dan informasi relevan lain terbaru.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika utama penulisan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Gunung Mas secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu memberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX : PENUTUP



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Menjelaskan ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.



- BAB II -

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

A. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Gunung Mas

Gambaran umum kondisi Kabupaten Gunung Mas terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan hasil kinerja pembangunan di Kabupaten Gunung Mas oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat. Berikut ini gambaran umum Kabupaten Gunung Mas yang dilihat dari keempat aspek tersebut.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Gunung Mas.

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Ibukota Kabupaten Gunung Mas adalah Kuala Kurun dengan luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km² atau 1.080.400 Ha. Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota di



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah ± 10.804 km², terbagi dalam 12 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 114 Desa.

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
Manuhing	Tumbag Talaken	1.113	1	11
Manuhing Raya	Tehang	601	1	5
Rungan	Jakatan raya	710	1	13
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	738	1	8
Rungan Barat	Rabambang	391	1	10
Sepang	Sepang simin	397	1	6
Mihing Raya	Kampuri	343	1	5
Kurun	Kuala Kurun dan Tampang Tumbang Anjir	876	2	13
Tewah	Tewah	1.079	1	15
Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	1.589	1	11
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1.425	1	7
Miri Minasa	Tumbang Napoi	1.542	1	10
Gunung Mas		10.804	13	114

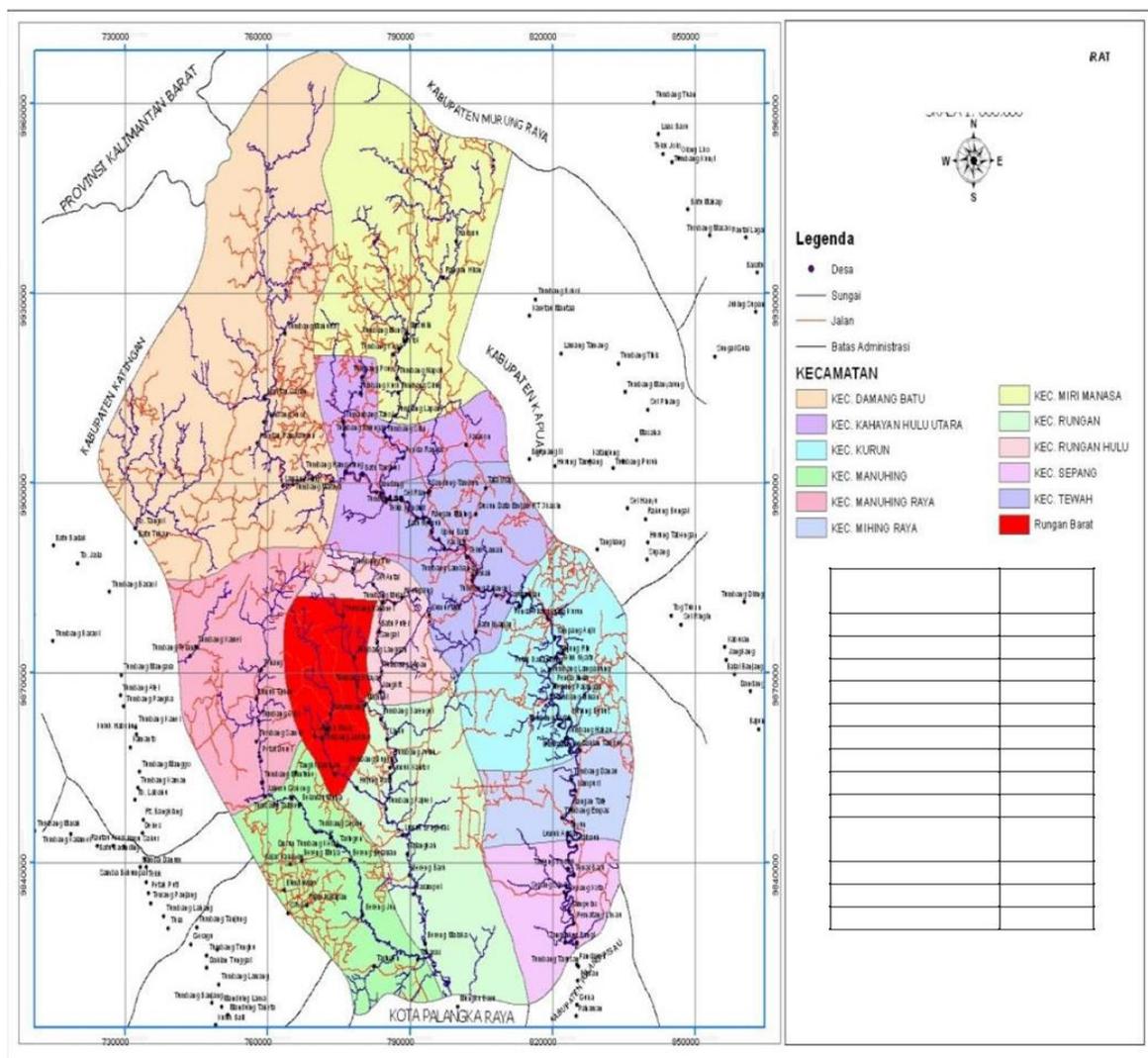
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Dari 12 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas, wilayah kecamatan yang terluas di Kabupaten Gunung Mas adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara yaitu 1.589 Km² atau 14,71 persen sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Mihing Raya yaitu 343 Km² atau 3,17 persen.



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Sumber: RTRW Kabupaten Gunung Mas tahun 2005-2015



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Gunung Mas

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Murung Raya.
2. Sebelah timur dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.
3. Sebelah selatan dengan kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.
4. Sebelah barat dengan Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat.

b. Letak dan kondisi geografis

Secara astronomis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada $\pm 0^{\circ}17'05''$ Lintang Selatan sampai dengan $01^{\circ}39'40''$ Lintang Selatan dan $\pm 113^{\circ}00'45''$



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Bujur Timur sampai dengan 114°02'05" Bujur Timur. Kabupaten Gunung Mas memiliki luas wilayah 10.804 Km² yang sebagian besar merupakan dataran tinggi yang sangat potensial untuk daerah perkebunan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara (1.589 Km²), sebaliknya Kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Mihing Raya (343 Km²).

Menurut keadaan wilayahnya Kabupaten Gunung Mas memiliki ketinggian wilayah terhadap permukaan laut yang bervariasi dimana wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari dataran rendah hingga daerah pegunungan. Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Wilayah dengan topografi paling rendah berkisar 50-100 meter di atas permukaan laut.

c. Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Gunung Mas dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan 8 - 15°. Di bagian selatan terdiri atas dataran rendah dan rawa. Adapun jenis tanahnya adalah podsolik merah kuning, alluvial, hydromorfik kelabu, alluvial hydromorfik, gley humus, dan kompleks regosol podsolik. Tanah podsolik merah kuning sangat dominan dan penyebarannya terletak di bagian utara dengan ketebalan ±110 cm. Sedangkan jenis tanah alluvial hydromorfik kelabu berada di pinggir sungai Kahayan, Miri (anak sungai Kahayan), Rungan dan Manuhing (anak sungai Rungan).

d. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Gunung Mas dilintasi oleh beberapa sungai yaitu sungai Kahayan, Rungan, Manuhing, Miri serta anak-anak sungai lainnya yang berfungsi sebagai penunjang alternatif transportasi darat untuk angkutan barang maupun penumpang. Pentingnya peranan sungai ini disebabkan oleh terbatasnya atau terganggunya prasarana perhubungan darat, disamping itu sebagian besar pemukiman penduduk masih berada di daerah pinggir sungai.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Ada empat jalur sungai yang berada atau masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

1. Sungai Manuhing dengan panjang ± 28,75 Km
2. Sungai Rungan dengan panjang ± 86,25 Km
3. Sungai Kahayan dengan panjang ± 600,00Km
4. Sungai Miri ± 20,00 Km

Secara umum pola sungai di Kabupaten Gunung Mas adalah pola dendritik, dimana salah satu sifat utamanya apabila terjadi hujan merata di seluruh Daerah Aliran Sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar 350 km, merupakan sungai utama yang mengalir dari pegunungan Muller Schwaner di utara menuju Laut Jawa di bagian Selatan. Dari Sungai Kahayan ada 6 (enam) buah anak sungai yang besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai sarana transportasi. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Kahayan, Sungai Miri, Sungai Rungan dan Sungai Manuhing dan beberapa anak sungai seperti Sungai Hamputung, Sungai Habaon, Sungai Pesangon, Sungai Hamporoi, Sungai Pajangei, Sungai Manyangan, Sungai Kurun, Sungai Konjoi, Sungai Rawi, dan Sungai Simin. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (MCK), air minum, serta irigasi persawahan. Selain air sungai penduduk juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman berkisar antara 1 sampai 7 meter.

e. Kondisi Geologi

Geologi Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peta Geologi Lembar Tumbang Hiran (U.Margono, Tsujitno, T. Santosa, 1995), Lembar Tewah (A.S.Sumartadipura & U. Margono, 1996), Lembar Muara Teweh (S.Supriatna, A. Sudradjat, H.Z, Abidin, 1993) dan Lembar Buntok (Sutrisno, S.Supriatna, E.Rustandi, P. Sanyoto, K. Hasan, 1994), bahwa geologi Kabupaten Gunung Mas terdiri dari beberapa litologi yang terbentuk dengan urutan stratigrafi adalah :

- 1 Batuan Malihan;
- 2 Tonalit Sepauk;



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

- 3 Formasi Tanjung;
- 4 Formasi Haloq;
- 5 Formasi Mentomoi;
- 6 Formasi Montalat;
- 7 Batuan Gunung Api Malasan;
- 8 Batuan Terobosan Sintang;
- 9 Formasi Warukin;
- 10 Formasi Dahor; dan
- 11 Aluvium.

Umur batuan tertua diperkirakan berumur Trias. Struktur geologi Kabupaten Gunung Mas terdapat berupa lipatan, sesar dan kekar yang erat kaitannya dengan pembentukan logam dasar emas (Au), perak (Ag), besi (Fe), Seng (Zn) dan tembaga (Cu) yang umumnya terdapat pada daerah ini. Keadaan topografi Kabupaten Gunung Mas terbagi atas 2 bagian, yaitu pada bagian utara merupakan daerah perbukitan bergelombang kuat dengan ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng 8°-15°, perbukitan ini merupakan bagian dari rangkaian pengunungan Schwaner yang memanjang dengan arah timur laut-barat daya. Di bagian selatan dari daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah dataran rendah sampai dengan rawa-rawa.

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas beberapa jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan Kompleks Regosol Podsolik. Jenis tanah yang dominan adalah tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah Gunung Mas dengan ketebalan ± 110 cm. Kemudian pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai dengan jenis tanah Aluvial Hydromorfik kelabu, tersebar dan dapat di jumpai di beberapa sungai/anak sungai di wilayah Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Miri (anak Sungai Kahayan), Sungai Rungan dan Sungai Manuhing (anak Sungai Rungan).

f. Klimatologi

Sepanjang tahun 2018, rata-rata suhu udara di Kabupaten Gunung Mas berkisar antara 26,90 °c sampai dengan 28,20 °c. Suhu tertinggi terjadi pada bulan Mei 2018 sebesar 28,20 °c dan terendah pada Desember 2018



sebesar 26,90 °c. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi di bulan Januari sebesar 485,6 mm.

Tabel 2.2
Statistik Klimatologi Kabupaten Gunung Mas, tahun 2019

Bulan	Rata-rata Suhu Udara	Rata-rata Kelembaban Udara	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari	Curah Hujan
Januari	27,1	82,8	1.011,2	4,8	44,4	321
Februari	27,2	82,7	1013,2	4,5	48,6	403
Maret	27,2	83,0	1012,5	4,3	61,5	260
April	27,8	82,2	1.012,4	4,2	68,2	412
Mei	28,2	81,5	1.012,3	3,9	69,4	213
Juni	27,7	80,1	1.013,4	4,2	68,5	323
Juli	27,3	80,3	1.012,8	4,7	71,0	4
Agustus	27,4	77,4	1.013,6	5,0	77,9	75
September	27,5	76,8	1.013,7	4,5	67,1	113
Oktober	27,8	77,4	1.013,8	4,0	64,3	283
November	27,4	80,6	1.013,4	4,0	64,2	176
Desember	26,9	82,6	1.012,8	4,6	57,5	505

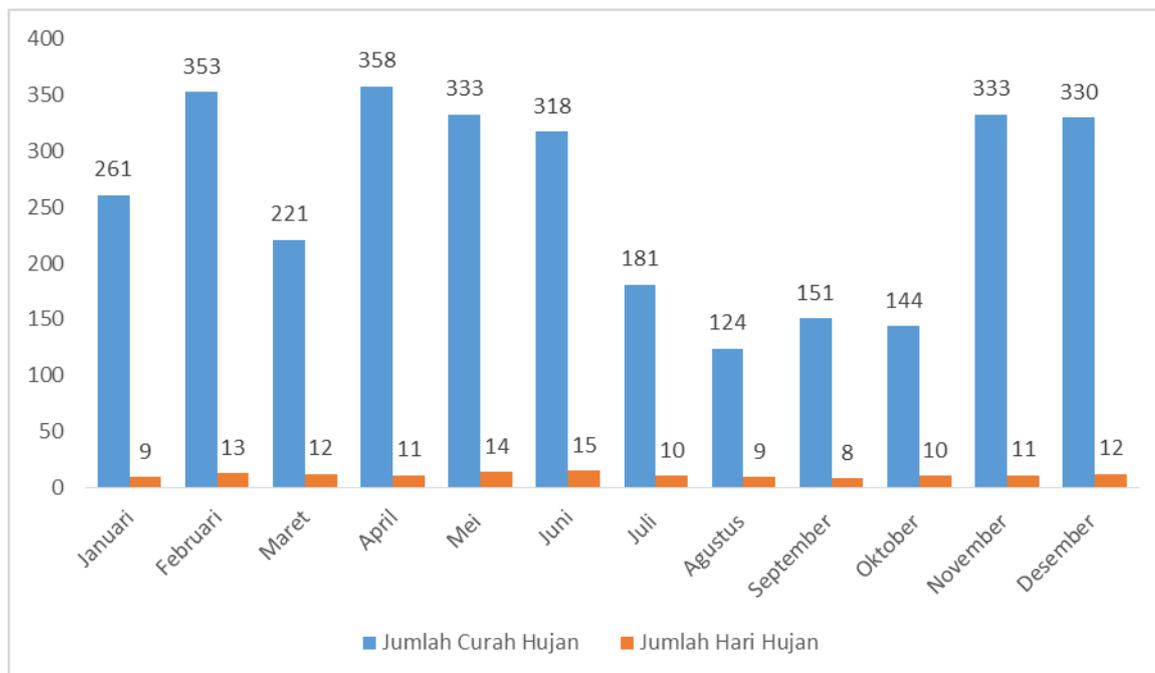
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2020

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi antara lain oleh keadaan iklim, keadaan orografi, dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Di Kabupaten Gunung Mas, terdapat 5 pos hujan yang terletak di Kuala Kurun, Takaras, Kampuri, Jakatan Raya, dan Tewah.

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Gunung Mas sepanjang tahun 2020 berdasarkan pos hujan Kuala Kurun sebesar 259 milimeter. Angka tertinggi terjadi pada bulan April (358 milimeter), sedangkan angka terendah terjadi pada bulan Agustus (124 milimeter). Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni (15 hari hujan) dan terendah terjadi pada bulan September (8 hari hujan).



Tabel 2.2
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan, tahun 2020



Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2021

g. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Gunung Mas sebagian besar cocok untuk mengembangkan potensi perkebunan. Rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan RTRW Kabupaten Gunung Mas 2014 – 2034 yaitu:

Tabel 2.3
Luas dan Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Gunung Mas

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Alam	110.284,221	10,21
2.	Hutan Lahan Kering	552.849,251	51,17
3.	Kebun Campuran	4.804,871	0,44
4.	Perkebunan	9.946,905	0,92
5.	Permukiman	7.401,432	0,69
6.	Rawa	30.917,268	2,86
7.	Semak Belukar	350.216,157	32,42
8.	Tanah Terbuka	6.459,808	0,60
9.	Tegalan/Ladang	3.476,555	0,32
10.	Tubuh Air	4.044,383	0,37



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Jumlah	1.080.400,85	100,00
---------------	---------------------	---------------

Sumber: RTRW Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034

h. Fungsi Kawasan Hutan

No	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Areal Penggunaan Lain (APL)	178.380.474
2	Hutan Lindung	49.296.796
3	Hutan Produksi	338.819.465
4	Hutan Produksi Konversi	152.454.945
5	Hutan Produksi Terbatas	206.569.437
6	TAHURA	4.125.861

Sumber: SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034 tanggal 12 Agustus 2014, wilayah Kabupaten Gunung Mas terbagi kedalam 3 (tiga) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah suatu konsep pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik yang dilihat dari berbagai aspek. Tujuan pengelompokan ini adalah sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu wilayah dan antar wilayah pengembangan. Agar terwujud pola pelayanan yang terpadu dan pemerataan dalam hal pembangunan dan pengembangan wilayah, maka Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. SWP 1 dengan pusat pengembangan di Kota Kuala Kurun. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Tewah dan Kecamatan Mihing Raya dan Sepang, disamping sebagai pusat pelayanan kabupaten, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi SWP ini sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan, pertanian, perkebunan dan pariwisata sejarah.



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

2. SWP 2 dengan pusat pengembangan di Kota Jakatan Raya. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Manuhing, Manuhing Hulu. Fungsi wilayah adalah sebagai wilayah kabupaten bagian barat, industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
3. SWP 3 dengan pusat pengembangan di Kota Tumbang Miri. Wilayah yang termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa. Wilayah ini relatif memiliki sumberdaya alam yang sebagian diarahkan untuk menjadi fungsi lindung.

Adapun rincian pengembangan wilayah dan arah pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan indikasi programnya sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4
Rencana Sistem Pusat Perkotaan/Kegiatan**

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Ibukota Kabupaten Gunung Mas (Kuala Kurun)	<input type="checkbox"/> Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pendidikan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan Jalan arteri primer
		<input type="checkbox"/> Perekonomian jasa Kabupaten dan Regional	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kesehatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan prasarana lingkungan
		<input type="checkbox"/> Pusat Distribusi dan Koleksi barang dan Jasa	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Peribadahan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas perdagangan & jasa
		<input type="checkbox"/> Pusat Jasa Pendukung Kegiatan Perekonomian (Pengolahan & Pemasaran)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perdagangan/ Pemasaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas pendidikan & kesehatan
		<input type="checkbox"/> Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tengah KAL-TENG	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Permukiman	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan kawasan pariwisata
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pariwisata	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Optimalisasi Bandar Udara Kuala Kurun
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertambangan	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Tewah	<input type="checkbox"/> Pusat pengembangan sekunder utk menunjang pusat pelayanan kota Hirarki I (PKW)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pelayanan Sosial	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan jalan Kolektor Primer



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
		Pusat permukiman Perdesaan di seluruh Kecamatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perumahan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		<input type="checkbox"/> Perdagangan dan jasa skala wilayah Pengembangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas lingkungan
		<input type="checkbox"/> Pusat pengumpul hasil bumi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perkebunan dan Kehutanan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		<input type="checkbox"/> Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertambangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan
		<input type="checkbox"/> Distributor barang dan jasa skala regional	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Industri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan industri
		<input type="checkbox"/> Pusat permukiman		
	Tumbang Miri	permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pelayanan Sosial	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan jalan Kolektor Primer
		<input type="checkbox"/> Pusat pengumpul hasil bumi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perumahan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		<input type="checkbox"/> Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas lingkungan
		<input type="checkbox"/> Distributor barang dan jasa skala regional	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perkebunan dan Kehutanan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Industri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertambangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Optimalisasi pelabuhan sungai
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan industri
	Sepang Simin	<input type="checkbox"/> Pusat permukiman	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pelayanan Sosial	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan jalan Kolektor Primer
		<input type="checkbox"/> permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perumahan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		<input type="checkbox"/> Pusat pengumpul hasil bumi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas lingkungan
		<input type="checkbox"/> Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perkebunan dan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		<input type="checkbox"/> Distributor barang dan jasa skala regional	Kehutanan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
				pendidikan & kesehatan
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertambangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan industri
	Jakatan Raya	<input type="checkbox"/> Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota hirarki I (PKW)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pelayanan Sosial	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan jalan arteri Primer
		<input type="checkbox"/> Pusat permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perumahan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK
		<input type="checkbox"/> Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas lingkungan
		<input type="checkbox"/> Pusat pengumpul hasil bumi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perkebunan dan Kehutanan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		<input type="checkbox"/> Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Industri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan
		<input type="checkbox"/> Distributor barang dan jasa skala regional	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertambangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan industri
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Optimalisasi pelabuhan sungai
	Tumbang Talaken	<input type="checkbox"/> Pusat permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pelayanan Sosial	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan jalan arteri Primer
		<input type="checkbox"/> Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perumahan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK
		<input type="checkbox"/> Pusat pengumpul hasil bumi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas lingkungan
		<input type="checkbox"/> Industri pengolahan hasil-hasil pertanian	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Perkebunan dan Kehutanan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
		<input type="checkbox"/> Distributor barang dan jasa skala regional	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Industri	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan fasilitas pendidikan & kesehatan
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pengembangan industri
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Optimalisasi pelabuhan sungai

Sumber: Laporan Akhir RTRWK Gunung Mas, 2014

2.1.3. Demografi



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Pertumbuhan penduduk mempengaruhi perkembangan sosial yang berdampak pada pembangunan baik dari segi perencanaan maupun evaluasi. Pada tahun 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, penduduk Kabupaten Gunung Mas mencapai 135.373 jiwa bertambah sejumlah 38.383 jiwa dibandingkan Sensus Penduduk 2010. Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak ada di kecamatan Kurun sebanyak 33.613 jiwa atau sebesar 24,83 % dari total penduduk Kabupaten Gunung Mas. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 rata-rata mencapai 12 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kurun dengan kepadatan sebesar 38 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Miri Manasa dan Damang Batu sebesar 3 dan 4 jiwa/Km². Sementara itu jumlah rumah tangga pada tahun 2019 mencapai 28.401. Jumlah penduduk di kecamatan lainnya dapat dilihat di tabel berikut.

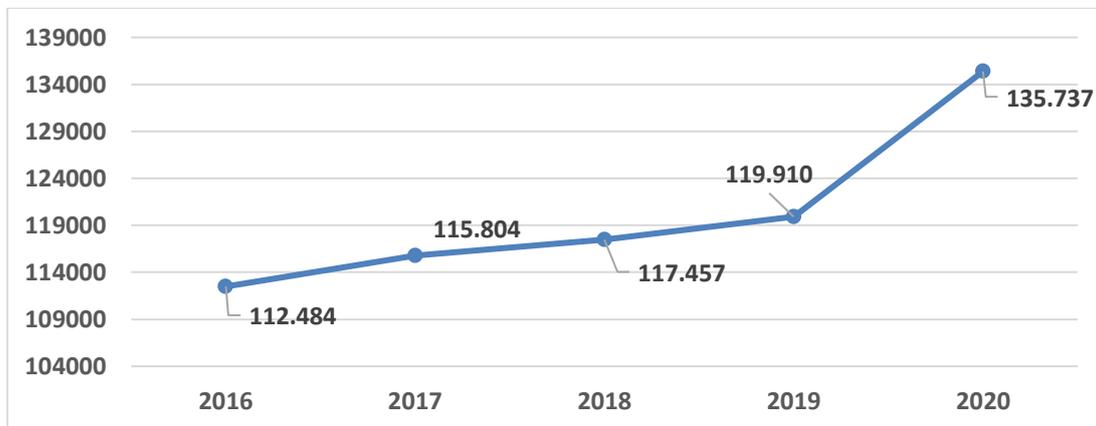
**Tabel 2.5
Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Sensus Penduduk 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk %	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Manuhing	11.527	8,33	10
2	Manuhing Raya	6.308	4,66	11
3	Rungan	12.846	9,49	18
4	Rungan Hulu	7.459	5,51	10
5	Rungan Barat	6.701	4,95	17
6	Sepang	9.016	6,66	23
7	Mihing Raya	7.743	5,72	23
8	Kurun	33.613	24,83	38
9	Tewah	22.025	16,27	20
10	Kahayan Hulu Utara	8.745	6,46	6
11	Damang Batu	5.569	4,04	4
12	Miri Minasa	4.156	3,07	3

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024



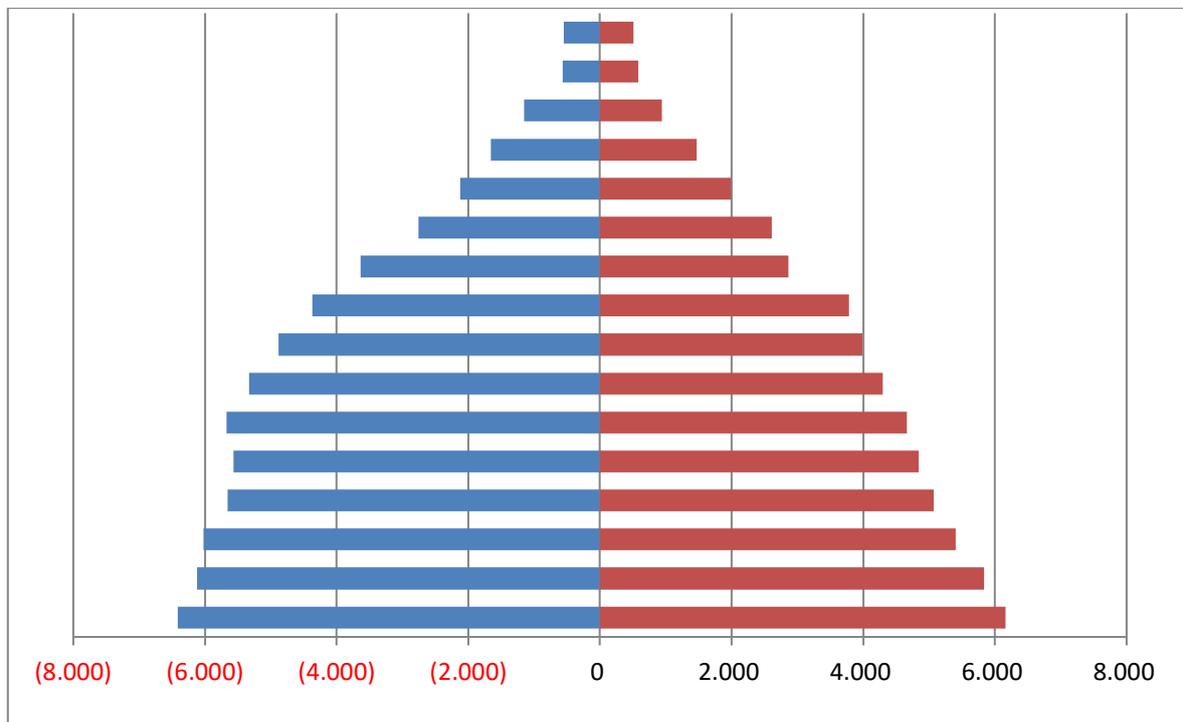
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2016 - 2020

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gunung Mas selalu naik setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah penduduk sebanyak 119.910. Analisis kependudukan salah satu nya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk Kabupaten Gunung Mas, menggambarkan sebagian besar penduduk Kabupaten Gunung Mas berada pada usia muda lebih dominan dibandingkan dengan orang-orang yang masuk dalam usia produktif. Jumlah penduduk usia muda perlu diikuti oleh upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan dan kesehatan.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2020

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

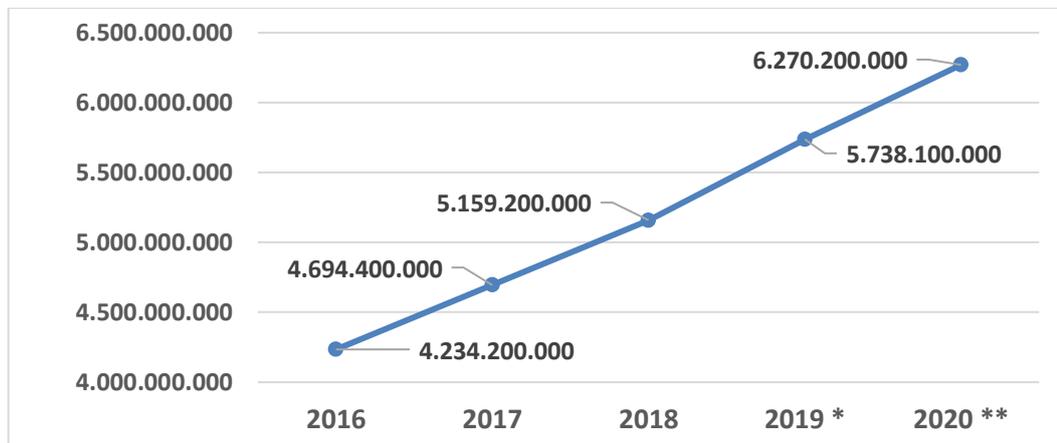
Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pencapaian indikator pembangunan yaitu terwujudnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah yang mempunyai ketergantungan perekonomian pada sektor pertanian dengan subsektor perkebunan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gunung Mas mempunyai karakteristik wilayah yang sesuai untuk perkebunan. Kondisi perekonomian di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan indikator PDRB, terlihat semakin membaik. Nilai PDRB terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Peningkatan nilai PDRB tersebut menunjukkan peningkatan sumberdaya ekonomi di Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas, 2016 - 2020 (Milyar Rupiah)

Dilihat dari grafik di atas, nilai PDRB pada tahun 2020 merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020 mencapai 6.270.200.000 milyar rupiah, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5.738.100.000 milyar rupiah di tahun 2019 atau naik sebesar 9,2 %.

Tabel 2.6 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Gunung Mas (Persen) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,31	31,64	29,70	28,83	29,24
2	Pertambangan dan Penggalian	12,29	12,31	11,89	12,17	13,70
3	Industri Pengolahan	9,04	8,85	9,05	8,80	8,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	11,83	12,18	12,63	13,18	11,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,08	9,29	9,97	10,02	10,08
8	Transportasi dan Pergudangan	1,67	1,72	1,82	1,88	1,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,78	1,77	1,81	1,85	1,66
10	Informasi dan Komunikasi	1,16	1,13	1,14	1,11	1,23



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,55	0,55	0,55	0,53	0,52
12	Real Estate	2,81	2,82	2,95	2,94	2,95
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,32	6,48	6,75	6,82	6,87
15	Jasa Pendidikan	7,56	7,61	7,91	7,97	7,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,19	3,22	3,39	3,44	3,50
17	Jasa Lainnya	0,31	0,31	0,32	0,32	0,29
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas di dominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan walaupun persentasenya dalam lima tahun terakhir (2016-2020) cenderung menurun setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 sektor tersebut berada di poin tertinggi yaitu 32,31 persen yang kemudian turun pada tahun 2019 yaitu sebesar 28,83 persen dan mulai merangkak naik pada tahun 2020 yaitu sebesar 29,24 persen. Sektor lainnya yang mendominasi adalah Sektor pertambangan dan penggalian mencapai angka sebesar 13,70 persen di tahun 2020, serta Sektor Konstruksi dikisaran 11,89 persen turun sekitar 1,29 persen dari tahun 2019. Adapun sektor yang paling sedikit berkontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Gunung Mas adalah sektor pengadaan listrik dan gas yang menyumbang 0,02 persen dari PDRB.

Tabel 2.7

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2016-2020**

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,31	5,99	6,34	7,15	3,65
2	Pertambangan dan Penggalian	11,19	10,03	2,53	7,58	6,48
3	Industri Pengolahan	6,71	4,28	10,06	5,62	0,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,21	6,39	8,07	14,76	15,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,39	-5,27	5,21	6,86	9,72
6	Konstruksi	9,19	8,56	4,73	8,80	-5,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,81	7,72	10,43	6,21	4,27

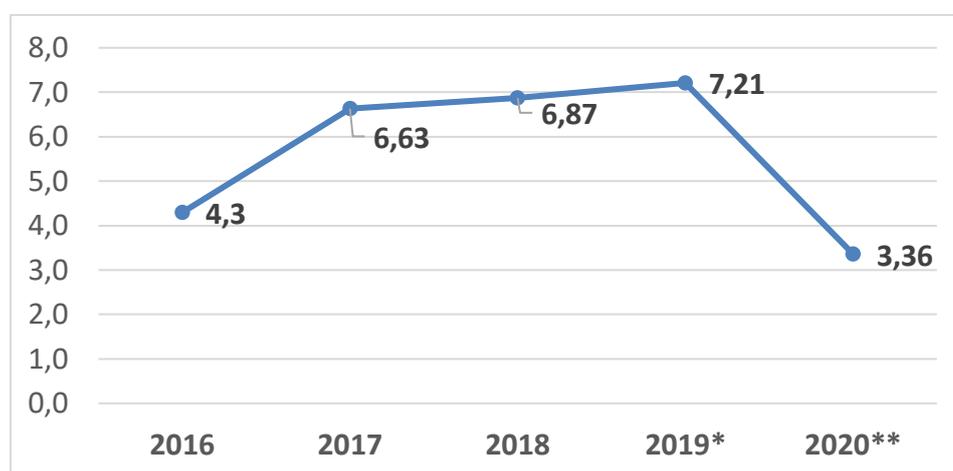


**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

8	Transportasi dan Pergudangan	6,87	7,55	8,71	8,05	-0,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,49	5,58	7,38	7,14	-3,66
10	Informasi dan Komunikasi	2,56	2,63	7,31	5,94	18,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,7	3,38	5,82	4,13	6,71
12	Real Estate	7,19	5,05	8	7,34	6,81
13	Jasa Perusahaan	4,66	4,46	2,81	3,50	-0,42
14	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,8	6,99	7,74	8,39	7,61
15	Jasa Pendidikan	5,14	5,19	8,37	6,96	5,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,54	5,34	8,87	7,68	9,71
17	Jasa Lainnya	6,3	3,77	7,38	5,93	-1,55
Produk Domestik Regional Bruto		7	6,63	6,87	7,21	3,36

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan trend fluktuatif selama rentang waktu 2016 - 2019. Dimana pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas sebesar 7 persen kemudian turun di tahun 2017 yaitu sebesar 6,63 persen kemudian naik lagi pada tahun 2018 sebesar 6,87 persen. Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan lagi hingga 7,27 persen, dimana sektor pengadaan listik dan gas menyumbang porsi yang lebih besar dari sektor yang lain yaitu sebesar 14,76 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas merosot tajam ke angka 3,36 persen dimana ini adalah angka terendah selama lima tahun terakhir, yang mana merupakan dampak dari pandemi Covid - 19 yang terjadi secara global.



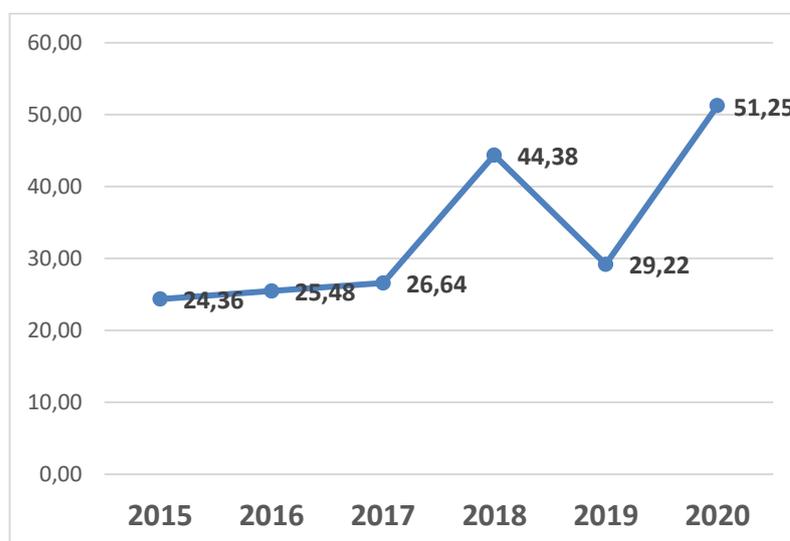
Sumber : Gunung Mas dalam Angka 2021

Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas 2016 -2020



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita di Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan cukup signifikan dalam enam tahun terakhir pada tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp 25,48 juta dan meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi Rp 44,38 juta namun menurun pada tahun 2019, yang mana PDRB per kapita menjadi Rp.29,22 juta akan tetapi naik kembali di tahun 2020 menjadi Rp.51,25 juta.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2015-2020 (Juta Rupiah)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan hasil analisis bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Fokus ini akan melihat sejauh mana kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas sejauh ini.

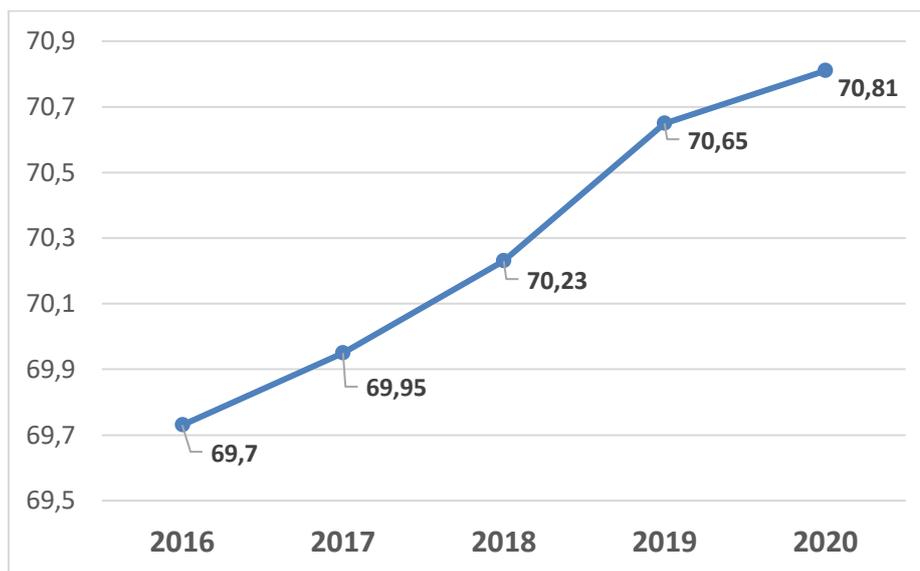
a. Indeks Pembangunan Manusia

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020

Nilai IPM Kabupaten Gunung Mas yang terus meningkat diikuti dengan komponen penyusun IPM yang meningkat pula nilainya. Berikut komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia, yakni angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita dalam lima tahun terakhir.

**Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen Penyusunnya
Kabupaten Gunung Mas, 2016-2020**

Unsur Pembentuk IPM	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,94	8,96	8,97	9,03	9,14
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	11,74	11,75	11,76	11,77	11,78



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Angka Harapan Hidup	Tahun	70,02	70,15	70,24	70,23	70,4
Paritas daya beli	Rp	10.155	10.276	10.504	10.822	10.793
IPM	%	69,73	69,95	70,23	70,65	70,81

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

b. Pendidikan

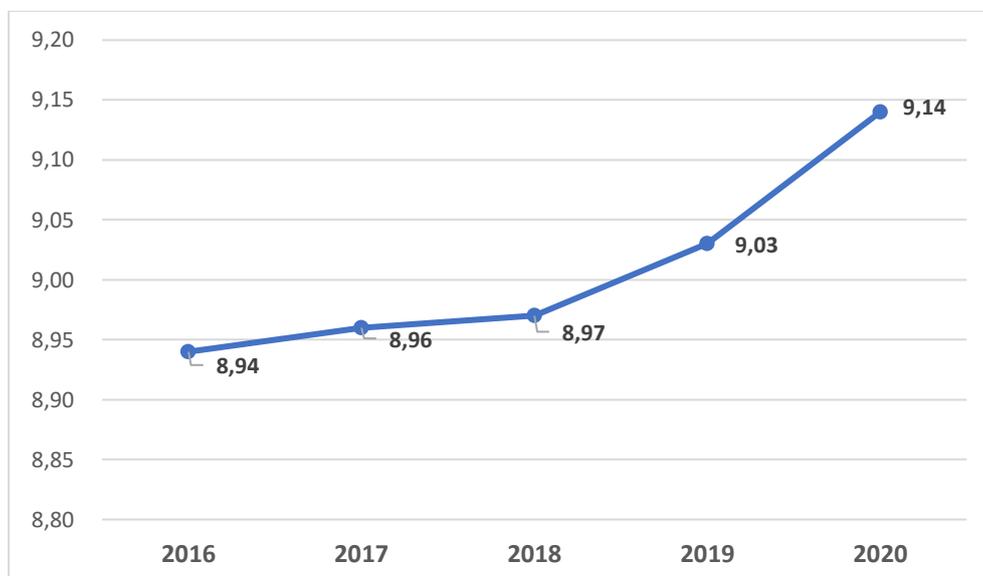
Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 RLS Kabupaten Gunung Mas mencapai 9,14 yang meningkat dari tahun sebelumnya 9,03 di tahun 2019. Angka ini berarti bahwa penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata mengenyam jenjang pendidikan sekolah selama 9,14 tahun atau Kelas 3 SMP semester satu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

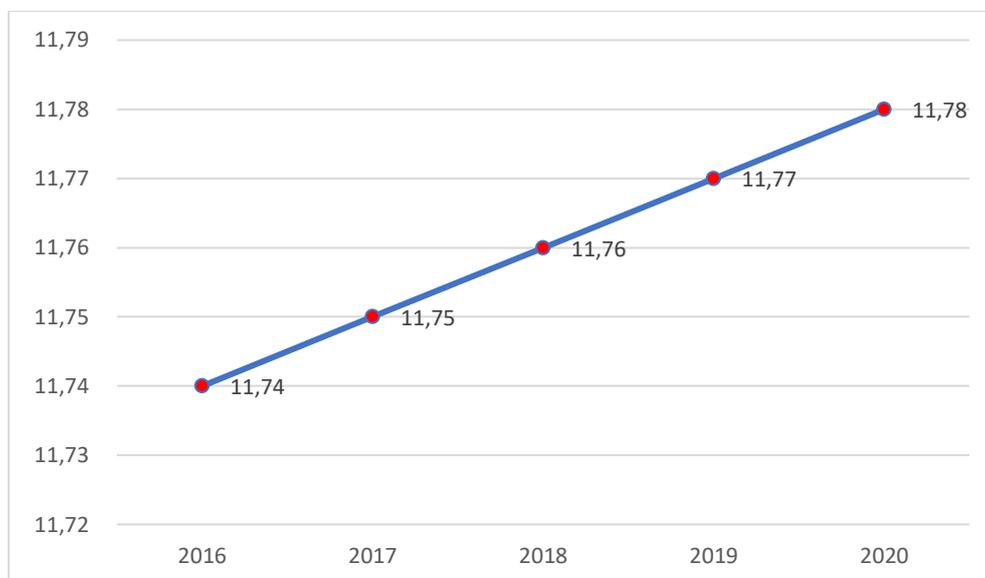
Gambar 2.7 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Berdasarkan gambar di bawah, terlihat bahwa nilai HLS Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 mencapai 11,78 tahun. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan untuk dapat bersekolah selama 11-12 tahun. Dengan kata lain, dalam kondisi normal, seseorang berumur 7 tahun ke atas diharapkan dapat bersekolah sampai dengan SMA/SMK. Tingginya harapan lama sekolah ini harus diikuti dengan meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Gunung Mas untuk meningkatkan kualitas dan daya saing individu.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024



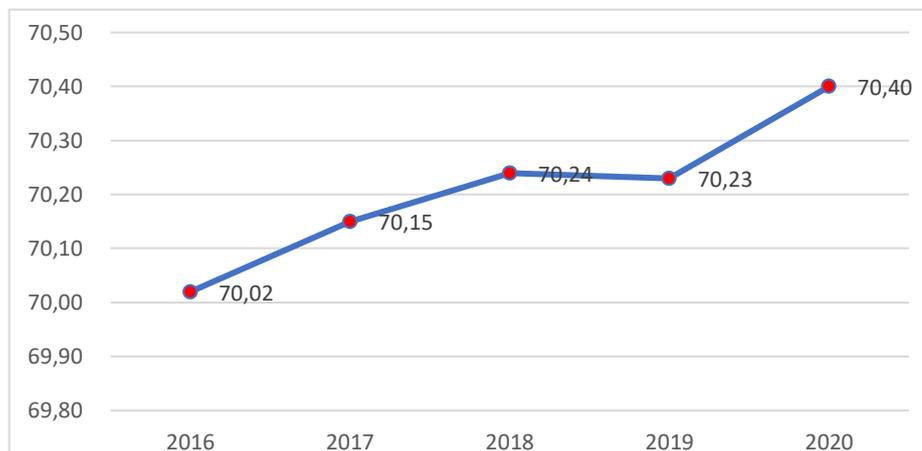
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.8 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020

c. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Gunung Mas semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Angka harapan hidup Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020 mencapai 70,4 tahun yang berarti setiap bayi yang baru lahir hidup pada tahun 2019 memiliki harapan hidup hingga mencapai usia 70,4 tahun. Perkembangan nilai AHH dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.9 Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

No	Indikator	2019	2020
		1	Angka Usia Harapan Hidup
2	Angka Kematian Ibu	0,15%	0,12%
3	Angka Kematian Bayi	0,70%	0,70%
4	Angka Gizi Kurang	23,77%	30,03%
5	Angka Gizi Buruk	1%	2,13%
6	Angka Stunting	32,83%	22,87%

Masalah gizi dan tumbuh kembang anak masih menjadi hambatan besar bagi Pemerintah Daerah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia, angka prevalensi stunting di Kabupaten Gunung Mas 3 tahun terakhir sudah mengalami tren penurunan hingga dari angka awal 38,21 menjadi 22,87%, dan terus berusaha menekan hingga batas atas ketetapan WHO yaitu 20%.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Aspek pelayanan umum ini mencakup fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, layanan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan.

2.3.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena ini, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan merupakan salah satu infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat di Kabupaten Gunung Mas, sampai dengan tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas membangun jalan kabupaten sepanjang 738,992 km. Dari panjang jalan tersebut, 737,935 km yang dapat dilalui oleh mobil. Selain jalan, indikator lain yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:



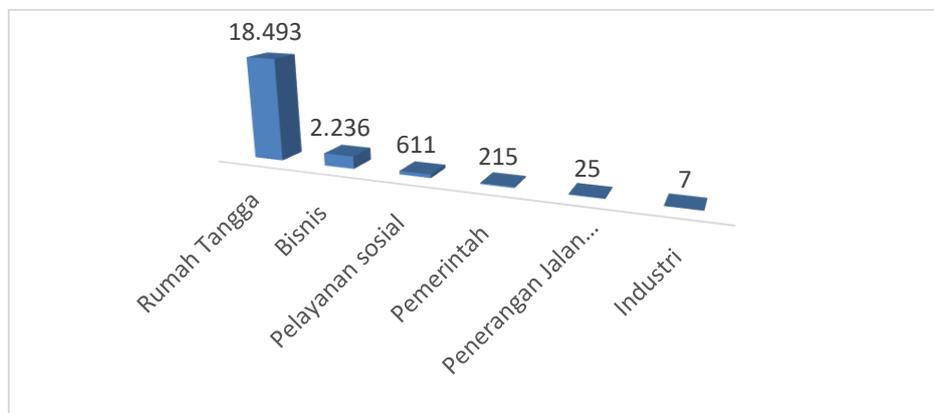
Tabel 2.9
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2016 -2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	0,176	0,565	0,123	0,123	0,565
Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	300	20	38	40	7,492
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	7,436	7,450	7,856	7,983	7,492
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (%)	20,096	24,510	25,04	23,32	25,74
Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal (%)	56,60	78	79	79	78
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	39	35	36	38	21,99
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk (%)	19,76	10,63	0,27	1,89	2,43
Persentase penanganan sampah (%)	12,21	12,21	41,48	30,45	24,86
Rasio Rumah Layak Huni	25,855	23,328	23,520	23,735	22,01
Pemukiman Layak Huni (Ha)	6,856	6,909	6,909	6,909	6,945
Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	737,935	737,935	738,992	738,992	738,992
Persentase RT yang memiliki akses air minum bersih	51,65	65,06	62,07	64,85	60,67
Persentase RT yang memiliki akses air minum layak	21,46	43,81	22,35	13,38	55,14

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2020

b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Listrik merupakan kebutuhan bukan hanya sebagai sumber penerangan, namun juga sebagai sarana penunjang kehidupan sehari-hari. PLN cabang Kuala Kurun sebagai pemasok kebutuhan listrik di Kabupaten Gunung Mas mempunyai jumlah pelanggan yang beragam, mulai dari rumah tangga, sosial, industri, pemerintah sampai bisnis. Jumlah pelanggan tertinggi adalah rumah tangga yaitu sebanyak 18.493 pelanggan dari total pelanggan PLN Tahun 2020 yang sebanyak 21.587 pelanggan.



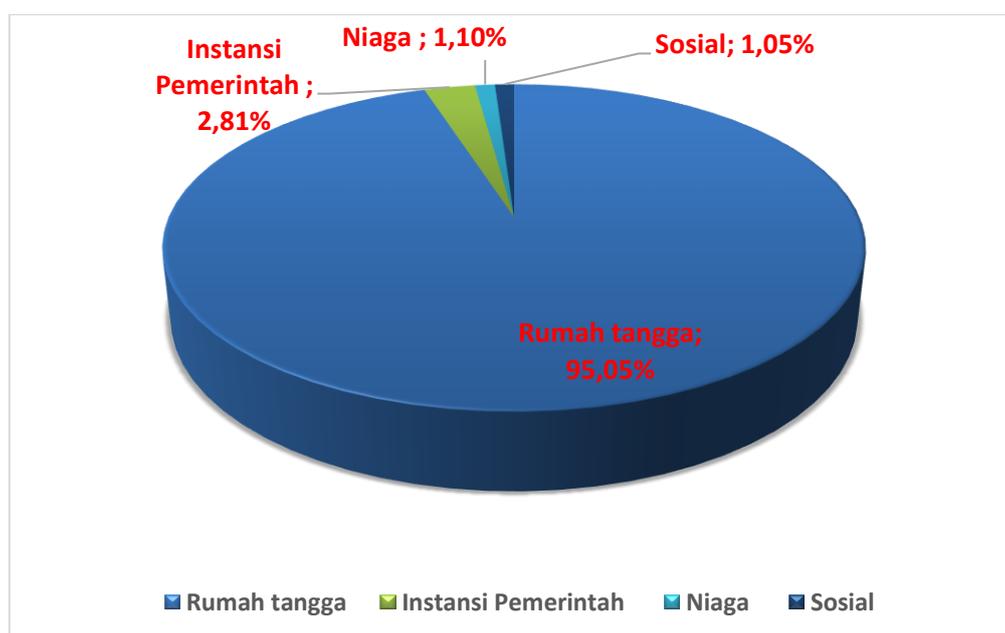
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.10 Banyaknya Pelanggan Listrik PLN Cabang Gunung Mas



Tahun 2020

Selain listrik, fasilitas perumahan yang wajib dimiliki masyarakat adalah air. Berdasarkan persentase air yang disalurkan, pada tahun 2020 sebagian besar didistribusikan untuk kebutuhan rumah tangga yaitu sebanyak 95,05 persen atau 1.419.568 m³. Sedangkan pada urutan kedua, susut/hilang sebesar 4,95 persen atau 73.928 m³. Persentase air yang disalurkan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.11 Persentase Air Yang Disalurkan Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020

Selain jalan, indikator lain yang menjadi ukuran keberhasilan kinerja urusan pemukiman antara lain:

Tabel 2.10 Indikator Kinerja Urusan Pemukiman Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2015 - 2019

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	3,721	14,844	14,844	25,464	16.044
Rumah Tangga Bersanitasi (%)	39	35	36	38	21,99
Rumah Layak Huni (unit)	35.267	26.241	26.455	26.698	26.949
Jumlah RT belum berlistrik	156.139	9.942	23.328	6.972	
Jumlah Jumlah RT berlistrik	490.949	18.280	19.485	22.158	



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Rasio elektrifikasi PLN	66,03	49,87	35,69	60,08	62,76
Rasio elektrifikasi Non PLN	9,84	14,90	9,82	35,13	31,28
Rasio Elektrifikasi	75,87	64,77	45,51	76,17	76,97
Rasio desa berlistrik	82,64	76,38	76,98	85,04	

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah dan Bagian Ekobang Setda Kabupaten Gunung Mas, 2021

c. Urusan Sosial

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Gunung Mas. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Hal ini masih wajar karena kenaikan biaya hidup atau juga menyangkut kesejahteraan dan pendapatan masyarakat bertambah. Pada tahun 2020 garis kemiskinan mencapai 438.881 sedangkan jumlah penduduk miskin sebesar 5.780 atau 4,27 persen dari total penduduk Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 2.11
Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin
Di Kabupaten Gunung Mas 2016-2020**

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (Ribu)	Persentase
2016	365.198	6,55	5,85
2017	388.415	6,67	5,83
2018	388.964	5,96	5,10
2019	403.045	5,86	4,91
2020	438.881	5,78	4,75

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

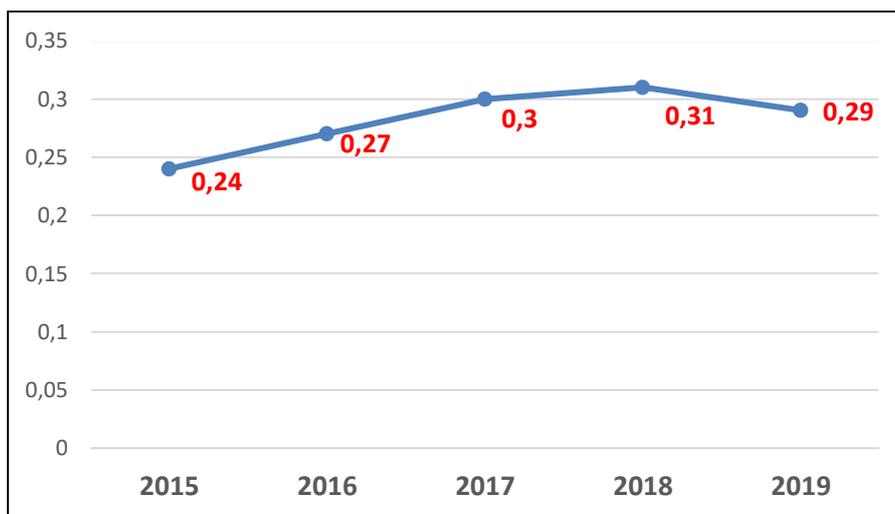
Pembangunan daerah di segala bidang merupakan proses menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Namun seringkali hasil dari pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan penghidupan antarindividu semakin terasa, salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Kabupaten Gunung Mas memiliki gini ratio yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Gunung Mas termasuk dalam kategori tingkat pemerataan rendah, karena terletak di bawah 0,4, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong rendah. Namun hal ini perlu diwaspadai dikarenakan nilai indeks tiap tahunnya, seperti yang terlihat pada gambar di bawah indeks gini kabupaten Gunung Mas pada tahun 2018 sebesar 0,31 dan angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 0,30 di tahun 2017 akan tetapi, menurun di tahun 2020 dengan angka 0,29.



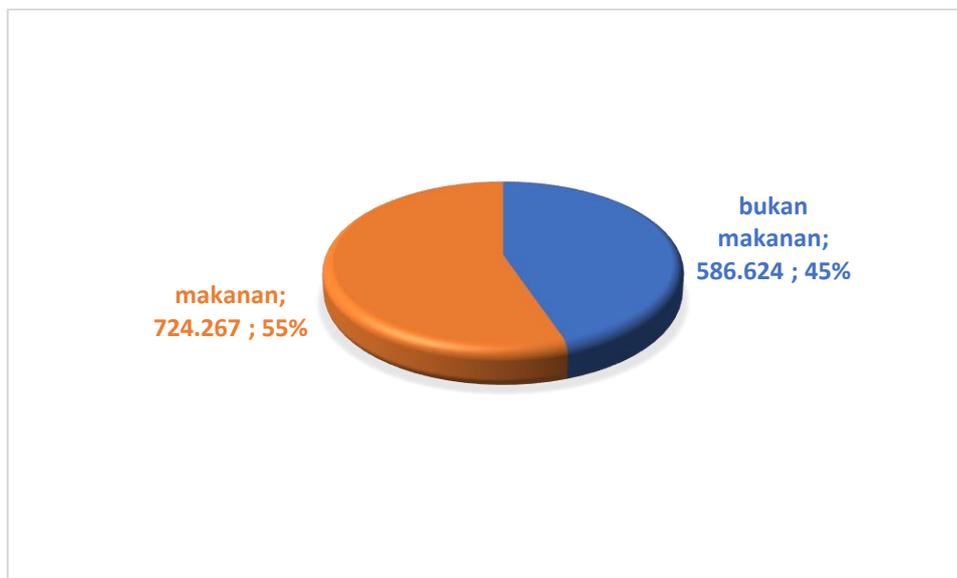
Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.12 Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2019

Pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan gambaran secara mikro bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020 sebanyak Rp 1.310.891 per bulan. Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang mencapai 55,25 % atau Rp 724.267. Sedangkan



sisanya digunakan untuk pengeluaran konsumsi non makanan yang mencapai Rp 586.624 atau 44,75 %.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

**Gambar 2.13 Pengeluaran Konsumsi Perkapita
Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020**

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan daerah yang wajib meskipun bukan merupakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

a. Urusan Tenaga Kerja

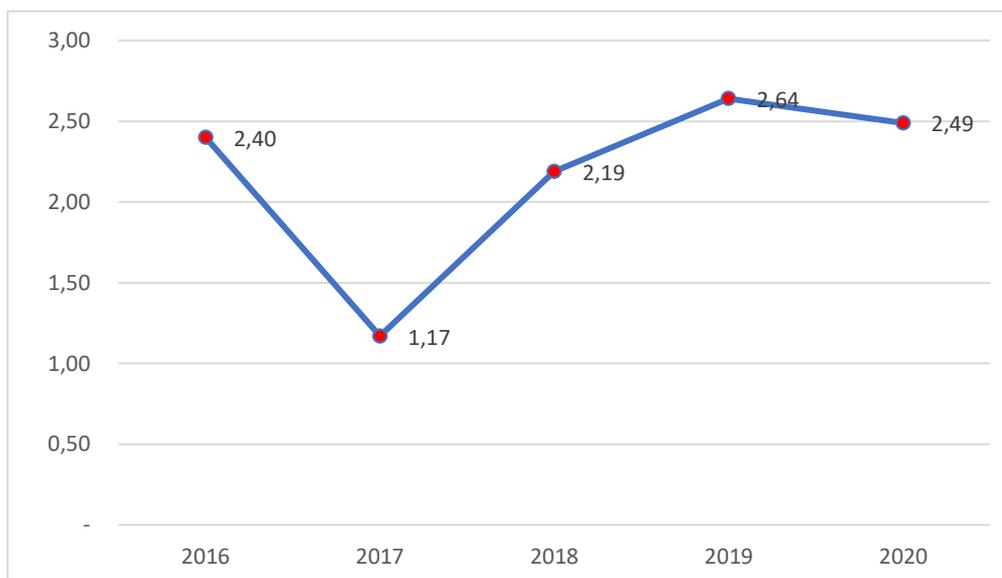
Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia sekaligus *income* rumahtangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumahtangga yang meningkat.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gunung Mas memiliki tren fluktuatif naik turun dalam setiap periodenya. Pada tahun 2016 tingkat



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

partisipasi terbuka Kabupaten Gunung Mas mencapai 2,40 persen kemudian turun di tahun 2017 sebesar 1,17 persen. Namun di tahun 2018 Tingkat pengangguran terbuka naik kembali hingga 2,19 persen dan naik lagi hingga mencapai angka 2,64 persen di tahun 2019 kemudian turun di tahun 2020 sebesar 2,49 persen.

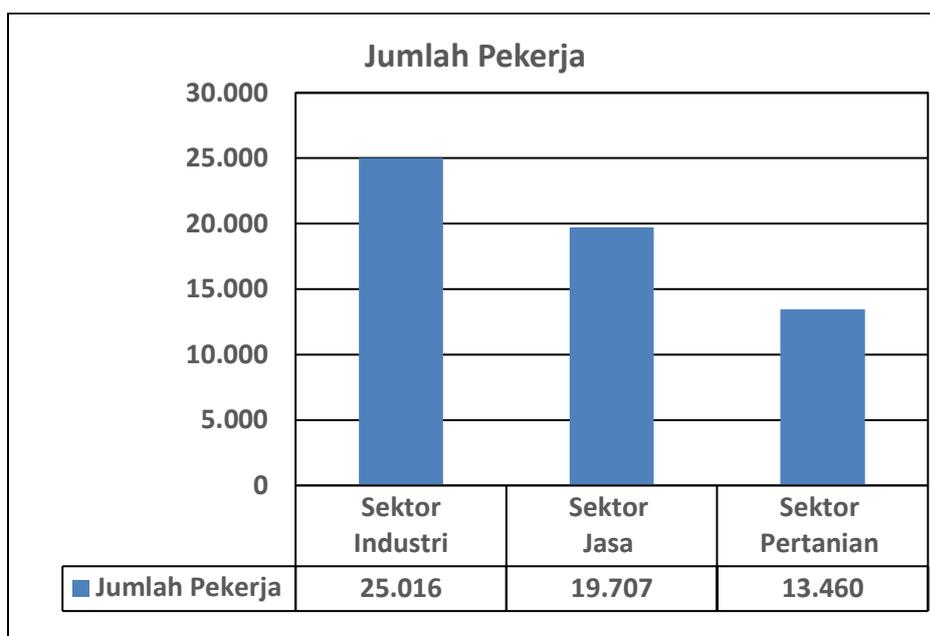


Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020

Jumlah pengangguran di kabupaten Gunung Mas Jumlah pengangguran terbuka Agustus 2020 mencapai 1.487 orang (dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,49 persen). Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, tahun 2020 kelompok pengangguran terbuka tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) tercatat memiliki angka jumlah pengangguran tertinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain yaitu sebanyak 405 orang. Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2020 mencapai 58.183 orang. Pekerja laki-laki mencapai 39.297 orang dan pekerja perempuan 19.886 orang. Jika berdasarkan kelompok umur, pekerja terbanyak Gunung Mas tahun 2020 adalah kelompok umur 30-34 tahun (tercatat sebanyak 7.017 orang, terdiri dari 4.788 orang pekerja laki-laki dan 2.229 orang pekerja perempuan).

Mayoritas penduduk Gunung Mas didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor industri yaitu sebanyak 25.016 orang. Sektor kedua dan ketiga terbanyak berturut-turut adalah sektor jasa 19.707 orang serta sektor pertanian sebanyak 13.460 orang.



Sumber: Gunung Mas Dalam Angka 2021

Gambar 2.15 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020

Sedangkan angka angkatan kerja di wilayah Gunung Mas cenderung menurun dimana pada tahun 2020 tingkat angkatan kerja berkisar 71,22% dimana angka tersebut lebih rendah dari 4 tahun (2016-2019) sebelumnya dimana secara berturut-turut adalah 77,44%, 74,87%, 75,76% dan 72,29%.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender atau (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

c. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu unsur yang diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan yang dinamis atau bisa disebut pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Gunung Mas merupakan kota yang padat penduduknya, sehingga pemerintah daerah belum maksimal dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan pengendalian kebersihan dan keindahan kota. Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Gunung Mas dikarenakan belum ada Tempat Pembuangan Sampah (TPA) resmi dari pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk menampung sampah dari masyarakat.

Status pencemaran status mutu air merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas lingkungan yang menjadi salah satu komponen pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator lainnya yang digunakan adalah status pencemaran udara dan Luas tutupan lahan. Dilihat dari persentase pencemaran status mutu air di Kabupaten Gunung Mas yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah dalam menjaga mutu air sungai tidaklah cukup, perlu adanya peran masyarakat dalam menjaga sungai sebagai sumber kehidupan.

**Tabel 2.12
Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2016 – 2020**

Komponen IKLH	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air	50	50	49,17	46,67	46,67
Indesk Kualitas Udara	76,79	88,61	82,84	88,99	89,45
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	NA	NA	67,88	67,81	66,5
IKLH	NA	NA	66,75	67,85	67,54

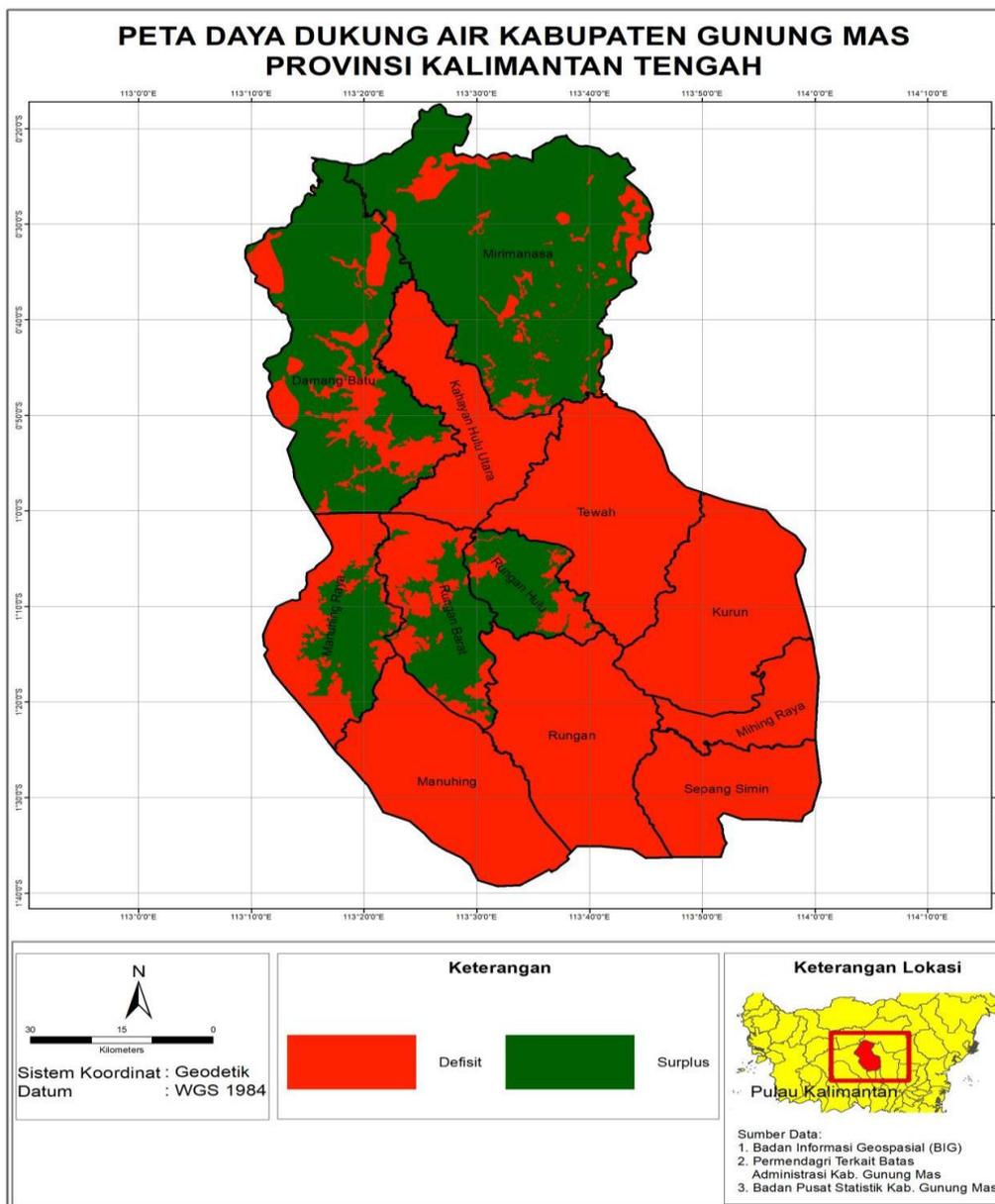
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kab. Gunung Mas, 2021

Untuk menganalisis kemampuan lingkungan hidup Kabupaten Gunung Mas yang dikuantifikasikan, digunakan ambang batas jasa ekosistem sebagai penyedia (provisioning) sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Pangan dan air dipilih sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH).

Sumber air baku Kabupaten Gunung Mas berasal dari Sungai Kahayan. Berdasarkan hasil perhitungan daya dukung air, Kabupaten Gunung Mas rata-rata memiliki status defisit yang artinya daya dukung air di Kabupaten Gunung Mas terlampaui dimana terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan airnya.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024



Sumber : Hasil Analisis, 2019

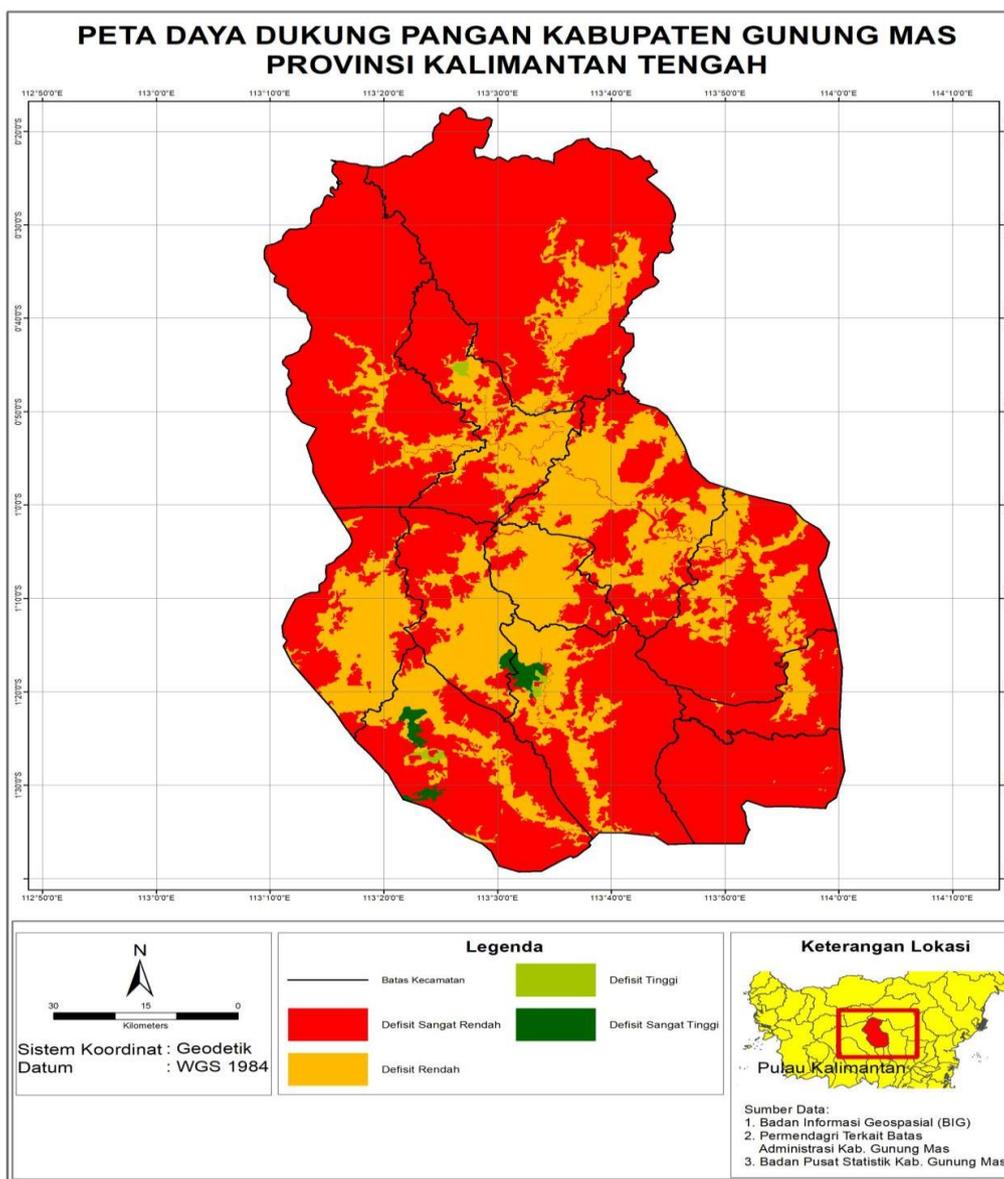
Gambar 2.16 Peta Daya Dukung Air Kabupaten Gunung Mas

Kebutuhan Pangan Kabupaten Gunung Mas dihitung berdasarkan jumlah penduduk di tiap kecamatannya. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat tiga kecamatan yang memiliki kebutuhan pangan yang tinggi yaitu Kecamatan Kurun, Rungan, dan Tewah. Daya dukung pangan dianalisis dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan hasil analisis daya dukung pangan, Kabupaten Gunung Mas seluruhnya berstatus defisit. Dari hasil tersebut maka dibuat peta daya dukung pangan dengan klasifikasi defisit sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Gunung Mas tersebut.



Sumber : Hasil Analisis, 2019

Gambar 2.17 Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Gunung Mas

d. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa potensi perekonomian kabupaten Gunung Mas yang cukup baik. Hal ini terlihat bahwa jumlah pemodal asing dan jumlah pemodal dalam negeri yang cukup banyak. Pada tahun 2020 ini, ada dua sektor ekonomi yang menerima investasi asing yaitu Sektor Pertambangan dan Sektor Pertanian (Perkebunan dan Kehutanan). Sektor Pertambangan menerima investasi asing mencapai 115 Juta Dolar Amerika Serikat atau 47,1% dari seluruh investasi asing yang masuk ke Kabupaten Gunung Mas. Jumlah



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Penanaman Modal Dalam Negeri lebih besar daripada Penanaman Modal Asing yaitu Rp.4.417,06 Milyar PMDN dan Rp. 3.410,76 Milyar PMA.

**Tabel 2.13
Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2020**

Jenis Penanaman Modal	Tahun	
	2019	2020
Penanaman Modal Asing (PMA)	US \$.260.308.071,83	US \$.243.625.985,-
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	RP.4.401.935.449.148,22	Rp. 4.417.061.427.313,-

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2020

e. Urusan Kebudayaan

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kota yang menjunjung seni dan budaya. Hal ini terlihat dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunung Mas yang berbasis kebudayaan. Situs-situs kebudayaan yang menjadi objek pariwisata antara lain Betang Singa Kenting, Betang Jaga Kamis, Betang Damang Batu, Betang Toyoi, dan Kaleka Betang Siwung Tahunjung.

Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas yang dibuktikan dengan jumlah benda, situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2017 ini terdapat 25 benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2016 sebanyak 12 buah. Grup kesenian yang difokuskan pada pelestarian dan pengembangan kebudayaan jumlahnya cukup banyak yaitu 25 grup. Diharapkan jumlah gedung kesenian yang hanya berjumlah 1 unit bisa diperbanyak oleh pemerintah kabupaten Gunung Mas sebagai sarana bagi grup kesenian.

**Tabel 2.14
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 - 2019**

Indikator Kebudayaan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	1	1	1	1	-
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1	1	1	1	1



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	12	25	25	25	25
Jumlah Grup Kesenian (Buah)	26	26	26	26	26
Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	1	1	1	1	1

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Gunung Mas "Laporan Evaluasi Dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020", 2020

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gunung Mas.

a. Urusan Pariwisata

Sektor Pariwisata di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah sektor ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunikan dan keragaman. Bila dapat dikembangkan dengan baik, sektor pariwisata ini mampu memberi peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan sumbangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu upaya yang harus segera dilakukan Pemerintah Daerah adalah mempersiapkan masyarakat setempat, infrastruktur, dan promosi sehingga mampu menarik minat investor menanamkan modalnya di bidang pariwisata.

Objek wisata potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas yaitu:

1. Objek wisata alam Batu Suli dan Batu Tingkes
2. Objek wisata alam Sungai Hamputung
3. Objek wisata alam air terjun Batu Mahasur
4. Objek wisata alam Bukit Amai Rawang
5. Objek wisata budaya Betang Tumbang Korik
6. Objek wisata budaya Betang Damang Batu Tumbang Anoi
7. Objek wisata budaya Betang Tumbang Malahui

Berbagai potensi tersebut tentu saja dapat menjadi beberapa paket wisata yang sangat menarik dan unik, sehingga mampu memberikan daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan wisata di daerah ini adalah minimnya



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

sarana dan prasarana pendukung di lokasi wisata, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi menuju lokasi tujuan wisata dan kurangnya kegiatan promosi, baik untuk para investor maupun kepada wisatawan.

Pariwisata Kabupaten Gunung Mas belum banyak berkembang. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan domestik di tahun 2020 sebanyak 10.365 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 8 orang. Diharapkan perlu adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana objek wisata serta promosi yang memadai sehingga mendongkrak jumlah wisatawan di kabupaten Gunung Mas. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang potensial bagi penerimaan daerah Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 2.15
Perkembangan Jumlah Wisatawan dan PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 – 2020**

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	6.256	2.324	1.631	1.883	10.373
2	PAD sektor Pariwisata	Rp	98.875 .000	133.150. 000	132.884. 000	200.92 7.500	65.068 .000

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka 2021

b. Urusan Pertanian

Sektor pertanian secara umum terdiri atas pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian merupakan basis perekonomian kabupaten Gunung Mas. Nilai tambah sektor pertanian dari waktu ke waktu tetap selalu meningkat dan peranan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja tetap terpenting. Mayoritas penduduk Kabupaten Gunung Mas, yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, hingga saat ini masih menyandarkan mata pencahariannya pada sektor pertanian.

Peranan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat penting, sebagai sektor andalan dalam peran terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas. Angka Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian pada tahun 2019 menunjukkan angka tertinggi dibandingkan tiga tahun terakhir.

Tabel 2.16



Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	32,31	31,64	29,70	28,83	29,24
2	Laju pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	5,31	5,99	6,34	7,15	3,65

2.3.3. Penunjang Urusan

a. Penyelenggaraan Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tersebut, disusun suatu laporan yang disebut LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Hasil dari nilai pelaporan LAKIP Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2019 menunjukkan predikat “B”.

Selain dari LAKIP, dalam melihat kinerja pemerintah dapat terlihat dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam mengevaluasinya, maka dirumuskan suatu indikator yakni Indeks Maturitas SPIP yang dapat melihat tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Pada tahun 2019, Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Gunung Mas sudah mencapai level 2 sehingga masuk kategori berkembang. Level 2 diartikan bahwa praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya. Hasil dari nilai pelaporan LAKIP Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2019 menunjukkan predikat “B”.

b. Keuangan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah



daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pemerintah Kabupaten Gunung Mas di tahun 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Gunung Mas memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Tabel 2.17

**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015-2019**

No	Tahun	Opini Publik
1.	2015	Wajar Dengan Pengecualiaan
2.	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
3.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
4.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
5.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Bappeda litbang Kabupaten Gunung Mas “Laporan Evaluasi Dan Pengendalian Program Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Triwulan IV Tahun Anggaran 2020”, 2020

c. Pelayanan Publik

Pelayanan prima yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang bergerak di bidang pelayanan baik pelayanan yang berupa barang publik maupun jasa publik. Hasil dari pelayanan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang pada tahun 2020 mencapai nilai 77,53 persen atau termasuk dalam kategori “Baik”.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi Kabupaten Gunung Mas menunjukkan trend positif di setiap tahunnya dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

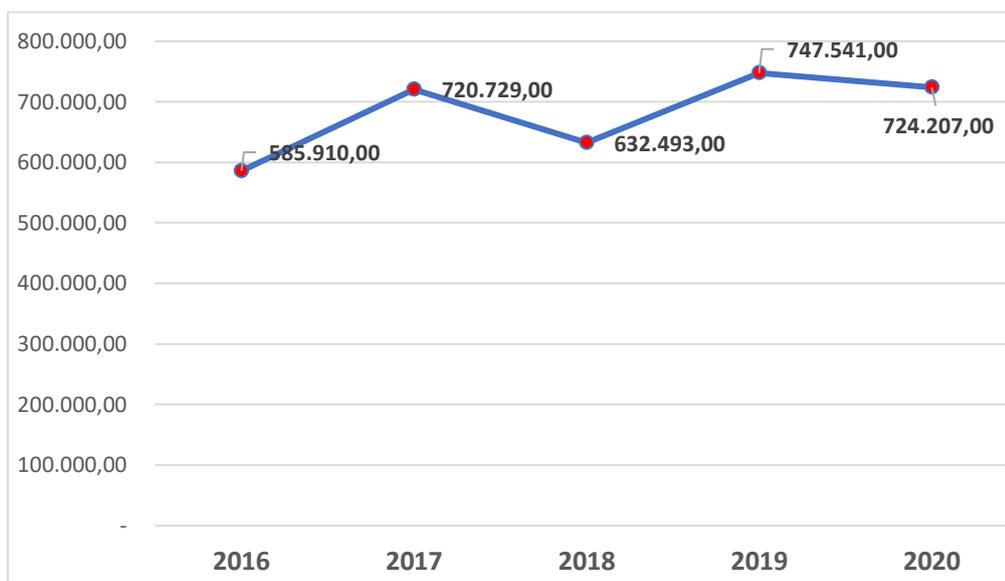
Penduduk kabupaten Gunung Mas rata-rata telah memiliki pendapatan di atas 500.000 rupiah. Semakin besar pendapatan seseorang semakin besar pula konsumsi baik makanan maupun non makanan dan porsi konsumsi non makanan semakin meningkat sedangkan porsi konsumsi makanan menurun.

Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, bahwa pengeluaran



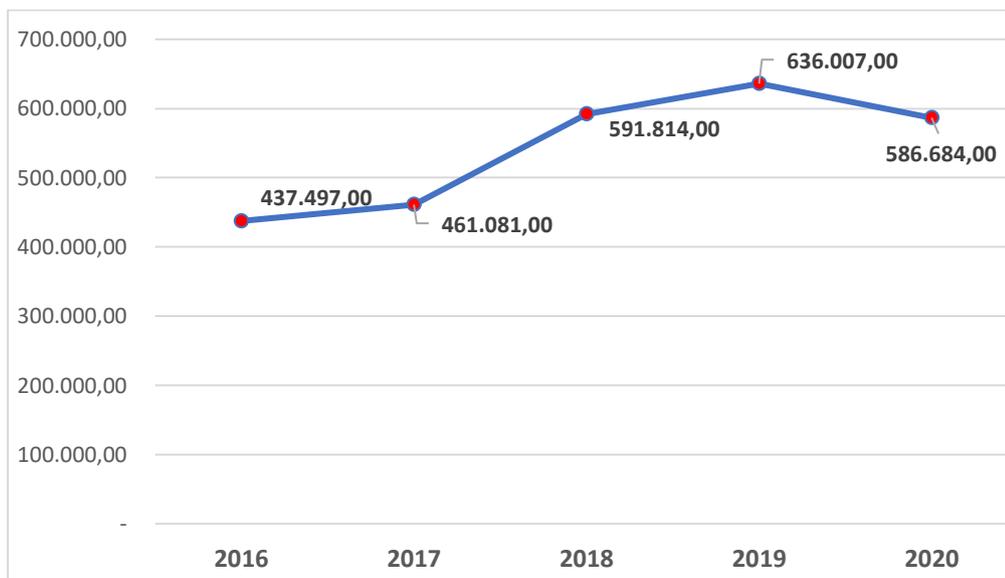
PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

konsumsi perkapita pada kelompok makanan mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2020, begitu juga dengan pengeluaran konsumsi perkapita menurut kelompok non makanan. Namun jumlah kelompok makanan masih di atas jumlah kelompok non makanan.



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.18 Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Gambar 2.19 Pengeluaran Konsumsi Perkapita menurut Kelompok Non Makanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2020

Nilai Tukar Petani berperan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan, yang menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa baik yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi pertanian.



Sehingga, semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat daya beli petani.

Dari hasil pemantauan harga penjualan komoditas hasil pertanian di tingkat produsen, biaya produksi, dan konsumsi rumah tangga terhadap barang/jasa di wilayah perdesaan selama Juni 2016, menunjukkan NTP Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,40 persen, yaitu dari 97,73 di Mei 2016 menjadi 98,12 di Juni 2016. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga yang diterima sebesar 0,66 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang sebesar 0,26 persen.

2.4.2. Fokus Investasi

Kabupaten Gunung Mas memiliki hasil sumber daya alam yang melimpah khususnya pada hasil pertambangan. Komoditas sektor pertambangan yang potensial adalah emas dan batubara, sehingga banyak investor dan perusahaan yang ingin menggali potensi tersebut. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 4.417.061.427.313,00 sedangkan di tahun sebelumnya di tahun 2019 hanya sebesar Rp 4.401.935.449.148,22 Sektor perkebunan mendominasi dalam penanaman modal dalam negeri yaitu sebesar Rp. 4.122.380.187.598,00 Sektor perkebunan sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk mensubstitusi sektor pertambangan secara perlahan. Proses perijinan investasi di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020 mulai ada percepatan dari tahun 2019 yang membutuhkan waktu 10 hari di tahun 2020 proses perijinan dapat selesai kurun waktu selama 8 hari. Diharapkan dengan dipercepatnya proses perijinan investasi akan mempermudah para penanam modal sehingga banyak investor dan perusahaan yang akan berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas.

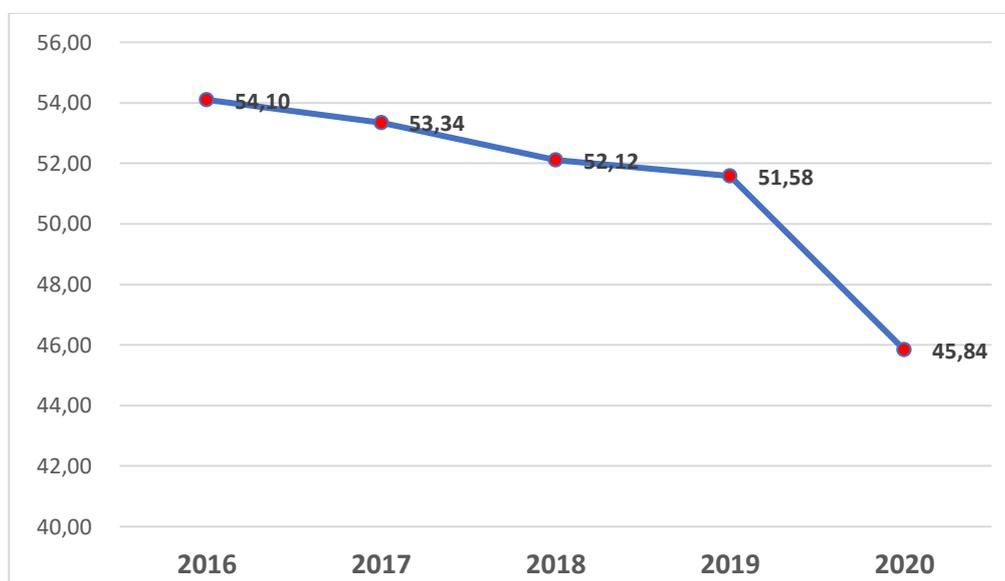
2.4.3. Fokus Infrastruktur

Infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Meningkatnya pembangunan infrastruktur belum bisa dilaksanakan secara merata, masih terdapat daerah terpencil Kabupaten Gunung Mas. Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas sebesar 10.804 km², sedangkan wilayah produktifnya sebesar 585 km². Hal ini menandakan bahwa hanya 5,4 persen dari total wilayah yang termasuk wilayah produktif.



2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia mengindikasikan bahwa daya saing daerah bisa dilihat dari segi pembangunan manusia. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (penduduk usia muda dan penduduk usia lanjut) dengan jumlah penduduk usia produktif. Penduduk Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh penduduk muda yang masih produktif yaitu usia antara 15 sampai 64 tahun. Angka beban tanggungan per 100 orang di Kabupaten Gunung Mas mencapai 45,84 yang artinya tiap 100 orang pada kelompok usia produktif menanggung sekitar 46 orang pada kelompok usia non-produktif.



Gambar 2.20 Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020

B. Indikator Pembangunan Kabupaten Gunung Mas

Berikut indikator pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan potret keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas dalam lima tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel 2.18
Indikator Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
I	ASPEK KESEJAHTERAAN						
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosisl, Serta Budaya dan Olahraga						
1	Pertumbuhan PDRB	(%)	7	6,93	6,91	7,21	3,36
2	Laju Inflasi	(%)	3,26	3,11	2,62	2,7	2,7
3	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	4.234.26 8.60	4.718.69 4,00	5.212.66 8,00	5.738.10 0,00	6.270.20 0
4	Angka Kemiskinan	(%)	5,85	5,83	5,10	4,91	4,75
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)		1,17	2,19	2,62	2,49
6	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	69,73	69,95	70,23	70,65	70,81
7	Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun	Ribu Rp	10.155	10.276	10.504	13.835	11.238
8	Jumlah PDRB Perkapita/Tahun	Juta Rp	25,48	26,64	44,38	29,22	51,25
II	ASPEK PELAYANAN UMUM						
A	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	Pendidikan						
1.1	Angka melek huruf (%)	(%)	99,95	99,8	99,74	99,67	99,91
1.2	Angka Partisipasi Kasar						
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	(%)	36,94	79,65	56,37	79,65	82,53
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	(%)	124,56	111,39	114,87	113,77	111,88
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	(%)	79,06	84,97	85,40	87,21	88,17
1.4	Angka Partisipasi Murni						
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(%)	100	100,00	99,42	96,42	99,48
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(%)	76,38	93,96	94,72	94,72	79,14
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C (%)	(%)	55,99	60,68	58,85	61,64	54,65
1.5	SD/MI						
1.5.1	Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts		11	10	12	15	1:12
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	110,41	110,67	73,83	83,89	109,11
1.5.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		0:00	92,3	110,68	99,38	125,28
1.6	SMP/MTs						
1.6.1	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts		12	11	15	20	1:12
1.6.2	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	92,15	93,96	93,96	94,72	100,36
1.6.3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		0:00	92,3	110,86	97,08	107,16



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.8	Fasilitas Pendidikan						
1.8.1	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	23,61	20,13	82,88	80,96	98,81
1.8.2	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	17,58	25,48	77,6	76,45	100
1.9	Angka Harapan Lama Sekolah		11,74	11,75	11,76	11,77	11,78
1.10	Rata-rata Lama Sekolah		8,94	8,96	8,97	9,03	9,14
1.11.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		89	0,73	1,28	0,11	0,11
1.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						
1.12.1	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	77,23	80,31	84,72	88,72	85,08
1.12.2	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	82,98	92,17	92,41	93,19	100
1.13	Angka Kelulusan						
1.13.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	97,69	98,06	98,64	99,78	100
1.13.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	97,79	96,81	99,38	98,93	100
1.13.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	95,43	88,08	86,75	95,31	95,30
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kelangsungan hidup Bayi		92	93,79	69,64	69,69	91,93
2.2	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	70,02	70,15	70,24	70,32	70,32
2.3	Angka Gizi Buruk (%)	(%)	3	3	2	1	2,13
2.4	Angka kematian ibu	per 100.100 KLH	223	103	74	148	117
2.5	Angka Kematian Bayi	per 1000 KLH	7	8	7	7	7
2.7	Rasio Posyandu per satuan balita	per satuan balita	142 : 10.619	140 : 9.975	150 : 12.164	150 : 12.618	148 : 12.618
2.8	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	17 : 112.484	17 : 115.054	17 : 117.457	17 : 119.910	17 : 135.400
	Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	35 : 112.484	35 : 115.054	35 : 117.457	35 : 119.910	35 : 135.400
2.9	Rasio Rumah sakit per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	1 : 112.484	1 : 115.054	1 : 117.457	2 : 119.910	2 : 135.400
2.10	Rasio Dokter per satuan penduduk	per satuan penduduk	35 : 112.484	29 : 115.054	38 : 117.457	42 : 119.910	42 : 135.400
2.11	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	per satuan penduduk	592 : 112.484	668 : 115.054	565 : 117.457	682 : 119.910	682 : 135.400



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2.13	Cakupan Pembantu Puskesmas	(%)	100	0,69	2,17	2,22	0,03
2.14	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4	(%)	90,57	90	92,3	90,60	90,60
2.15	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	(%)	33,16	60,95	76,06	71,70	71,70
2.16	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	(%)	86,86	86,73	86	87	87
2.17	Cakupan Ibu Nifas	(%)	88,8	90,03	92	92	92
2.18	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	(%)	16, 88	52,23	76	81	81
2.19	Cakupan Kunjungan Bayi	(%)	78,17	93,79	90	96	96
2.20	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	83	102	110	110	110
2.21	Cakupan pelayanan anak balita	(%)	65,33	80,26	82,19	81	81
2.22	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	(%)	24,7	100	100	95	95
2.23	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	(%)	100	100	100	100	100
2.24	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	(%)	95,68	82,76	85,60	100	100
2.25	Cakupan peserta KB aktif (Dinas Kesehatan/RSUD)	(%)	79,93	82	68	71,1	71,1
2.26	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	per satuan penduduk	0	0	0	0	0
2.27	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	(%)	1,22	0	0	0	0
2.28	Penemuan Penderita Baru TBC BTA Positif	(%)	55	77	100	100	100
2.29	Penderita DBD yang ditangani	orang	100	100	157	100	100
2.30	Penemuan Penderita Diare	orang	12,16	100	1.318	0	0
2.31	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	(%)	55,18	44,32	45,33	25,69	25,69
2.32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	(%)	6,26	5,43	0,45	0,48	0,48
2.33	Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	(%)	100	100	100	0	0
2.34	Tingkat pengembangan pelayanan media spesialis	dokter	6	7	7	10	10
2.35	Jumlah ketersediaan alat kesehatan pada tiap unit pelayanan	(%)	75	80	75	75	75
2.36	Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk tiap unit pelayanan	(%)	75	98	83	94	94
2.37	Peningkatan status RSUD Kuala Kurun Kab. Gunung Mas		D	D	C	C	C



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2.38	Cakupan Desa Siaga Aktif		17	17	17	17	47
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	Juta HA	0,176	0,565	0,123	0,123	0,56
3.2	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	HA	300	20	38	40	7,49
3.3	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	HA	7,436	7,45	7,856	7,983	7,49
3.4	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	20,10	24,51	25,04	23,32	25,74
3.5	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	(%)	56,60	78	79	79	78
3.6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	(%)	39	39	36	38	21,99
3.7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	(%)	19,76	10,63	0,27	1,89	2,43
3.8	Persentase penanganan sampah (%)	(%)	12,21	12,21	41,48	30,45	24,86
3.9	Rasio Rumah Layak Huni	(%)	25,86	23,33	23,52	27,73	22,01
3.10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	HA	6,856	6,909	6,909	6,909	6.945
3.11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	KM	737,935	737,935	737,935	738,992	738,992
3.12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	-	24,51	25,04	23,319	25,95
3.13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	(%)	-	4,40	-	-	39,63
3.14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	Desa	3	3	3	6	6
3.15	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	Desa	3	3	3	6	6
3.16	Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	(%)	-	12,42	15	15	50
4	Perumahan dan Pemukiman						
4.1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	jiwa	3.721	14.844	14.844	25.464	16.044
4.2	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	(%)	39	39	36	38	21,99
4.3	Rumah Layak Huni (unit)	Unit	35.267	26.241	26.456	26.698	26.949
4.4	Persentase Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni	(%)	-	23,33	-	-	19,68
4.5	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	(%)	0,59	0,81	1,09	0	0,014
4.6	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	(%)	0,98	0,98	0,98	0	0,02
4.7	Perserntase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	(%)	-	15	15	0	16,20
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum						



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5.5	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan	1	2	2	-	1
5.6	Kegiatan Pembinaan politik daerah	kegiatan	2	1	3	-	2
5.8	Persentase penyelesaian tindak pidana	%	79,50	93,00	88,00	89	89
5.10	Jumlah tindak pidana		164	94	68	69	69
6	Sosial						
6.2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)			6,02	6,02	63,99
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	(%)			0,86	0,86	19,52
B	Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar						
1	Ketenagakerjaan						
1.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	77,44	74,87	75,76	72,29	71,22
1.2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	2,70	1,17	2,19	1,98	2,49
1.3	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	1.372	1.390	1.436	1.390	176
1.4	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	(%)	98,70	98,92	99,50	98,92	99,13
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	(%)			3,43	3,43	56,72
2.2	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	(%)			1,6	1,3	6,98
2.3	Rasio KDRT	kasus	2	1	1	1	1
3	Ketahanan Pangan						
3.1	Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)		1	1	1	1	1
4	Pertanahan						
4.3	Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	%		57,14	100	75	83
5	Lingkungan Hidup						
5.1	Jumlah duta lingkungan (orang)	orang	2	2	2	2	0
5.2	Jumlah adiwiyata (sekolah)	sekolah	5	5	10	10	2
5.3	Pencemaran status mutu air	(%)	52	50	49,17	46,67	46,67
5.4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	(%)	58	100	100	79	160
5.5	Penegakan Hukum Lingkungan	(%)	100	100	100	100	0
5.6	Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah	(%)		100	100	73,3	82



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
5.7	Persentase Standar Baku Mutu Udara	(%)	76,79	88,61	82,84	88,99	89,45
6 Kependudukan dan Catatan Sipil							
6.1	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	41/1000	44/1000	48/1000	-	-
6.2	Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6.3	Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	(%)	11,42	12,5	13,18	14,24	14,24
6.4	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	(%)	61,05	60,02	59,03	63,04	63,04
6.5	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	(%)	62,75	65,45	72,62	79,45	79,45
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	desa/kel	0	114	114	114	114
7.2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel	48	72	24	72	64
7.3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	kali	1	1	1	1	0
7.4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	jiwa	325	373	0	373	0
7.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel	8	5	0	4	0
7.6	PKK aktif	%	85	85	100	100	100
7.7	Posyandu aktif	%	85	100	100	89	96
7.8	Desa sangat tertinggal		NA	19	18	20	8
7.9	Desa tertinggal		NA	77	76	36	41
7.10	Desa berkembang		NA	18	20	56	48
7.11	Desa maju		NA	0	0	2	17
8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
8.1	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	(%)	2,73	2,3	2,25	2,73	2,57
8.2	Rasio Akseptor KB (orang)	orang	80,24	99,43	81,84	76,23	77,37
8.3	Cakupan Peserta KB Aktif (Orang)	orang	14.594	17.595	12.640	18.129	74,21
8.4	Jumlah PLKB Aktif (orang)	orang	13	19	18	18	17
8.6	tersedianya alokon KB di Klinik (buah)	buah	60	85	90	90	90
8.7	Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	unit	5	26	28	28	28
8.8	Keluarga Pra Sejahtera I	(%)	16,5			-	-
8.9	Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	kelompok	135	43	61	49	49
8.10	Jumlah kelompok tribina (kelompok)	kelompok	67	55	60	60	68



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
8.11	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	orang	2119	1964	1887	1932	1932
8.13	Jumlah KDRT (orang)	orang	2	-	8	5	5
8.14	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (kasus)	kasus	-	-	14	13	13
8.15	Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	kasus	9	-	19	15	15
8.17	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	unit	68	134	68	68	68
8.18	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	buku	0	0	0	0	0
8.19	Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	kelompok	2	1	0	2	2
9 Perhubungan							
9.1	Jumlah Bandara (buah)	buah	1	1	1	1	1
9.2	Jumlah penumpang / barang melalui bandara						
9.2.1	- jumlah penumpang (orang)	orang	-	93	16	0	0
9.2.2	- jumlah barang (kg)	KG	-	459	0	0	0
9.3	Jumlah Dermaga Sungai (buah)	buah	0	0	0	0	0
9.5	Lama waktu pelaksanaan Uji KIR Mobil	menit	45	30	30	30	30
9.6	Jumlah uji KIR angkutan umum	buah	518	605	637	726	399
9.7	Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	buah	61	71	74	133	39
9.8	Pemasangan rambu-rambu	%	38	38	43	100	100
10 Komunikasi dan Informatika							
10.1	Website milik pemerintah daerah (buah)	buah	23	33	34	34	33
10.2	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)	unit	47	54	54	54	68
10.3	Jumlah Radio/TV lokal	unit	1	1	1	1	1
10.5	Jumlah Kantor Pos (Unit)	unit	6	6	6	6	6
10.6	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)	lokasi	5	2	3	2	3
10.7	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel	unit	6	9	9	9	9
10.8	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	unit	7	7	7	7	7
10.9	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan	unit	14	14	14	14	14
10.10	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI)	unit	3	1	1	2	2
10.11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)	unit	624	624	624	624	624



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
10.13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	kelompok	24	24	24	24	2
10.14	Jumlah Forum Komunitas Forum Komunitas Media Tradisional	forum	2	2	2	2	0
10.15	Jumlah Badan Publik PPID	badan	10	-	-	-	-
10.16	Pameran / expo	pameran	1	1	1	1	0
10.17	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)	(%)	79,78	85,8	80	86	89
10.18	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal	unit	1	14	14	14	14
10.19	Media Luar Ruang (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan	unit	15	17	15	17	17
10.20	Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	(%)		49,16%	49,16	49,16	52
11 Koperasi dan UMKM							
11.1	Koperasi Aktif (%)	(%)	50	52	52	52	87,9
11.2	Jumlah UMKM	unit	2.930	2.943	2.987	2.943	2.943
11.3	Jumlah Industri	industri		234	234	257	257
11.4	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	desa/kecamatan	-	10	12	3	3
11.5	Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkatkan	(%)	25	14,1	14,7	27	7,79
11.6	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkatkan	(%)		61,18	63,40	63,40	53,54
12 Penanaman Modal							
12.1	Jumlah Investor PMDN dan PMA	investor	120	42	40	40	46
12.2	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	(%)	75	80	100	100	85
12.3	Lamanya hari proses perizinan	hari	10	10	10	10	8
12.4	Indeks Kepuasan Masyarakat	(%)	70,25	79,06	79,06	79,06	80,30
12.5	Persentase penyelesaian penanganan pengaduan	(%)	100	100	100	100	100
12.6	Nilai Investasi Daerah	Triliun Rp	n/a	3,8	3,6	4,0	10
13 Pemuda dan Olahraga							
13.1	Jumlah Klub Olahraga (buah)	buah	0	1	1	1	1
13.2	Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	unit	0	1	1	1	1
13.3	Jumlah Organisasi Pemuda	buah	86	86	86	86	86
13.4	Jumlah Organisasi Olahraga	buah	1	1	1	1	1
13.5	Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	unit	0	1	1	1	1



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
13.6	Jumlah Lapangan Olahraga	buah	341		234	211	211
13.8	Jumlah Mendali	buah		48	60	94	94
14	Statistik						
14.1	Buku "Gunung Mas dalam Angka"	buah	1 Buku				
14.2	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	buah	1 Buku				
15	Kebudayaan						
15.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	kali	1	1	1	1	0
15.2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	buah	1	1	1	1	0
15.3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	buah	12	25	25	26	29
15.4	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	buah	26	26	26	26	34
15.5	Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	unit	1	1	1	1	1
16	Perpustakaan						
16.1	Jumlah perpustakaan daerah	buah	1	1	1	1	1
16.1.1	Jumlah Perpustakaan umum	buah	40	40	40	40	40
16.1.2	Jumlah perpustakaan sekolah :						
16.1.2.1	- . SD/MI	buah	166	166	166	166	101
16.1.2.2	- . SMP/MTs	buah	56	56	56	56	48
16.1.2.3	- . SMA/MA	buah	13	13	13	13	13
16.1.3	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	buah	49	50	50	50	50
16.2	Jumlah anggota	buah	1.203	1.478	1.618	1.478	1.770
16.3	Jumah pengunjung	buah	3.040	4.028	2.949	4.028	3.548
16.4	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	buah	24.015	30.130	30.130	30.130	30.324
17	Kearsipan						
17.1	Pengelolaan arsip secara baku :						
17.1.1	a. Umum	buah	86	98	109	98	98
17.1.2	b. Pemerintahan	buah	55	100	117	100	100
17.1.3	c. Politik	buah	25	60	85	60	60
17.1.4	d. Keamanan dan ketertiban	buah	37	60	68	60	60
17.1.5	e. Kesejahteraan rakyat	buah	45	50	89	50	50
17.1.6	f. Perekonomian	buah	51	73	76	73	73
17.1.7	g. Pekerjaan umum	buah	62	86	92	86	86
17.1.8	h. Pengawasan	buah	36	89	80	89	89
17.1.9	i. Kepegawaian	buah	76	92	97	92	92



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
17.1.1.1 0	j. Keuangan	buah	80	120	160	120	120
C	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
1	Pariwisata						
1.1	Kunjungan Wisata	jiwa	6.256	2.324	1.631	1.883	8.180
1.2	Jumlah objek wisata daerah	buah	25	26	27	27	17
1.3	PDRB Sektor Pariwisata	(%)	0,31	0,31	0,32	0,32	1,32
2	Pertanian						
2.1	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(%)	32,31	31,64	29,70	28,83	28,83
2.2	Luas Tanam Tanaman Pangan						
2.2.1	Padi sawah (Ha)	HA		840			
2.2.2	Padi ladang (Ha)	HA		651			
2.2.3	Jagung (Ha)	HA		26,79			
2.3	Luas Panen Tanaman Pangan						
2.3.1	Padi sawah (Ha)	HA		956,2	423		
2.3.2	Padi ladang (Ha)	HA		796,5	641		
2.3.3	Jagung (Ha)	HA		35,5	13		
2.4	Produktivitas Tanaman Pangan						
2.4.1	Padi sawah (Kwintal/Ha)	Kw/Ha		22,54	18,58		
2.4.2	Padi ladang (Kwintal/Ha)	Kw/Ha		19,44	24,7		
2.4.3	Jagung (Ton/Ha)	Ton/Ha		26,79	83,24		
2.5	Produksi Tanaman Pangan						
2.5.1	Padi sawah (Ton)	Ton	2.133	1.893	786		
2.5.2	Padi ladang (Ton)	Ton	4.395	1.266	1.583		
2.5.3	Jagung (Ton)	Ton	150	28	104		
2.6	Populasi Ternak						
2.6.1	Kerbau (ekor)	ekor	152	165	184	218	218
2.6.2	Sapi (ekor)	ekor	4.100	4.330	4.560	4.685	4.685
2.6.3	Babi (ekor)	ekor	30.876	31.954	32.363	37.584	37.584
2.6.4	Ayam buras (ekor)	ekor	78.751	80.015	80.867	82.756	82.756
2.6.5	Ayam ras pedaging (ekor)	ekor	88.640	89.545	90.103	96.652	96.652
2.7	Produksi Ternak						
2.7.1	Kerbau (Ton)	Ton	5,75	5,37	4,5	5	5
2.7.2	Sapi (Ton)	Ton	88,79	91,5	91,8	93,3	93,3
2.7.3	Babi (Ton)	Ton	226,13	233,22	230,8	243	243
2.7.4	Ayam buras (Ton)	Ton	27,02	39,66	43,2	46,5	46,5
2.7.5	Ayam ras pedaging (Ton)	Ton	395,81	405,42	400,8	412	412
2.8	Produksi Telur						
2.8.1	Ayam buras (Ton)	Ton	41,04	42,76	30,1	29,8	29,8
2.9	Pengembangan/ perluasan area perkebunan						
2.9.1	Karet (Ha)	HA	118.772	68.367	68.372	68.372	68.372



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
2.9.2	Kelapa Sawit (Ha)	HA	127.623	72.760	72.760	72.760	72.760
2.10	Produksi Komoditi Perkebunan						
2.10.1	Karet (Ton)	Ton	20.405	20.382	20.285	20.273	20.273
2.10.2	Kelapa Sawit (Tbs) Ton	Ton	35.381	99.299	99.249	100.347	100.347
2.11	Produktivitas Komoditi Perkebunan						
2.11.1	Karet (ton/ha)	ton/ha	0,17	0,30	0,30	0,29	0,29
2.11.2	Kelapa Sawit	ton/ha	0,27	1,36	1,36	1,38	1,38
3	Kehutanan						
3.6	Pembangunan TAHURA	unit	0	0	0	1	1
3.7	Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	unit	0	0	0	0	0
3.8	Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	unit	1	1	1	1	0
3.9	Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya	HA	0	12	14	16	16
4	Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.4	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	(%)	63,68	64,77	45,51	74,43	74,43
4.5	Jumlah Desa berlistrik	Desa	91	97	97	108	108
5	Perdagangan						
5.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	(%)	9,08	9,29	9,97	10,02	10,01
6	Perindustrian						
6.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	(%)	9,04	8,85	9,05	8,80	8,73
6.3	Pertumbuhan Industri (jumlah)	unit	46	35	44	14	15
6.4	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	buah	269	304	348	362	377
7	Kelautan dan Perikanan						
7.1	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	3.363,06	3.701,82	4.311.35	5.200,63	3.981
7.2	Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton)	Ton	351,4	260,6	286,5	NA	33,90
7.3	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	Kg	37	39	40	41	33,90
7.4	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	Ribek	240	207,88	330.000	165.757	212.327
7.5	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	Ton	103,97	27,84	28,94	30,10	30,41
8	Transmigrasi						



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
8.1	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	(%)	86,71	95,6	97,5	93,22	94,35
9	Penanggulangan Bencana						
9.1	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	5	8	9	4	3
9.2	Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	jam	10	3	2	2	2
9.3	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	(%)	12	100	100	100	100
D	Urusan Penunjang						
1	Perencanaan Pembangunan						
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD	(%)	100	100	100	100	100
1.6	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	(%)	100	100	100	100	96,29
2	Keuangan						
2.1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Reformasi Birokrasi						
3.4	Level Kapabilitas		-	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
3.5	Level Maturitas		-	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
C	Aspek Daya Saing Daerah						
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.023.407,00	1.181.810,00	1.224.307,00	1.353.548,00	1.353.548,00
1.3	Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp	437.497,00	461.081,00	591.814,00	636.007,00	636.007,00
2	Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur						
2.2	Luas wilayah produktif	HA	123.243	123.808	123.808	123.808	123.808
3	Fokus Iklim berinvestasi						
3.3	lama proses perijinan	hari	10	10	10	10	8
4	Fokus Sumber Daya Manusia						
4.2	Rasio ketergantungan	(%)	53,34	52,12	51,58	45,84	45,84



B. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gunung Mas disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.19
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2017 – 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Capaian			
			2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	SD/MI/ SMP/MTs	105,14	105,14	105,14	105,14
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	SD/MI/ SMP/MTs	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	PAUD				

Tabel 2.20
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2017 – 2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian			
			2017	2018	2019	2020
URUSAN KESEHATAN						
1	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen	90,0	90,12	90,0	84,06
2	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	86,72	85,57	86,72	30
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	93,78	97,93	93,78	91,93
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	82,72	84,64	82,72	74,21
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	92,31	92,89	92,31	77,66
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	54,04	4,49	54,04	30,49
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	31,88	24,32	31,88	78,59



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Capaian			
			2017	2018	2019	2020
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	6,73	27,79	6,73	46,06
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	3,40	19,92	3,40	238,89
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	100	100,89	100	125,56
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	100	64,43	100	78,53
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	101,4	28,36	101,4	52,55

**Tabel 2.21
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase (%)	14,38%	25,85%	30	65
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase (%)	21,65%	25,85%	18	12
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase (%)	22,25%	23,75%	4	4
4	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Presentase (%)	35,85%	44,95%	60,7	68,45



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase (%)	25,65%	85,50%	0,2	0,2

**Tabel 2.22
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase	40%	40%	40%	56,49
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	39%	39%	39%	21,99
3	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase	60%	60%	60%	0
4	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase	0	0	0	0

**Tabel 2.23
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
TRANTIBUMLINMAS**

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persentase	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100	100	100	100



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persentase	100	100	100	100



Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen dengan muatan tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Oleh karenanya, upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang.

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pembangunan manusia (human development), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (social economic development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.



Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan (cross cutting), terdapat 204 indikator TPB yang relevan terhadap Kabupaten Gunung Mas. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda - beda. Setiap capaian tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Capaian TPB Kabupaten Gunung Mas

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Telah mencapai target	Belum mencapai target	Perlu pendataan	Perlu peningkatan	Perlu penurunan	Tidak ada/data (N/A)
1	Tanpa Kemiskinan	26	3	5	1	4	2	11
2	Tanpa Kelaparan	11	5	4	1	0	0	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	37	6	8	0	2	1	20
4	Pendidikan Berkualitas	13	3	5	0	4	1	0
5	Kesetaraan Gender	13	3	1	0	0	0	9
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	0	2	0	0	0	10
7	Menjamin Akses Energi	4	0	0	0	0	0	4
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	15	1	0	1	0	0	13
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	7	1	2	0	0	0	4
10	Mengurangi Kesenjangan	11	0	1	0	0	0	10
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11	3	4	0	1	1	2
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	0	0	0	1	0	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	0	1	2	0	0	0
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	3	0	0	0	0	0	3
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	21	0	3	0	0	0	18



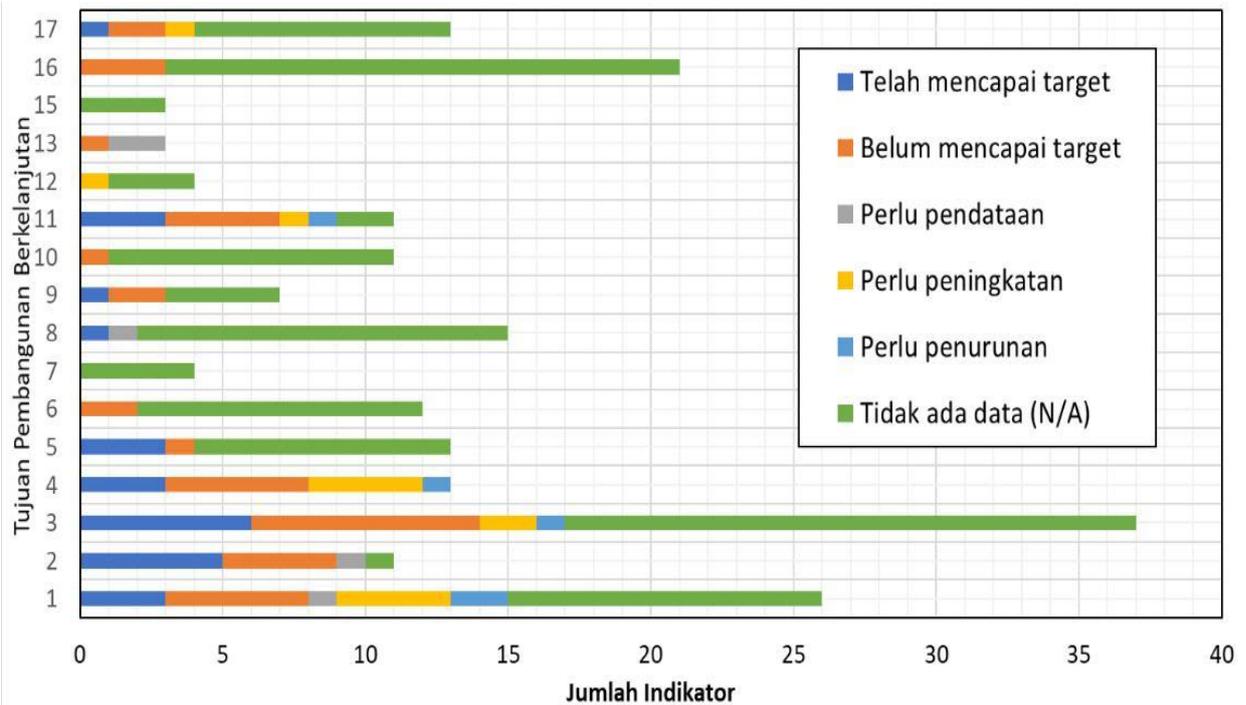
**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Jumlah Indikator	Telah mencapai target	Belum mencapai target	Perlu pendataan	Perlu peningkatan	Perlu penurunan	Tidak ada/data (N/A)
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	13	1	2	0	1	0	9
Total		204	26	38	5	13	5	117

Sumber: Hasil analisis, 2019

Indikator TPB Kabupaten Gunung Mas yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 03 (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) dengan jumlah 37 indikator. Pencapaian target nasional paling banyak kedua dan ketiga ada pada tujuan TPB 02 dan TPB 01 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) dengan jumlah 11 dan 26 indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui gapnya dengan jumlah terbanyak juga terdapat di TPB 03. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbagi atas indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target serta indikator TPB sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, jumlah indikator pada masing- masing TPB berdasarkan pembagian tersebut ditunjukkan pada Lampiran H.

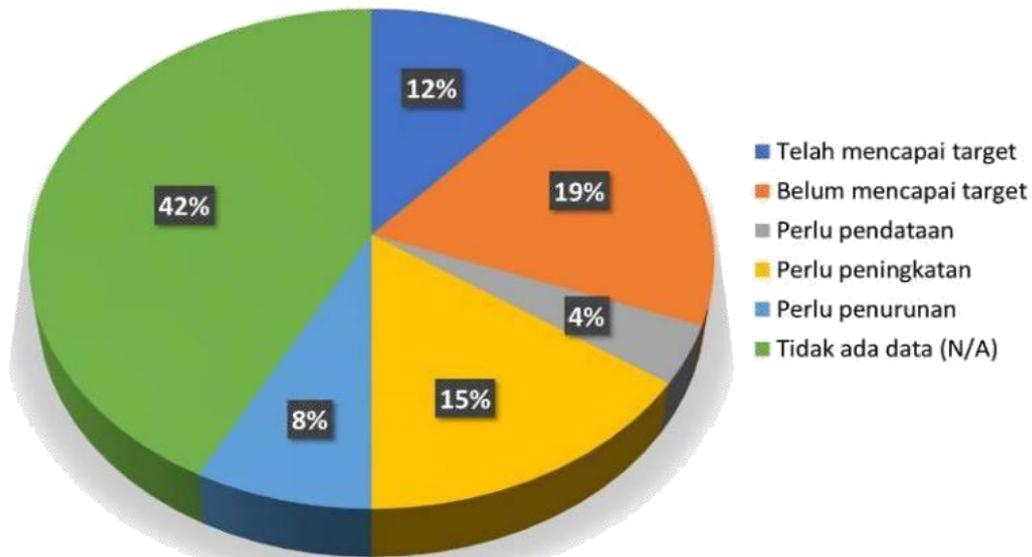
Indikator TPB yang perlu dilakukan penurunan dengan jumlah terbanyak, yaitu pada TPB 01. Indikator yang memiliki kriteria perlu pendataan terbanyak ada pada TPB 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya). Disisi lain, terdapat indikator TPB yang hanya memiliki kriteria belum diketahui nilai gap (N/A), yakni TPB 07 (Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua) dan TPB 15 (Ekosistem darat). Total pencapaian indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada Gambar berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar 2.21 Capaian indikator TPB Kabupaten Gunung Mas

Persentase berdasarkan enam kriteria indikator TPB tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.3, dengan persentase terbesar yaitu 42% yang dimiliki oleh kriteria indikator yang belum diketahui nilai gapnya (N/A). Adapun persentase terbesar kedua diikuti oleh kriteria indikator belum mencapai target dengan nilai 19%. Kriteria telah mencapai target hanya mencapai nilai 12%.

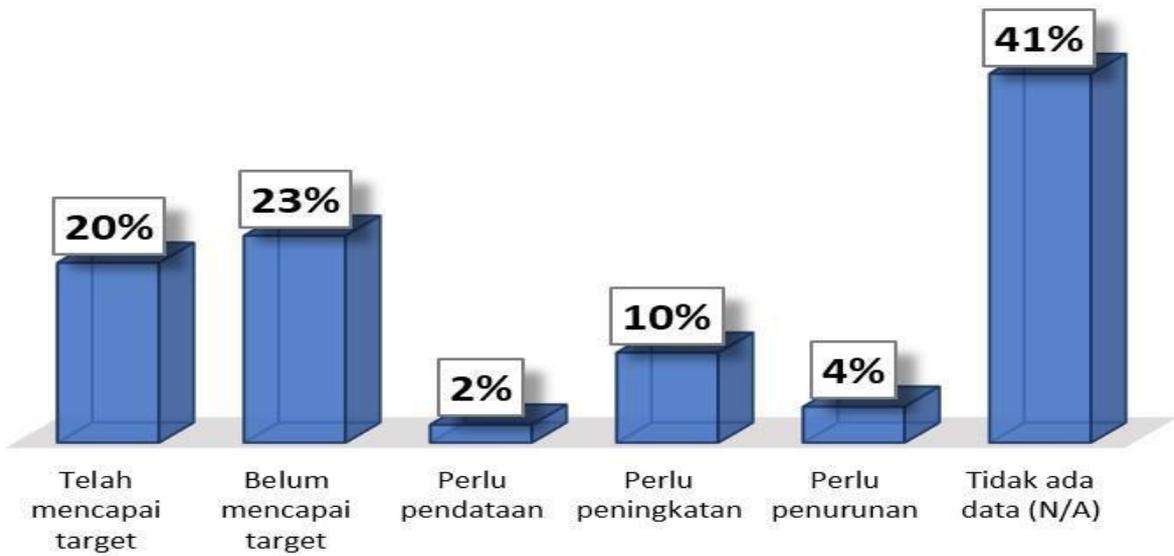


(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

Gambar 2.22 Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas

1. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 100 indikator. Persentase capaian indikator pilar sosial disajikan pada Gambar 3.4. Dari total 100 indikator, terdapat 20 indikator telah mencapai target, 23 indikator belum mencapai target, 2 indikator perlu pendataan, 10 indikator perlu peningkatan, 4 indikator perlu penurunan, dan 41 indikator tidak ada data.

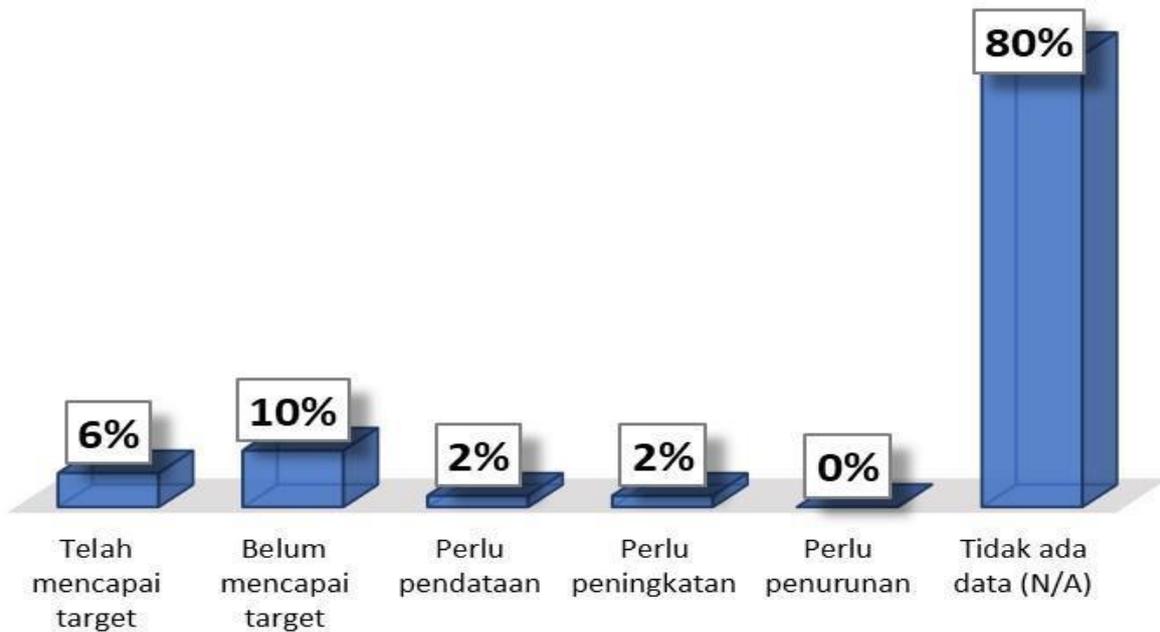


(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

Gambar 2.23 Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar sosial

2. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi adalah sebanyak 40 indikator. Persentase capaian indikator pilar ekonomi. Dari total 40 indikator, terdapat 3 indikator yang telah mencapai target, 5 indikator belum mencapai target, 1 indikator perlu pendataan, 1 indikator perlu peningkatan, dan 40 indikator tidak ada data.

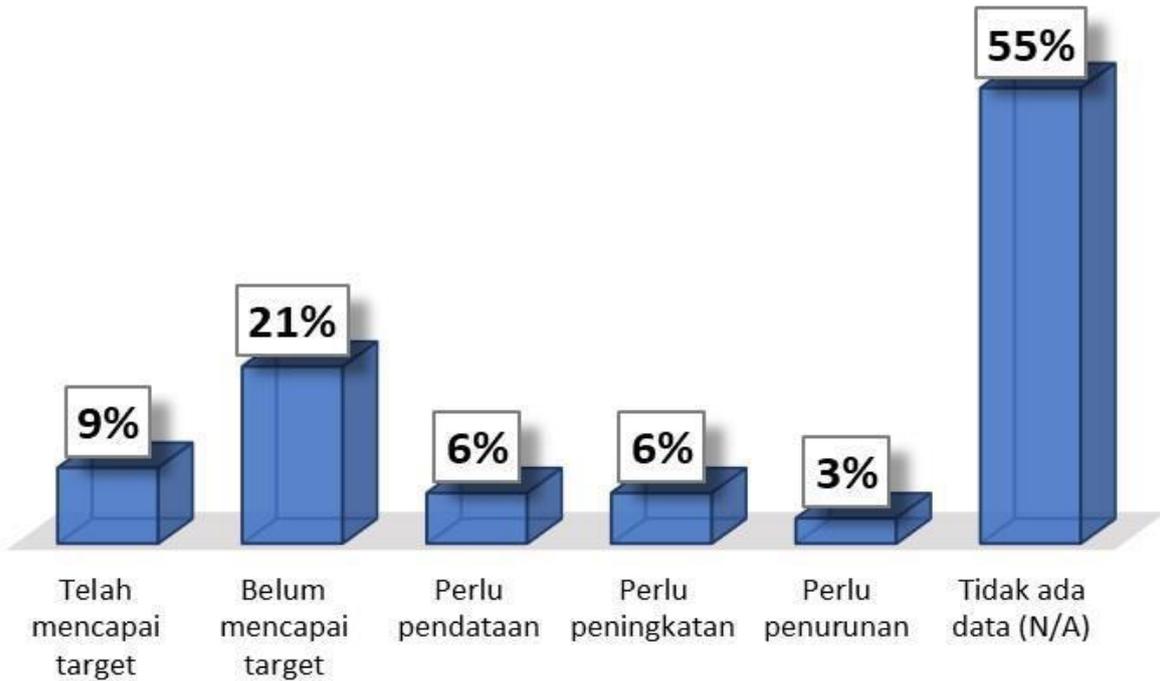


Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar 2.24 Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar ekonomi

3. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 33 indikator. Persentase capaian indikator pilar lingkungan disajikan pada Gambar 3.6. Dari total 33 indikator, terdapat 3 indikator telah mencapai target, 7 indikator belum mencapai target, 2 indikator perlu pendataan, 2 indikator perlu peningkatan, 1 perlu penurunan dan 18 indikator tidak ada data.

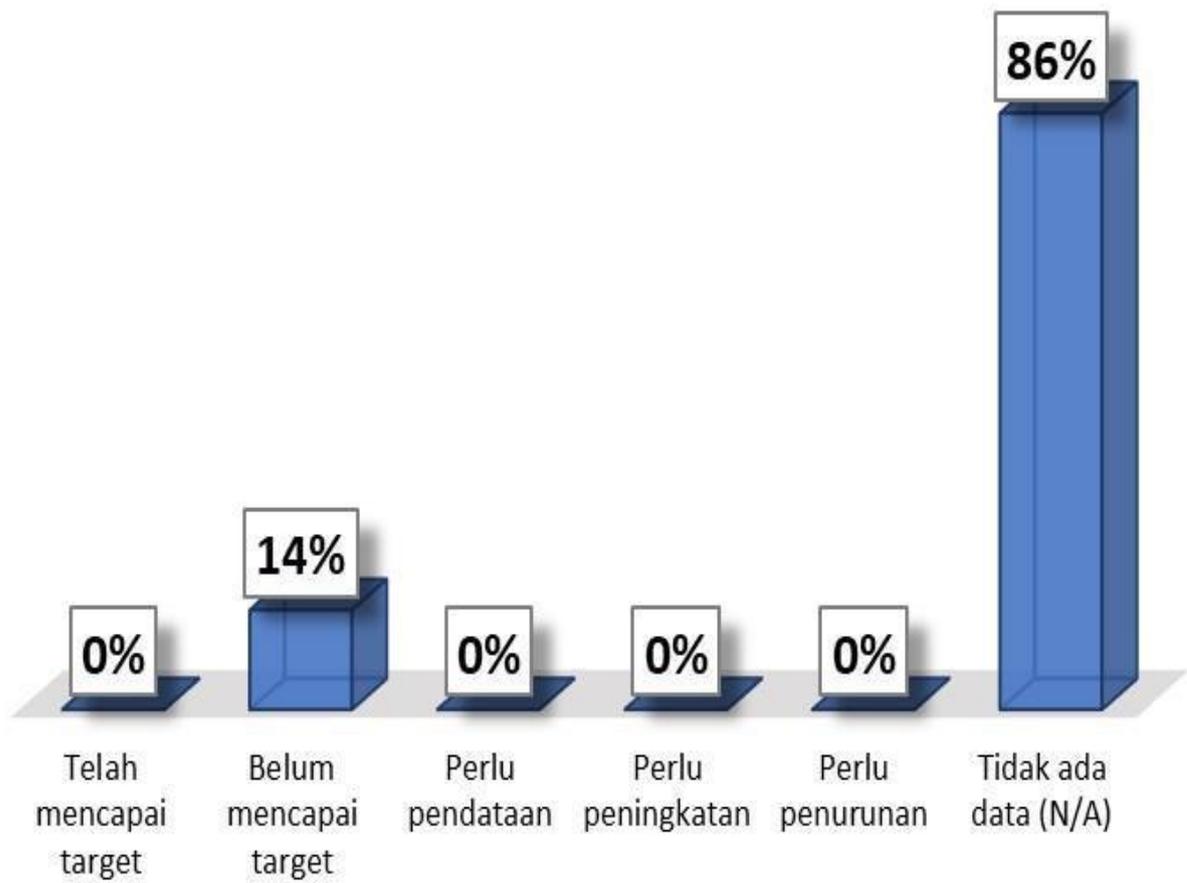


Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 2.25 Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar lingkungan hidup

4. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola pemerintahan mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16. Total untuk pilar lingkungan adalah sebanyak 21 indikator. Persentase capaian indikator pilar lingkungan disajikan pada Gambar 3.7. Dari total 21 indikator, belum terdapat indikator yang mencapai target, sebanyak 3 indikator belum mencapai target dan 18 indikator tidak ada data.



Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar 2.26 Persentase status ketercapaian TPB Kabupaten Gunung Mas dalam pilar hukum dan tata kelola pemerintahan



- BAB III -

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Gunung Mas periode tahun 2016-2019, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. 1
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2020 (Jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2016	36.835	1.028.229	4%
2	2017	36.613	1.060.434	3%
3	2018	38.613	1.170.839	3%
4	2019	77.462	1.065.544	7%
5	2020	66.176	990.807	6%
	Rata-Rata	51.140	1.063.171	5%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Gunung Mas rata-rata tiga tahun terakhir adalah 5 persen. Hal ini mengindikasikan belum mandirinya pembiayaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Apabila terjadi gejolak terhadap perekonomian nasional secara langsung akan berpengaruh pada kondisi keuangan Kabupaten Gunung Mas, karena lebih dari 50 persen pendapatan Kabupaten Gunung Mas masih tergantung dari dana perimbangan.

Pada bagian kinerja keuangan masa lalu menggambarkan kinerja masa lalu tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1) Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- (3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel 3. 2
Kinerja Keuangan Daerah (Realisasi Pendapatan Daerah)
Kabupaten Gunung Mas 2016-2019 (dalam jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
	Pendapatan Daerah	993.435	1.102.561	1.170.839	1 042 153	990.807	6%
1.	Pendapatan Asli Daerah	36.835	38.614	38.614	77.264	66.176	2%
1.1	Pajak Daerah	6.253	5.834	5.803	23.896	31.303	-2%
1.2	Retribusi Daerah	3.008	2.493	2.326	2.394	3.852	-8%
1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.526	6.034	6.434	7.324	7.738	5%
1.4	Lain-lain PAD yang sah	22.048	24.253	24.051	24.982	23.281	3%
2	Dana Perimbangan	862.435	924.493	984.862	794.333	729.036	5%
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	92.792	104.776	99.391	794.334	65.960	2%
2.2	DAU	564.028	559.899	600.000	575.944	518.031	2%
2.3	DAK	139.710	178.565	197.616	147.350	145.045	12%
2.4	DAK non Fisik	65.905	81.253	87.855	-	-	10%
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	94.165	139.454	147.363	130.129	195.594	16%
3.1	Pendapatan hibah	-	19.291	18.675	27.674	27.674	-2%
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	22.731	29.515	22.731	102.540	25.993	0%
3.3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	17.250	-	39.387	-
3.4	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	1.500	-	-	-
3.5	Penerimaan dana desa	71.434	90.648	87.207	-	102.539	7%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Berdasarkan pada tabel di atas dapat di jelaskan bahwa rata-rata pendapatan Kabupaten Gunung Mas terjadi peningkatan 4 persen dari tahun 2016-2019. Kontribusi pendapatan Kabupaten Gunung Mas masih didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat sekitar 80 persen. Perlunya kerja keras oleh semua pihak untuk menggali potensi pendapatan asli daerah agar *gap* pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan tidak semakin membesar.

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan. Urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran;
- b. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- c. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan
- d. Analisis proyeksi belanja daerah.

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2016– 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel 3. 3
Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah (dalam jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	514.863	544.415	544.719	551.681	521.533	1,9%
1	Belanja Pegawai	356.784	359.654	355.028	370.058	348.163	-0,2%
2	Belanja Hibah	17.520	25.588	29.474	12.611	7.967	18,9%
3	Belanja Bantuan Sosial	766	582	1.596	1.302	2.670	27,7%
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	139.363	158.091	158.121	166.651	140.809	4,3%
5	Belanja Tidak Terduga	430	500	500	432	21.923	5,2%
II	BELANJA LANGSUNG	518.064	594.847	630.220	437.257	382.678	6,8%
1	Belanja Pegawai	36.923	43.659	53.107	64.757	69.274	12,9%
2	Belanja Barang dan Jasa	179.279	216.011	211.975	201.867	143.159	5,7%
3	Belanja Modal	301.862	335.177	365.138	170.632	170.244	6,5%
III	TOTAL BELANJA	1.032.927	1.139.262	1.174.939	989.938,20	904.211	4,4%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2019 sebesar 4,4 persen, selalu terjadi peningkatan belanja tiap tahun dari tahun 2016 sampai 2019. Persentase belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja relatif berimbang. Tetapi tiap tahun cenderung belanja langsung meningkat sedikit demi sedikit persentasenya terhadap total belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa keperpihakan pemerintah terhadap pembangunan daerah cukup tinggi.

Persentase belanja pegawai terhadap total belanja rata-rata tahun 2016-2019 sekitar 30 persen. Tetapi tiap tahun persentase belanja pegawai terhadap total belanja menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja di Kabupaten Gunung Mas cukup baik. Keperpihakan pemerintah terhadap masyarakat cukup tinggi dalam hal pembangunan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana belanja daerah dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis belanja dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; serta
- c. Analisis proyeksi belanja daerah.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan seperti honorarium tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya.

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel 3.4
Realisasi Pengeluaran Belanja Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2019 (dalam jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	514.863	544.415	544.719	551.681	521.534	1,9%
1	Belanja Pegawai	356.784	359.654	355.028	370.058	348.163	-0,2%
2	Belanja Hibah	17.520	25.588	29.474	12.611	7.967	18,9%
3	Belanja Bantuan Sosial	766	582	1.596	1.302	2.670	27,7%
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	139.363	158.091	158.121	166.651	140.810	4,3%
5	Belanja Tidak Terduga	430	500	500	432	21.923	5,2%
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.912	6.050	6.050	1.500	11.548	-45,8%
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	37.912	6.050	6.050	1.500	11.548	-45,8%
III	TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT	552.775	550.465	550.769	553.181	533.082	-0,1%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Belanja wajib dan mengikat merupakan belanja yang penganggarnya di utamakan sebelum dialokasikan ke lainnya, karena menyangkut penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Rata-rata belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2019 mengalami penurunan sebesar 0,1 persen. Keperpihakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas lebih pada pengalokasikan belanja langsung kepada masyarakat.

3.2.1 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran pada tabel berikut:

Adapun penutup defisit riil anggaran Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel 3.5
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016-2019 (dalam jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
	PEMBIAYAAN DAERAH	115.316	48.800	16.200	11.091	48.325	-48%
1.	Penerimaan Pembiayaan	77.404	42.750	10.150	9.591	37.361	-49%
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	77.254	42.600	10.000	9.591	37.360	-49%
1.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	150	150	150	0	1	0%
2	Pengeluaran Pembiayaan	37.912	6.050	6.050	1.500	10.964	-46%
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah	37.912	6.050	6.050	1.500	10.964	-46%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan. SiLPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya.

Rata-rata pembiayaan daerah di Kabupaten Gunung Mas tahun 2016-2019 mengalami penurunan sebesar **46 persen**. Penerimaan pembiayaan dari segi silpa bisa berdampak positif dan negatif. Apabila silpa berasal dari penghematan pembiayaan terjadi efisiensi penggunaan anggaran, tetapi apabila silpa berasal dari tidak terserapnya/tidak di jalankannya program dan kegiatan mengindikasikan terjadinya kegagalan perencanaan penganggaran pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan. Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat.

1. Proyeksi Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel 3.6
Pembiayaan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020 masih berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58
Tahun 2005
(dalam jutaan)

No	Uraian	2020
	Pendapatan Daerah	974.374,4
1.	Pendapatan Asli Daerah	45.865,9
1.1	Pajak Daerah	13.644,5
1.2	Retribusi Daerah	3.222,4
1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	7.524,0
1.4	Lain-lain PAD yang sah	21.475,0
2	Dana Perimbangan	739.235,2
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	74.065,7
2.2	DAU	520.224,0
2.3	DAK	144.945,5
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	189.273,1
3.1	Pendapatan hibah	20.175,2
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	27,721,9
3.3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	39.387,6
3.4	Pendapatan lainnya	101.988,4
4.	Penerimaan Pembiayaan	37.523,8
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	37.373,8
4.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	150,0
	TOTAL PENERIMAAN PEMBANGUNAN	1.011.898,2



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

**Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2021-2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 (dalam jutaan)**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
4	Pendapatan Daerah	1.027.170,4	1.047.713,8	1.068.668,1	1.090.041,4
4.1	Pendapatan Asli Daerah	64.022,9	65.303,4	66.609,4	67.941,6
4.1.01	Pajak Daerah	28.194,8	28.758,7	29.333,9	29.920,5
4.1.02	Retribusi Daerah	4.830,0	4.926,6	5.025,1	5.125,6
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	9.333,0	9.519,7	9.710,1	9.904,3
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	21.665,0	22.098,3	22.540,3	22.991,1
4.2	Pendapatan Transfer	942.972,2	961.831,6	981.068,3	1.000.689,6
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	913.552,2	931.823,2	950.459,7	969.468,9
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.420,0	30.008,4	30.608,6	31.220,7
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	20.175,2	20.578,7	20.990,3	21.410,1
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.175,2	20.578,7	20.990,3	21.410,1
6	Pembiayaan	29.751,0	30.346,0	30.952,9	31.572,0
6.1	Penerimaan Pembiayaan	29.751,0	30.346,0	30.952,9	31.572,0
4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.701,0	30.295,0	30.900,9	31.518,9
4.2	Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman	50,0	51,0	52,0	53,1
TOTAL PENERIMAAN PEMBANGUNAN		1.056.921,4	1.078.059,8	1.099.621,0	1.121.613,4



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Jika di lihat dari tabel di atas, proyeksi penerimaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Adapun peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh komponen dana perimbangan khususnya dana bagis hasil pajak/bagi hasil bukan pajak serta peningkatan DAU. Adapun peningkatan PAD masih cenderung relatif kecil. Meskipun begitu tiap tahun Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan terus melakukan akselerasi dan terobosan untuk lebih meningkatkan kemandirian fiskal melalui pendayagunaan sumberdaya potensial untuk dapat melampaui target PAD yang ada.

Berdasarkan perhitungan proyeksi tersebut didapat proyeksi penerimaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 hingga 2024 yang berkisar antara RP. 1,078 triliun ditahun 2020 hingga Rp. 1,154 triliun ditahun 2024.

2. Proyeksi Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005
(dalam jutaan)

No	Uraian	2020
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	573.978,1
1	Belanja Pegawai	366.106,9
3	Belanja Hibah	8.750,6
4	Belanja Bantuan Sosial	4.521,0
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	164.250,5
6	Belanja Tidak Terduga	30.348,9
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.548,2
1	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	11.548,2
2	Pembayaran Pokok utang	
III	TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT	585.526,3



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel 3.6
Proyeksi Kerangka Belanja Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024 sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 (dalam jutaan)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
5.1	BELANJA OPERASI	417.678,5	426.032	434.553	443.244
5.1.01	Belanja Pegawai	376.964,5	384.504	392.194	400.038
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.450,8	268.719,8	274.094,2	279.576,1
5.1.05	Belanja Hibah	40.094	41.528	42.359	43.206
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	620	632,40	645,05	657,95
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.677,2	26.190,7	26.714,5	27.248,8
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.820,4	66.116,8	67.439,1	68.787,9
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.682,3	102.695,9	104.749,8	106.844,8
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	663,1	676,4	689,9	703,7
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.075,0	3.137	3.199	3.263
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.075,0	3.137	3.199	3.263
5.4	BELANJA TRANSFER	168.214,6	171.579	175.010	178.511
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.302,4	3.368	3.436	3.505
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.912,2	168.210	171.575	175.006
6	PEMBIAYAAN	12.659,0	12.912	13.170	13.434
6.2.02	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	12.659,0	12.912	13.170	13.434

Tabel 3.7
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024 sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 (dalam jutaan)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
5.1	BELANJA OPERASI	417.678,5	426.032	434.553	443.244
5.1.01	Belanja Pegawai	376.964,5	384.504	392.194	400.038
5.1.05	Belanja Hibah	40.094	41.528	42.359	43.206
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	620	632,40	645,05	657,95
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.075,0	3.137	3.199	3.263
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.075,0	3.137	3.199	3.263
5.4	BELANJA TRANSFER	168.214,6	171.579	175.010	178.511
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.302,4	3.368	3.436	3.505



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.912,2	168.210	171.575	175.006
6	PEMBIAYAAN	12.659,0	12.912	13.170	13.434
6.2.02	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	12.659,0	12.912	13.170	13.434
III	TOTAL BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT	601.627,1	613.660	625.933	638.451

Belanja wajib dan mengikat merupakan pengeluaran pembiayaan yang merupakan salah satu unsur penting yang harus di keluarkan terlebih dahulu sebelum anggaran di distribusikan kepada Perangkat daerah, dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati.

Belanja wajib dan mengikat ini yang paling utama adalah gaji dan tunjangan serta pokok utang pada pihak ketiga. Gaji dan tunjangan dan pokok hutang wajib di prioritaskan paling utama karena penyelenggaraan pemerintah bisa lumpuh jika ada penundanaan gaji dan tunjangan.

Adapun besaran proyeksi belanja wajib dan mengikat Kab. Gunung Mas tahun 2020 hingga tahun 2024 berkisar Rp. 584,977 miliar ditahun 2020 hingga Rp. 633.033 miliar ditahun 2024.

3. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan daerah di perlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan. Hasil perhitungan kapasitas riil Kabupaten Gunung Mas dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

**Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerimaan Pembangunan Daerah	1.011.898,2	1.056.921,4	1.078.059,8	1.099.621,0	1.121.613,4
	Dikurangi :					
2	Belanja Wajib dan Mengikat	585.526,3	601.627	613.660	625.933	638.451
	KAPASITAS RIIL	426.371,9	455.294,3	464.399,8	473.688,0	483.162,4

Dengan kapasitas riil yang tersedia, sebagaimana tabel di atas, maka pendanaan pembangunan dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
2. Prioritas II, digunakan untuk di alokasikan membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Bupati.
3. Prioritas III, digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pembagian anggaran pendanaan untuk program masing-masing prioritas secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9
Alokasi Anggaran Kapasitas Riil
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prioritas I	127.911,6	136.588,3	139.319,9	142.106,4	144.948,7
2	Prioritas II	170.548,8	182.117,7	185.759,9	189.475,2	193.265,0
3	Prioritas III	127.911,6	136.588,3	139.319,9	142.106,4	144.948,7
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	426.371,9	455.294,3	464.399,8	473.688,0	483.162,4



- BAB IV -

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan di awal adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Dalam upaya peningkatan percepatan pencapaian visi pembangunan daerah, maka dirumuskan Perubahan RPJMD Kabupaten Gumus 2019-2024. Perkembangan pembangunan yang sudah berjalan selama tahun 2019-2020 tentu saja menampakkan beberapa permasalahan yang baru dan isu strategis yang lebih update sehingga mampu mengakselerasi setiap capaian program pembangunan yang dijalankan. Untuk lebih meningkatkan kualitas kebijakan yang dirumuskan, berikut permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang telah dikaji dan disusun demi perencanaan pembangunan yang lebih baik.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari

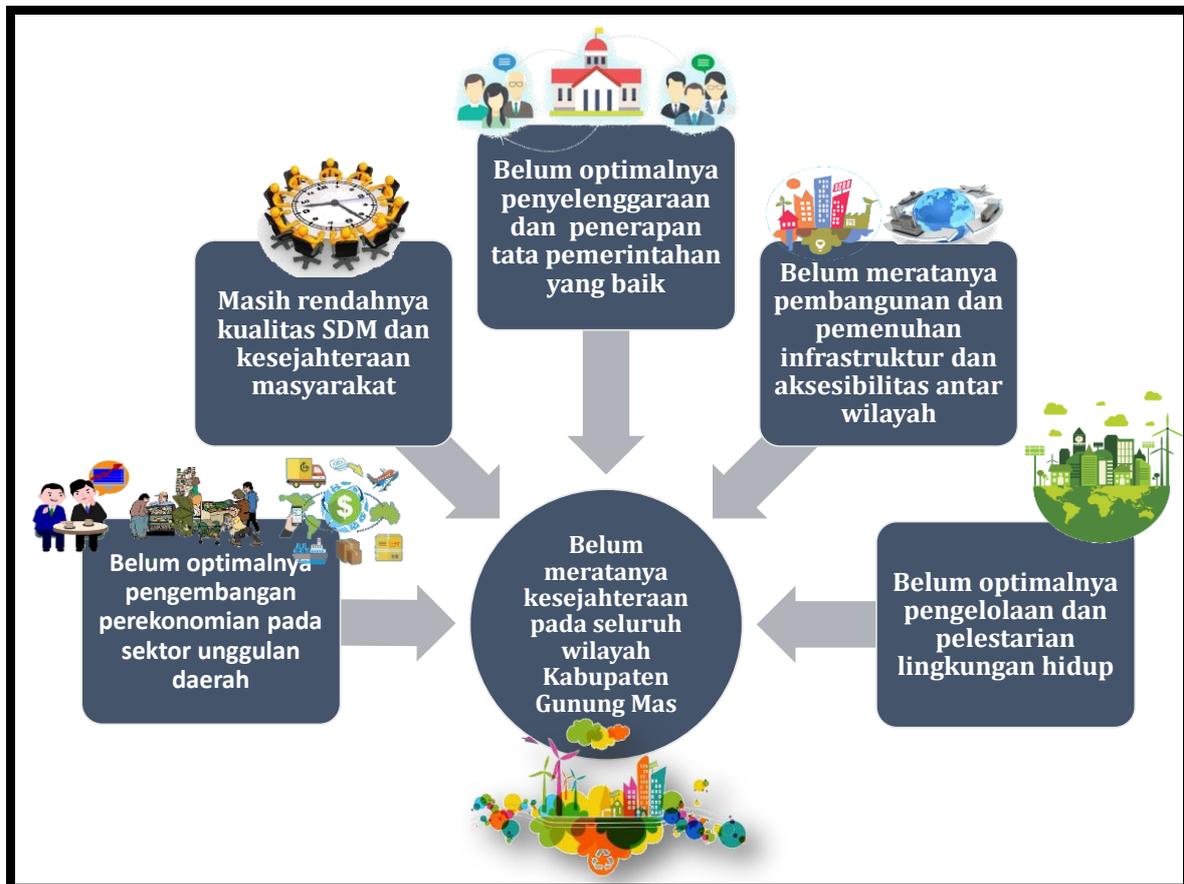


PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan pada tahun pelaksanaan pembangunan 2019-2020 maupun sebelumnya, maka permasalahan utama Kabupaten Gunung Mas adalah **“Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas”**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah;
2. Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata pemerintahan yang baik; dan
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi pengejawantahan dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan permasalahan utama Kabupaten Gunung Mas:



Gambar IV.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah
Kabupaten Gunung Mas

Permasalahan pokok pembangunan daerah pada gambar di atas akan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

1. Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Gunung Mas sedang dalam *on progress* dikerjakan sehingga permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas masih menjadi prioritas pada pembangunan Gunung Mas.

Visi konektivitas nasional adalah terintegrasi secara lokal, terhubung secara global (*locally integrated, globally connected*). Simpul transportasi rantai pasok dapat saling terintegrasi secara efektif dan efisien. Hal ini dapat terkondisikan dengan pemerataan pembangunan berbagai proyek infrastruktur fisik (*physical connectivity*) khususnya konektivitas rantai

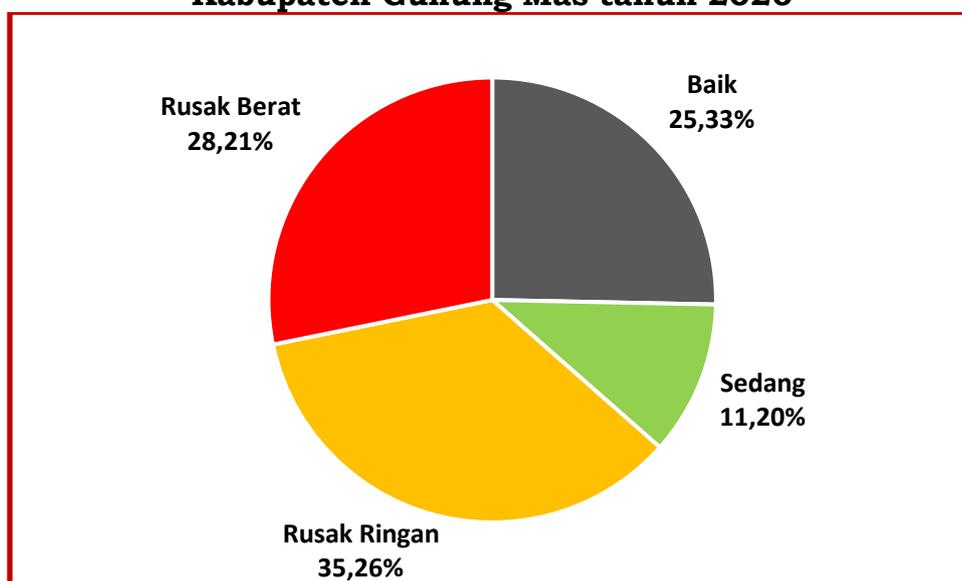


pasok antar wilayah berdasarkan komoditas. Namun kenyataan masih jauh dari harapan dimana infrastruktur dasar masih belum optimal yang mengakibatkan daya saing bangsa menjadi rendah. Diharapkan ke depannya, infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar sektor, komoditas dan wilayah, memperlancar arus pergerakan manusia, barang dan jasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah dapat lebih cepat dilaksanakan jika didukung dengan akses kendaraan yang lancar, nyaman dan tersedia segala kebutuhan dalam pergerakan arus barang dan manusia. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di setiap tahunnya dimana pada tahun 2020 mencapai 3.380 unit, namun hal tersebut masih belum dibarengi dengan peningkatan kualitas jalan sebagai infrastruktur konektivitas wilayah.

Panjang jalan di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020 adalah 738,992 Km. Panjang jalan aspal di Kabupaten Gunung Mas ialah 30,7 persen dari keseluruhan panjang jalan sedangkan jenis permukaan terpanjang merupakan jenis permukaan tanah sebesar 55,3 persen yang notabene belum memiliki kualitas konektivitas wilayahnya. Jika dilihat dari kondisinya pun juga masih memprihatinkan dimana sebagian besar panjang jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 260,55 km (35,26%) dan rusak berat 208,50 km (28,21%).

Gambar IV.2
Panjang jalan menurut kondisi jalan di
Kabupaten Gunung Mas tahun 2020



Sumber: Kab. Gunung Mas dalam angka 2021

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari fasilitas kehidupan sehari-hari yang dimiliki oleh masyarakat Gunung Mas. Salah satu



infrastruktur yang menjadi kebutuhan primer adalah kebutuhan papan atau rumah. Masih rendahnya rasio rumah layak huni di Gunung Mas menjadi perhatian besar bagi pemerintah daerah. Pada tahun 2019, rasio rumah layak huni di Gunung Mas hanya mencapai 23,74 persen dengan pemukiman layak huni seluas 6,91 hektar. Kondisi ini menjadikan kesejahteraan masyarakat Gunung mas harus terus ditingkatkan khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar berkualitas seperti kelistrikan, air minum layak, sanitasi, drainase hingga rumah layak huni yang masih minim capaiannya.

2. Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat

Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Gunung Mas berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Mengurai dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut. Dari masalah utama rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama seperti belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat, belum optimalnya pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun pemerataan ke seluruh wilayah, munculnya Pandemi COVID-19, dan belum optimalnya peran



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

serta perempuan dan perlindungan anak dalam pelaksanaan pembangunan.

Terlihat IPM Kabupaten Gunung Mas yang mencapai 70,81 masih berada di bawah IPM Kalimantan Tengah (71,05) bahkan Nasional (71,94). Dengan angka IPM ini, Gunung Mas berada pada peringkat IPM kelima diantara kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

**Tabel IV.1
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	IPM	RLS	HLS	AHH
1	Kotawaringin Barat	72,87	8,42	12,72	70,59
2	Kotawaringin Timur	71,31	8,13	12,84	69,85
3	Kapuas	69,48	7,59	12,92	68,74
4	Barito Selatan	70,22	8,82	12,55	67,09
5	Barito Utara	70,59	8,71	12,49	71,30
6	Sukamara	68,03	8,01	12,12	71,53
7	Lamandau	70,51	8,42	12,48	69,36
8	Seruyan	67,58	7,94	11,99	69,26
9	Katingan	68,68	8,67	12,67	65,78
10	Pulang Pisau	68,45	8,18	12,41	68,04
11	Gunung Mas	70,81	9,14	11,78	70,40
12	Barito Timur	71,39	9,21	12,83	68,22
13	Murung Raya	67,98	7,54	11,75	69,51
14	Palangka Raya	80,77	11,52	14,95	73,21
Kalimantan Tengah		71,05	8,59	12,66	69,74
Nasional		71,94	8,48	12,98	71,47

Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2021

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah daerah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pada Kabupaten Gunung Mas kualitas pendidikan masih relatif rendah, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam mencapai pendidikan yang berkualitas yang diharapkan akan mencetak SDM daerah yang berdaya saing tinggi. Dengan segala keterbatasan yang ada untuk menempuh pendidikan adalah dikarenakan masih sulitnya aksesibilitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan.

Salah satu rangkaian dalam pelayanan pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata tersedia pada seluruh sekolah. Hal ini



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selain itu kualitas tenaga pendidik dan pendistribusian yang tepat merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajaran pada siswa. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan berada di atas rata-rata lama sekolah Kalimantan Tengah maupun Nasional. Namun lain halnya dengan Harapan Lama Sekolah, dimana Harapan Lama Sekolah Gunung Mas berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, bahkan berada di peringkat 13 diantara kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, Selain itu keterbatasan akses nambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan. Selain itu pendistribusian tenaga medis belum mampu merata pada seluruh lapisan wilayah Kabupaten Gunung Mas, mempengaruhi dalam pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Gunung Mas semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Angka harapan hidup Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020



mencapai 70,40 tahun dimana angka tersebut berada di atas Kalimantan Tengah (69,74 tahun) dan berada di bawah angka Nasional (71,47 tahun). Angka harapan hidup Gunung Mas berada di peringkat kelima di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga secara perbandingan kewilayahan sudah cukup baik, namun jika dilihat dari nilainya, maka masih belum cukup untuk mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas.

Perempuan dan anak tidak jarang menjadi target yang rentan mengalami tindakan yang tidak menyenangkan berbasis gender. Dengan hal ini perlu perhatian pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu pemberdayaan akan kaum perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam mencapai pembangunan daerah. Berdasarkan data yang ada prioritas penduduk pekerja Kabupaten Gunung Mas adalah laki-laki, jika diperbandingkan nilainya mempunyai range yang cukup jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan gender yang relatif cukup kuat. Sehingga perempuan-perempuan Kabupaten Gunung Mas tidak mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang cukup sebagai bekal peningkatan produktivitas diri. Melihat hal ini prioritas pemerintah adalah melakukan penanganan dan pencegahan serta advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberdayaan, terutama pemberdayaan ekonomi perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dan subjek dalam pembangunan nasional konflik kekerasan menjadi saat ini.

3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Gunung Mas dimana concern yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Setiap daerah mempunyai potensi kekhasan dan karakteristik tersendiri terhadap sumber daya lokal daerah. Dengan adanya potensi sumber daya lokal daerah yang dikelola dengan optimal maka akan memberikan dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Kabupaten Gunung Mas dikarenakan adanya keterbatasan dalam mengembangkan dan meningkatkan nilai jual produk unggulan daerah, kemudian kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk lokal daerah.

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya, maka Pandemi COVID-19 ini menjadikan pertumbuhan perekonomian Gunung Mas melambat. Namun perlambatan ini masih memiliki sisi positif mengingat sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan ekonomi negatif).

Perekonomian Gunung Mas masih cukup jauh dari harapan jika dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Tengah. Terlihat kontribusi perekonomian Gunung Mas yang masih minim 4,13 persen menjadikan Gunung Mas peringkat kelima terendah daerah di Kalimantan Tengah yang memiliki kontribusi ekonomi terendah untuk Kalimantan Tengah.

**Tabel IV.2
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	PDRB adhb 2020 (milyar)	Kontribusi PDRB Kab/Kota
1	Kotawaringin Barat	20523,8	13,50
2	Kotawaringin Timur	26957,3	17,74
3	Kapuas	16542,9	10,89
4	Barito Selatan	6276,7	4,13
5	Barito Utara	9391,7	6,18
6	Sukamara	4422,3	2,91
7	Lamandau	5773,8	3,80
8	Seruyan	8768,5	5,77
9	Katingan	8307,2	5,47
10	Pulang Pisau	5590,2	3,68
11	Gunung Mas	6270,2	4,13
12	Barito Timur	7103,4	4,67
13	Murung Raya	7762,1	5,11
14	Palangka Raya	18285,5	12,03
Kalimantan Tengah		151975,6	100,00

Nilai PDRB pada tahun 2020 merupakan nilai yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2020 mencapai 6.270,2 milyar rupiah. Peningkatan PDRB ini tidak sejalan dengan kontribusi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 29,24 persen



pada tahun 2020.

Berdasarkan pernyataan diatas dengan mulai melemahnya sektor pertanian, maka sektor ini membutuhkan perhatian khusus untuk diperbaiki dengan upaya-upaya dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini cukup penting dikarenakan sektor pertanian arti luas ini merupakan tempat masyarakat yang sebagian besar berpendapatan rendah, selain itu untuk mencukupi kebutuhan pokok makanan masyarakat. Pertumbuhan sektor pertanian belum berkembang secara optimal dikarenakan masih rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Pengembangan produk mentah menjadi barang jadi merupakan suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal daerah. Selain itu adanya keterbatasan sarpras pendukung aktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan menjadi kendala dalam kegiatan petani/pekebun dan peternak untuk melakukan aktivitasnya. Pada umumnya petani, peternak dan pekebun berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga SDM pertanian sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan yang rendah (setingkat SD/ sederajat). Dengan ini para petani, pekebun dan peternak mengalami kesulitan dalam menyerap pengetahuan dan wawasan serta menerapkan teknologi tepat guna dalam mengembangkan tanaman pangan. Mengetahui hal ini maka pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan SDM petani dengan adanya penyuluhan-penyuluhan pada petani, pekebun dan peternak diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas. Sehingga pengembangan produk lokal daerah dalam sektor pertanian dapat dikembangkan dengan optimal.

Melihat potensi daerah Kabupaten Gunung Mas sektor pariwisata di Kabupaten Gunung Mas cukup banyak. Namun Pemerintah daerah belum mengembangkan sektor pariwisata sehingga objek-objek wisata Berikut ini adalah potensi wisata di Gunung Mas. Berdasarkan informasi dan wawasan kondisi obyek pariwisata belum terkelola dengan optimal. Adapun Kabupaten Gunung Mas memiliki jumlah obyek wisata yang cukup banyak kurang lebih ada 26 spot obyek wisata. Namun karena kurangnya pengelolaan yang representatif mengakibatkan daya tarik wisatawan dan investor kurang tertarik. Kemudian dengan terbatasnya akses menjadikan obyek-obyek wisata kurang diminati para wisatawan.



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Jika melihat data jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dimana pada tahun 2020 mencapai 10,373 wisatawan yang berkunjung di Gunung Mas dengan pendapatan asli daerah dari sektor tersebut mencapai 65 juta rupiah. Akan tetapi, kualitas sektor pariwisata dapat dilihat dengan lama tinggal pengunjung karena dengan lama tinggal dari wisatawan akan memberikan dampak yang besar bagi sektor lainnya, seperti perdagangan, perhotelan, industri kreatif, sektor jasa lainnya (travel). Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengelola sektor pariwisata dengan sebaik mungkin sehingga tidak hanya pengunjung wisatawan namun investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Gunung Mas.

Salah satu pendukung perekonomian untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah adalah melalui penanaman modal. Penanaman modal di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa potensi perekonomian kabupaten Gunung Mas yang cukup baik. Hal ini terlihat bahwa jumlah pemodal asing dan jumlah pemodal dalam negeri yang cukup banyak. Pemodal tersebut sebagian besar berinvestasi di sektor pertambangan. Jumlah pemodal dalam negeri lebih besar daripada pemodal asing yaitu 32 pemodal dalam negeri dan 15 pemodal asing.

**Tabel IV.3
Jumlah Penanaman Modal di Kabupaten/Kota
se-Kalimantan Tengah Tahun 2020**

Kabupaten/Kota	PMA	PMDN	Total Jumlah Penanaman Modal
Kotawaringin Barat	25	77	102
Kotawaringin Timur	80	160	240
Kapuas	22	48	70
Barito Selatan	17	19	36
Barito Utara	11	55	66
Sukamara	3	16	19
Lamandau	4	28	32
Seruyan	11	31	42
Katingan	12	51	63
Pulang Pisau	3	22	25
Gunung Mas	15	32	47
Barito Timur	5	30	35
Murung Raya	21	26	47
Palangka Raya	19	55	74
Kalimantan Tengah	248	650	898

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

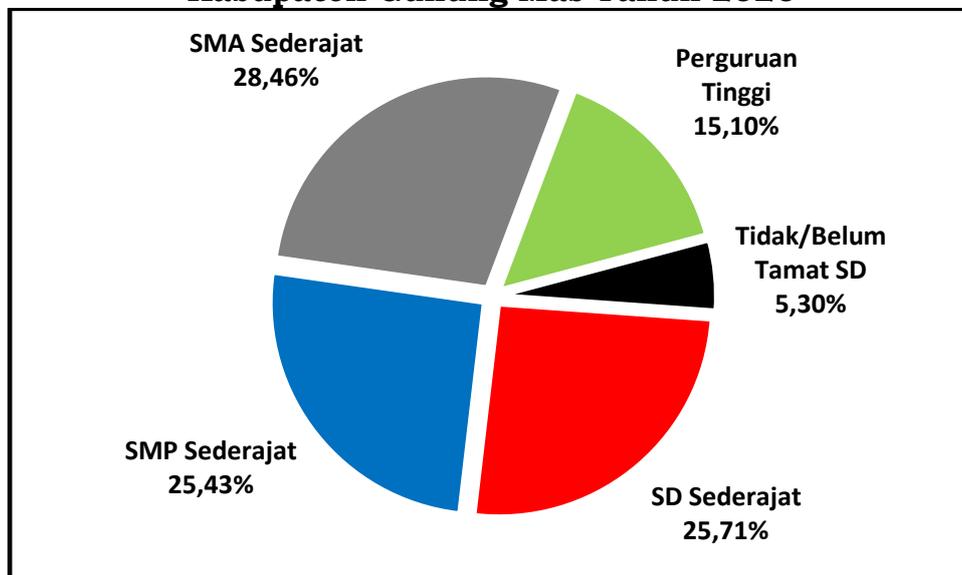
Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam



perekonomian rakyat. Meskipun belum sepenuhnya berkembang, namun koperasi di Kabupaten Gunung Mas masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro daerah. Pada tahun 2020, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Gunung Mas mencapai 52 persen.

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas masih belum cukup dikatakan layak secara keseluruhan. Meskipun dari indikator makro seperti angka kemiskinan dan pengangguran sudah cukup minim, namun kualitas kesejahteraan masyarakat masih perlu dikaji dan ditindaklanjuti.

Gambar IV.3
Persentase Angkatan Kerja menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

Terlihat bahwa sebagian besar angkatan kerja di Gunung Mas memiliki jenjang pendidikan SMA sederajat yang mencapai 28,46 persen. Meskipun begitu, permasalahan kualitas angkatan kerja perlu digarisbawahi mengingat masih terdapat 5,30 persen angkatan kerja yang tidak/belum tamat SD; 25,71 angkatan kerja yang lulusan SD sederajat; dan 25,43 persen angkatan kerja lulusan SMP sederajat.

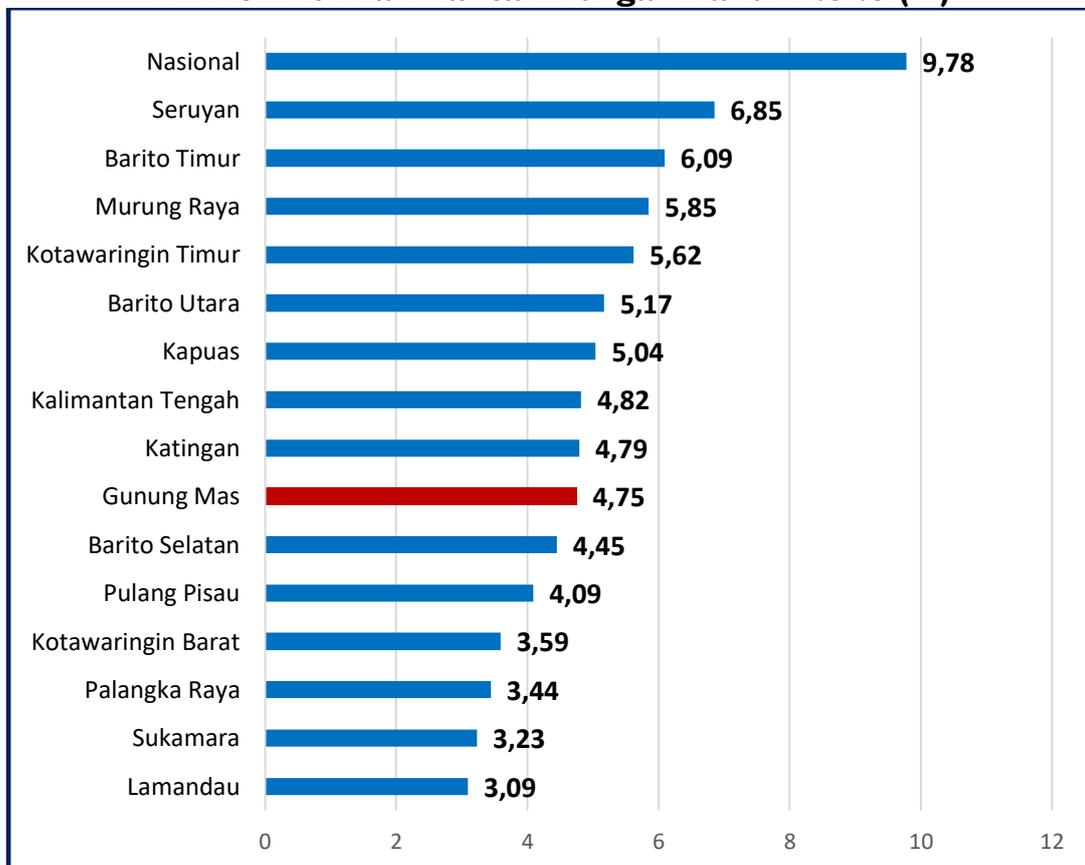
Pembangunan yang merata keseluruh daerah merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan daerah dan meningkatkan produktivitas daerah. Dengan pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing dan masyarakat yang produktif. Salah satu upaya untuk



mewujudkan daya saing daerah adalah dengan mengakselerasi pencapaian pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capaian pembangunan yang berorientasikan pada kesehateraan masyarakat. Pada tahun 2020, persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan tengah adalah Kabupaten Seruyan yang mencapai 6,85 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lamandau dengan angka kemiskinan sebesar 3,09 persen. Kemiskinan menjadi permasalahan semua daerah, sehingga diharapkan Kabupaten Gunung Mas dapat melakukan pembaharuan sosial ekonomi untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar IV.4
Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (%)



Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2021

4. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparancy*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, pelayanan publik yang belum berkualitas, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat.

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Gunung Mas terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Kendala utama penerapan SPM di Kabupaten Gunung Mas adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan serta kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur daerah yang belum memadai. Disamping itu, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada PD yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta masih sangat rendahnya skill dan kemampuan Aparatur sipil negara dibidang tertentu serta belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, pelayanan publik masih sangat kurang terutama yang berhubungan kesehatan, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana dan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan Akte Kelahiran. Hal ini terlihat dengan jumlah KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas meningkat setiap tahunnya. Terlihat dari peningkatan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik mencapai 79,45 persen.



Kemudian masih terbatasnya implementasi pelaksanaan *E- Government* dan penerapan penggunaan sarana dan prasarana informatika dilingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini menjadi salah satu pemicu lambatnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan juga masih lemah.

Peningkatan kinerja aparatur daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu lima tahun kedepan. Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, sangat memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Gunung Mas belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gunung Mas yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Perangkat Daerah (PD). Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumberdaya aparatur daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian belum optimalnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan sebagaimana yang diharapkan.

Terkait dengan kinerja SDM aparatur, melihat penyelenggaran pemerintah sekarang ini belum bekerja dengan maksimal. Selain itu distribusi dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan belum sesuai dengan skill yang dimiliki oleh aparatur.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah daerah secara bertahap memperbaiki kondisi sumberdaya manusia melalui berbagai Diklat, workshop, dan lain-lain. Tantangan dan permasalahan lainnya yang cukup strategis berkaitan dengan pembinaan disiplin aparatur daerah yang belum optimal. Disamping itu, penataan administrasi aset daerah juga masih memerlukan penanganan yang lebih professional.

Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD merupakan salah satu pengawasan pada bidang keuangan daerah. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga hasil pengawasan dan audit dapat dipertanggungjawabkan secara relevan. Pengawasan terhadap audit internal terhadap APBD Kabupaten Gunung Mas belum dilakukan sebagai mana mestinya sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gunung Mas belum optimal. Sistem pengelolaan keuangan yang belum dilakukan sesuai aturan terbukti memperlambat jalannya pembangunan Kabupaten Gunung Mas beberapa tahun ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan yang paling dominan adalah pengelolaan aset yang masih belum optimal dan sistem penatausahaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun sistem-sistem yang lainnya. Dengan pengelolaan keuangan yang handal diharapkan Kabupaten Gunung Mas mampu memanfaatkan sebaik-baiknya segala aset daerah untuk dikelola dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD.

5. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan. Ketidakjelasan tata batas kawasan ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi yang menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis. Ketidakjelasan kawasan hutan juga memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali selain itu masih tingginya kawasan hutan berstatus 'open access' juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Namun,



disisi lain muncul permasalahan baru, yakni masih terjadi penebangan kayu dan pembakaran untuk dijadikan lahan pertanian dan peruntukan lainnya.

Belum ditetapkannya zonasi untuk pemanfaatan hutan menyebabkan terjadinya pembalakan liar yang merusak hutan sehingga hutan tidak mampu menampung debit air hujan yang turun dan menyebabkan banjir. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan masalah persampahan, khususnya berkaitan dengan cara-cara penanganan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum ada. Permasalahan lainnya mencakup upaya-upaya yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan dan ekowisata dalam prinsip pengelolaan sumber daya dan rehabilitasi tambang-tambang rakyat, sumber daya air, konservasi biodiversitas secara terpadu. Disamping itu, terdapat tantangan yang dihadapi saat ini yakni terkait dengan upaya mewujudkan pengelolaan sampah secara terintegrasi berbasis kearifan lokal.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

4.2.1. Isu Strategis Internasional



Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Gunung Mas adalah adanya Pandemi COVID-19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia.

Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran.

Isu strategis Pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi COVID-19. Selain isu strategis Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Gunung Mas seperti:

a. Sustainable Development Goals/SDGs

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat



jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

- 1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
- 2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
- 4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;



- 7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
- 8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
- 9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
- 10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
- 11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
- 12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
- 13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
- 16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
- 17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

b. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi



Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam menangani Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

d. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming*



dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.



Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui “Katowice Climate Package” yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Gunung Mas.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.



Pandemi COVID-19 ini juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan pembangunan pamungkas dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk



memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi



Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.



3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:



- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
 - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui:
- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
 - c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
 - d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
 - f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa. Sedangkan secara aspesifik, Kalimantan Tengah memiliki pengembangan sektor unggulan pada komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kopi, kelapa, emas, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap dan budidaya.



Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang tidak berada pada koridor pertumbuhan maupun pemerataan. Meskipun begitu, Kabupaten Gunung Mas memiliki beberapa proyek prioritas seperti Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Batanjung serta Pembangunan Desa Terpadu.

b. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/*Corona Virus Disease 2019*) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 juga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada



penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan *Work From Home*, *Physical Distancing*, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

4.2.3. Isu Strategis Regional

4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 adalah “Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil”. Adapun misi pembangunan jangka panjang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, sesuai tahapan RPJMD ke-empat (tahun 2021-2025), ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju, dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.



4.2.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah, bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan kebijakan-kebijakan Provinsi yang selaras dan bisa di acu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas, sehingga dapat memberikan sumbangsing positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a. Pemerataan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai;
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat;
- e. Stabilitas ekonomi daerah;
- f. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi;
- g. Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan.

4.2.3.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Kabupaten Gunung Mas sebagai bagian dari ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam pengelolaannya perlu menjaga keberlanjutan kualitas ruang demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna menyesuaikan arah kebijakan penataan ruang wilayah provinsi, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas harus memerhatikan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 sebagaimana tertuang dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



4.2.3.4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005-2025

Dengan memperhatikan potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan pada lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan yang ingin diwujudkan, serta kemutlakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2005–2025 ditetapkan sebagai berikut.

GUNUNG MAS YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA DAN ADIL

Visi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005-2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik dimasa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi diatas dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

➤ M i s i

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah jangka panjang, yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang maju, mandiri, adil dan sejahtera, sehingga memiliki daya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), tingkat kesehatan yang semakin meningkat, semakin berperannya perempuan dan generasi muda dalam pembangunan daerah.

2. Membuka isolasi daerah

Pembukaan isolasi daerah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas sehingga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.



Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat.

3. Memperkuat Perekonomian daerah yang Berdaya Saing

Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan daerah secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi termasuk jasa keuangan yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

4. Mewujudkan Kabupaten Gunung Mas Yang Lestari

Melalui misi ini pengelolaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan



lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

5. Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata Dan Berkeadilan

Perwujudan dari misi ini adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tersebut ditempuh berbagai prioritas dan arah pembangunan sebagai berikut:

➤ Prioritas dan Arah Pembangunan RPJMD ke-4 (2018-2023)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Gunung Mas. Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.

4.2.3.5. Telaahan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar Kabupaten Gunung Mas

Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan daerah lainnya maka perlu dilihat kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah sekitar Kabupaten Gunung Mas. Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas adalah Kabupaten Murung Raya, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan. Telaahan dokumen RPJMD daerah lainnya dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.4
Visi dan Misi RPJMD Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Murung Raya**

RPJMD	VISI	MISI	
RPJMD Kota Palangkaraya Tahun 2018-2023	“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK	1	Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

RPJMD	VISI	MISI
	SEMUA”	2 Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) 3 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas)
Kabupaten Katingan periode 2018-2023	KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA	1 Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum. 2 Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan. 3 Memantapkan pembangunan perdesaan. 4 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender. 5 Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi. 6 Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

RPJMD	VISI	MISI
		7 Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya.
Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023	TERWUJUDNYA MASYARAKAT MURUNG RAYA YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT MELLAUI PEMBANGUNANBERBASIS PERDESAAN MENUJU MURUNG RAYA EMAS TAHUN 2030	1 Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.
		2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusaha potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.
		3 Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.
		4 Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memerhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

RPJMD	VISI	MISI
		perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah
		5 Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

4.2.3.6. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Menetapkan Peraturan Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomer 8 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034. Penetapan Perda ini bertujuan untuk terbukanya isolasi daerah menuju percepatan peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang bermartabat untuk mewujudkan kabupaten Gunung Mas yang maju berbasiskan pertanian dan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Rumusan RTRW Kabupaten Gunung Mas memiliki berbagai kebijakan penataan ruang yang terdiri atas:

a. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

strategi kebijakan ini adalah:

- Membuka isolasi ke daerah yang belum terlayani sarana dan prasarana transportasi secara baik;
- Mengembangkan Lapangan pekerjaan terhadap masyarakat;
- Mengembangkan potensi sumbardaya lahan;
- Mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; dan
- Mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis Pertanian dan pertambangan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.



b. Peningkatan peluang investasi.

Strategi kebijakan ini adalah:

- Memberikan insentif penanaman modal di kawasan potensial untuk investasi;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana dan sarana yang terkait dengan investasi; dan
- Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal di tiap bidang usaha;

c. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi; dan

Strategi kebijakan ini adalah:

- Membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi;
- Menciptakan iklim ekonomi komplementer antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan;
- Mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi

d. Menjaga keseimbangan lingkungan.

Strategi kebijakan ini adalah:

- Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya.
- Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
- Melakukan konservasi pada daerah resapan air dan kawasan lindung.
- Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi.

e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi kebijakan ini adalah:

- Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan



- Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Sistem pusat pelayanan kabupaten Gunung Mas, meliputi:

- a. PKL yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi yaitu Kota Kuala Kurun sebagai PKL

Sistem perkotaan kabupaten Gunung Mas yaitu:

- b. PPK dan PPL yang ditetapkan kabupaten, Yaitu terdiri dari:

- PPK meliputi:
 1. Kota Tewah;
 2. Kota Tumbang Talaken;
 3. Kota Sepang Simin;
 4. Kota Jakatan Raya;
 5. Kota Tumbang Rahuyan;
 6. Kota Tehang;
 7. Kota Kampuri; dan
 8. Kota Rabambang.
- PPL meliputi:
 1. Tumbang Miri;
 2. Tumbang Marikoi; dan
 3. Tumbang Napoi.

Rencana Sistem jaringan prasarana utama kabupaten meliputi:

- a. Sistem jaringan prasarana transportasi.
 - Sistem transportasi darat;
 - Sistem transportasi udara; dan
 - Sistem transportasi perkeretaapian.
- b. Sistem jaringan prasarana energi.
 - Pembangkit tenaga listrik; dan
 - Jaringan prasarana energi.
- c. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi.
 - Penyelenggaraan jaringan terestrial; dan
 - Penyelenggaraan jaringan satelit.
- d. Sistem jaringan prasarana sumber daya air.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

- Wilayah sungai;
 - Danau/waduk;
 - Daerah irigasi;
 - Prasarana air baku untuk air bersih; dan
 - Prasarana dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- e. Sistem jaringan prasarana lingkungan.
- Sistem jaringan air limbah; dan
 - Sistem jaringan persampahan.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas meliputi:

- a. Rencana kawasan lindung.

Kawasan lindung ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi serta kawasan lindung sesuai perkembangan yang terdapat di wilayah Kabupaten. Kawasan lindung tersebut meliputi:

- Kawasan hutan lindung
 - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - Kawasan perlindungan setempat;
 - Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - Kawasan rawan bencana alam.
- b. Rencana kawasan budidaya.

Kawasan Budidaya tersebut terdiri atas:

- Kawasan peruntukan hutan produksi;
- Kawasan peruntukan pertanian;
- Kawasan peruntukan pertambangan;
- Kawasan peruntukan permukiman;
- Kawasan peruntukan industri;
- Kawasan peruntukan wisata; dan
- Kawasan peruntukan lainnya.

Rencana pengembangan kawasan strategis yang ada di Kabupaten Gunung Mas meliputi :

- a. Kawasan Strategis Provinsi.

- Rumah Adat Betang di Tumbang Anoi; dan
- Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

b. Kawasan Strategis Kabupaten.

- Kawasan strategis kepentingan ekonomi;
- Kawasan Strategis Peningkatan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan; dan
- Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten memuat :

- a. Arahan perwujudan rencana struktur ruang;
- b. Arahan perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. Arahan perwujudan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Tabel 4.13

Sandingan/Keselarasan Program RTRW dan Program RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJMD		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
	Perwujudan Rencana Struktur Ruang						
I	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Permukiman						
1	Peningkatan fungsi PKL Kuala Kurun	Penyusunan tata ruang yang rinci Kota Kuala Kurun	Kota Kuala Kurun	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Penataan perkantoran pemerintahan		Program Perencanaan Tata Ruang			
		Peningkatan Bandar Udara Kuala Kurun		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan Dermaga		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Peningkatan fasilitas terminal tipe B		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Peningkatan kapasitas PDAM		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum *)			
		Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
		Pengembangan RSUD		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata			
		Pembangunan Gedung OR dan kesenian		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga			
		Pembangunan Pasar Kuala Kurun		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan Etalase Hasil SDA Kabupaten		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Pembangunan Centra Indutrsi rumah tangga		Program pengembangan industri kecil dan menengah			
		Pembangunan Pusat Budaya					
		Pengadaan lahan untuk Kasiba dan Lisiba		Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah *)			
		Pengembangan jalan bantaran sungai Kahayan		Program pembangunan jalan dan jembatan			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pengembangan pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan Industri pertanian		Program penataan struktur industri			
2	Peningkatan Fungsi PPK Tumbang Telaken	Penyusunan RDTR	Tumbang Telaken	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan Permukiman terintegrasi rencana KTM Bereng Belawan		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pengembangan Dermaga Takaras		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan terminal C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan permukiman terintegrasi dengan transmigrasi		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan Industri pertanian		Program penataan struktur industri			
		Pembangunan sekolah pertanian					
3	Peningkatan Fungsi PPK Tewah	Penyusunan RDTR	Tewah	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Peningkatan Dermaga		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan terminal tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Penataan kawasan perikanan budidaya		Program pengembangan budidaya perikanan			
		Pengembangan sekolah menengah					
		Pembangunan Industri Pengolahan ikan		Program Peningkatan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Peningkatan pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Peningkatan Puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Perbaikan Daerah irigasi		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Pembangunan Prasarana Persampahan		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			
4	Peningkatan Fungsi PPK Sepang Simin	Penyusunan RDTR	Sepang Simin	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan/pengembang pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan perumahan rakyat		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan jalan akses ke jalan poros		Program pembangunan jalan dan jembatan			
		Peningkatan pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas rawat inap		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan terminal C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan dermaga		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
5	Peningkatan Fungsi PPK Jakatan Raya	Penyusunan RDTR	Jakatan Raya	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan terminal C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan puskesmas		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pengembangan permukiman terintegrasi dengan transmigrasi		Program Pengembangan Perumahan			
		Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
6	Peningkatan Fungsi PPK Kampuri	Penyusunan RDTR	Kampuri	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan Pasar		Program peningkatan efisiensi			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
				perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan terminal		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
		Pembangunan industri pengolahan pertanian		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
7	Peningkatan Fungsi PPK Tumbang Rahuyan	Penyusunan RDTR	Kota Tumbang Rahuyan	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan sekolah menengah atas					
		Pengembangan Pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan terminal tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
8	Peningkatan Fungsi PPK Tehang	Penyusunan RDTR	Kota Tehang	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Pembangunan Sekolah Menengah Atas					
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan Pasar		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan terminal tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
9	Peningkatan Fungsi PPL Tumbang Miri	Penyusunan RDTR	Tumbang Miri	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan terminal Tipe C		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
10	Peningkatan Fungsi PPL Tumbang Marikoi	Penyusunan RDTR	Kota Tumbang Marikoi	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
11	Peningkatan Fungsi PPL Tumbang Napoi	Penyusunan RDTR	Kota Tumbang Napoi	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			
12	Peningkatan Fungsi PPL Rabambang	Penyusunan RDTR	Kota Rabambang	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pengembangan Pasar dan Pusat perdagangan		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			
		Pembangunan/Pengembangan puskesmas		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya			
		Peningkatan Sarana Pendidikan		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
II	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Transportasi Darat	Kab Gumas				
	A. Peningkatan Jalan	Pengembangan Ruas Jalan Tumbang Telaken – Jakatan Raya – Tumbang Rahuyan – Kuala Kurun – Perbatasan Kab. Kapuas dan ruas rabambang perbatasan Kab.Katingan		Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
		Pengembangan jalan Ruas Ruas Kuala Kurun – Kecamatan Sepang		Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	B. Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Ruas antar kecamatan yang belum terhubung : Ruas Tehang – Tb Marikoi, Ruas Tb Marikoi – Tb Miri, Ruas Sepang Simin – Jakatan Raya, Ruas Tb Telaken – Tehang, Ruas Tb Marikoi – Desa Tb Mahoroi, Ruas Kuala Kurun – Desa Linau – Jakatan Raya, Ruas Sepang Simin – Takaras Ruas Sepang Simin – Kuala Kurun dan lain lain		Program Peningkatan Jalan & Jembatan			
	C. Perbaikan Jalan	Antar IKK Kecamatan		Program pembangunan jalan dan jembatan			
	D . Pembangunan Jalan	Antar IKK Kecamatan		Program pembangunan jalan dan jembatan			
	E. Peningkatan Terminal	Terminal C ke terminal B	Kuala Kurun	Program pembangunan jalan dan jembatan			
	F. Pembangunan Terminal	Terminal C	IKK lainnya	Program pembangunan jalan dan jembatan			
	Pengembangan Dermaga	Fasilitas penunjang bongkar muat dermaga	Kab Gunung Mas	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
III	Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air						
	A. Kawasan Resapan Air	Rehabilitasi hulu Sungai Kahayan	Damang batu dan Miri Manasa	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			
	B. Irigasi	Optimalisasi irigasi	Tewah, Kurun, Rungan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
	C. Air Bersih	Peningkatan areal layanan PDAM	Seluruh kecamatan	Program Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum *)			
	D. Pengendalian Banjir	Rehabilitasi area tangkapan air	Damang Batu dan Miri	Program Sistem Penyediaan Air Minum *)			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
			Manasa				
IV	Sistem Jaringan Prasarana Energi						
	A. Peningkatan	Optimalisasi pemanfaatan PLTD	Kurun, Tewah, Tumbang Miri, Sepang Simin, Tumbang Miwan, Tumbang Tambira				
		Perluasan layanan listrik	Kuala Kurun, Tewah, Sepang Simin				
	B. Pembangunan	Pembangunan PLTU	Tumbang Tariak (Kecamatan Kurun)				
		Pembangunan Listrik energi baru terbarukan	Kecamatan yang belum ada pembangkit				
V	Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi						
	A. Peningkatan	Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN	Seluruh wilayah permukiman dan pusat pemanfaatan SDA	Program kerjasama informasi dengan mas media			
		Penataan dan efisiensi penempatan BTS	Kab. Gunung Mas	Program pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika *)			
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	Kab. Gunung Mas	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi *)			
VI	Sistem Jaringan Prasarana Permukiman						
	A. Peningkatan	Perbaiki perumahan menjadi rumah sehat	Seluruh pusat pelayanan	Program Pengembangan Perumahan			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
			kawasan/lingkungan				
	B. Pembangunan	Pembangunan perumahan perkotaan	Kuala Kurun, Tewah	Program Pengembangan Perumahan			
		Pembangunan TPA	Kuala Kurun	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*)			
		Pembangunan IPAL	Kuala Kurun, Tewah(Limbah perumahan)	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi*)			
		Pembangunan drainase	Kuala Kurun, dan Kota PKL	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			
		Pembangunan jalan lokal/lingkungan	PPK/PPL dan desa-desa berkembang	Program pembangunan infrastruktur perdesaan			
	Perwujudan Rencana Pola Ruang						
1	Perwujudan Kawasan Lindung						
	A. Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Meningkatkan dan mengembangkan cakupan kawasan program HKm pada kawasan hutan lindung yang sudah rusak/alih fungsi non hutan		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			
		Melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah dan masyarakat setempat		Program Perlindungan dan Pengawasan *)			
		Langkah-langkah pengelolaan hutan lindung :		Program Pengelolaan Tahura *)			
		a. Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan HL untuk mendukung kawasan konservasi di atasnya					
		b. Penegakan hukum bagi kegiatan ilegal logging dengan penanganan (represif, persuasif dan preventif) secara kontinu					



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW		Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		c. Kegiatan Rehabilitasi, Redeliniasi kawasan hutan				
	B. Perwujudan Fungsi Koridor Satwa dan dataran Tinggi	Penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40 % sebagai kawasan lindung		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)		
		Identifikasi dan klasifikasi lahan tersebut menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis		Program Perlindungan dan Pengawasan *)		
		Lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program masif dan partisipatif		Program Pengelolaan Tahura *)		
	C. Perwujudan Kawasan Resapan Air	Pemantapan tata batas kawasan		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)		
		Identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan (tidak kritis, kritis dan sangat kritis)		Program Perlindungan dan Pengawasan *)		
		Perumusan program rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta lintas wilayah		Program Pembinaan Kader Konservasi *)		
		Penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan prean Suaka Alam (rencana aski bersama)		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)		
		Pelaksanaan program rehabilitas		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)		
		Pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian Hutan		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)		
		Pemantauan dan evaluasi		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
	D. Perwujudan Kawasan Lindung Setempat	Pembuatan perda sempadan sungai, danau dan mata air		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
		Identifikasi sempadan sungai yang kritis		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
		Rehabilitasi sempadan sungai, danau dan mata air		Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah *)		
	D. Perwujudan Mitigasi Bencana	Mitigasi bencana longsor adalah :				



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Penguatan lereng rawan longsor di sepanjang bantaran sungai dan sisi jalan raya	Seluruh kecamatan	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
		Inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			
		Penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Peraturan daerah yang mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran tata ruang di daerah rawan longsor		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Mitigasi bencana banjir adalah :					
		Delineasi kawasan banjir eksisting dan potensi meluasnya kawasan rawan banjir		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Identifikasi faktor penyebab bahaya banjir		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Penyusunan program mitigasi bencana banjir, baik mitigasi struktural maupun non struktural		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Pelaksanaan program mitigasi yang telah dirumuskan, yaitu :					
		1. Rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS		Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah *)			
		2. Sosialisasi teknis mitigasi banjir kepada masyarakat		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		terdampak (potensi terdampak)		*)			
		3. Menetapkan sebagian dari kawasan banjir sebagai kawasan lindung karena merupakan bagian dari ekosistem tanah basah		Program Perencanaan Tata Ruang			
2	Perwujudan Kawasan Budidaya						
	A. Perwujudan HPT	Pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan serta blok perlindungan		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)			
		Pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, microhydro, kebutuhan air bersih)		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
		Pembangunan fasilitas wisata alam		Program Pengembangan Ekowisata Tahura *)			
	B. Perwujudan Kawasan Pertanian	Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi.	Seluruh kecamatan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jalan produksi, pengolahan hasil panen, terminal agribisnis		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya			
		Peningkatan produksi pertanian sawah melalui intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari 4 ton/ha		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
		Untuk meningkatkan pendapatan petani perlu dikembangkan padi organik bersertifikat sehingga sebagian hasil panen dapat dijual dengan nilai ekonomi yang tinggi		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
		Diperlukan berbagai insentif (keringanan pajak/retribusi dan subsidi) guna meningkatkan produktivitas lahan dan kinerja petani		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
		Penguatan lembaga petani terkait dengan pengelolaan air		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		(irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran					
	C. Perwujudan Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura	Penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering	Seluruh kecamatan	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Penetapan untuk komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
		Pembangunan prasarana dan sarana pertanian		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)			
		Penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta pemodalan		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan			
	D. Perwujudan Kawasan Perkebunan	Penetapan (delineasi) kawasan perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan konservasi (lindung)	Seluruh kecamatan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan. Peningkatan produksi ini dilakukan melalui bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budidaya dan pengolahan pasca panen		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			
		Pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan yang terdiri dari sub sistem :		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)			
		a. Subsistem Hulu (Up Stream) sarana produksi pertanian (industri pembibitan, pupuk dan bahan kimia lainnya, alat pertanian)					
		b. Subsistem Usaha Tani (On Farm) produksi pertanian primer					
		c. Subsistem Hilir (Down Stream) pengolahan hasil pertanian dan perdagangan					
		d. Subsistem Kelembagaan (Supporting Institution) perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan,					



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		kebijakan pemerintah, penyuluhan dan konsultan					
	E. Perwujudan Kawasan Peternakan	Pengembangan sentra peternakan ternak besar (sapi dan kerbau), sebagai sentra peternakan ternak besar perlu dilengkapi dengan prasarana serta sarana reproduksi (inseminasi buatan), pembesaran, penggemukan dan pemanfaatan daging (RPH) serta susu sapi dan kerbau (yoghurt)	Seluruh kecamatan terutama Tewah, Kurun dan Mihing Raya Rencana KTM Bereng Belawan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
		Pengembangan sentra peternakan ternak kecil (Babi dan Kambing), perlu dibangun prasarana dan sarana pendukung agar sentra berfungsi dan terjadi peningkatan populasi serta produksi ternak Babi dan kambing	Seluruh kecamatan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
		Pengembangan sentra peternakan unggas	Seluruh kecamatan	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
	F. Perwujudan Pengembangan Pertambangan dan Energi	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, serta pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi	Seluruh kecamatan				
		Kepastian dari hasil Inventarisasi sumberdaya mineral, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan galian Golongan A, B dan C serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melakukan kajian sumberdaya energi alternatif yang meliputi tenaga air, untuk listrik perdesaan		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang		Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi *)			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		pertambangan dan energi					
		Pengembangan energi panas bumi sebagai pembangkit listrik energi alternatif					
		Melakukan kajian pengembangan energi alternatif		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Melaksanakan perencanaan pemanfaatan tenaga listrik energi baru terbarukan		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik energi baru terbarukan		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			
	G. Perwujudan Kawasan Pariwisata	Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu	Kuala Kurun				
		Melengkapi Kawasan Wisata Terpadu dengan fasilitas penunjang wisata		Program pengembangan destinasi pariwisata			
		Melakukan promosi Kawasan Wisata Terpadu melalui berbagai media, dan melaksanakan berbagai event promosi		Program pengembangan pemasaran pariwisata			
		Melakukan kerjasama dengan berbagai biro perjalanan dalam upaya pemasaran yang progresif		Program pengembangan pemasaran pariwisata			
		Pengembangan potensi sumberdaya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu	Seluruh wilayah pariwisata				
		Inventarisasi sumberdaya alam yang berpotensi sebagai objek wisata		Program pengembangan destinasi pariwisata			
		Membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah		Program Sarana Promosi Parawisata *)			
		Peningkatan promosi dan investasi kepariwisataan		Program Sarana Promosi Parawisata *)			
	H. Perwujudan Kawasan Permukiman	Permukiman Perkotaan					
		Pemetakan zona permukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memerhatikan	Kuala Kurun dan IKK Lainnya	Program Perencanaan Tata Ruang			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW		Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan	Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		a. Daya tampung kota, lahan dengan kemiringan di atas 15 %				
		b. Peningkatan pembangunan perumahan pegawai eselon 3 kebawah				
		c. Rencana pengembangan fasilitas utama kota (pusat keagamaan, Stadion Olah Raga)				
		d. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa				
		Identifikasi kelengkapan dan cakupan layan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan untuk tahun 2031 :				
		a. Jalan lingkungan				
		b. Sistem jaringan prasarana air minum				
		c. Sistem jaringan prasarana listrik				
		d. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi				
		e. Sistem pengelolaan sampah (gerobak, TPS dan sebuah TPA)				
		f. Sistem drainase dan pengelolaan limbah				
		Identifikasi lokasi kelompok permukiman yang beradapada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi	Kuala Kurun,	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)		
		Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan permukiman baru		Program Perencanaan Tata Ruang		
		Pengadaan perumahan melalui subsidi KPR-Rumah Sangat Sederhana		Program Pengembangan Perumahan		
		Permukiman Perdesaan				
		Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya	Kawasan perdesaan di seluruh wilayah kecamatan	Program Pengembangan Perumahan		



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Identifikasi kelompok permukiman perdesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya. Bila terdapat permukiman (kelompok rumah) yang berada pada kawasan lindung, maka direkomendasikan jalan keluarnya baik melalui pelepasan hak hutan atau relokasi		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Bencana *)			
		Klasifikasi kelompok permukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah					
	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis						
1	Perwujudan Kawasan Strategis Ekonomi	Penetapan Kawasan strategis ekonomi melalui perda	Seluruh kawasan yang telah teridentifikasi	Program Perencanaan Tata Ruang			
		Pembangunan sarana dan prasarana penunjang agropolitan sebagaimana kegiatan yang diprogram pada arahan pemanfaatan ruang tentang pertanian dan perkebunan		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian *)			
		Perwujudan rencana KTM Bereng Belawan					
2	Perwujudan Kawasan Strategis Sosial Kultural	Pemantapan batas kawasan	Kuala Kurun dan Tumbang Anoi	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan *)			
		Pengembangan jasa perhotelan dan restoran dan travel					
		Pembangunan Infrastruktur pendukung		Program pembangunan infrastruktur perdesaan			



PERUBAHAN RPJMD

No	Indikasi Program Utama RTRW			Rencana Program/Kegiatan Ranwal RPJDM		Hasil Identifikasi	Rekomendasi
	Program/Kegiatan		Lokasi	Program/Kegiatan	Lokasi		
		Pembangunan Museum					
		Pengembangan kw. Betang Tumbang Anoi					
3	Perwujudan Kawasan Strategis Penggunaan SDA dan Teknologi Tinggi	Penetapan batas kawasan Penggunaan SDA dan Teknologi Tinggi	Tumbang Tariak	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Penyusunan rencana rinci kawasan Penggunaan SDA dan Teknologi Tinggi		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Pembangunan PLTU					
		Inventarisasi Sumber pemasokan Energi untuk PLTU					
		Penyiapan masyarakat					
		Pembangunan infrastruktur pendukung					
		Pendampingan dan pelaksanaan kegiatan					
		Pemantauan (Amdal) dan pengembangan		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
4	Perwujudan Kawasan Strategis Hamkam	Menganalisis dampak pembangunan		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			
		Pembangunan infrastruktur Statgis Hankam terutama dalam membantu pergerakan pasukan		Program Pembangunan Sarana Prasarana Tahura *)			
		Melestarikan hutan tempat lahihan militer dan sebagainya		Program peningkatan kelestarian Kawasan TAHURA *)			



4.2.3.7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Gunung Mas

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Begitu pula Kabupaten Gunung Mas yang berupaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan, juga berupaya mengimplementasikan KLHS ini di dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011-2024. Diharapkan dengan adanya implementasi dokumen KLHS pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas maka akan ada sinkronisasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada aras kebijakan, rencana dan program pembangunan. Salah satu inti dari KLHS adalah melihat capaian indikator dan pengkajian pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya akan dijadikan rekomendasi terhadap pemerintah daerah. Dalam salah satu poin penting dalam kajian KLHS RPJMD Gunung Mas terdapat rumusan alternatif dan rekomendasi berdasarkan sasaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas sebagai penyempurnaan kebijakan rencana program dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang dijabarkan sebagai berikut:

Rekomendasi perbaikan RPJMD yang sudah didasarkan pilar-pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola kelembagaan. Rekomendasi ini berupa arahan yang ditujukan untuk pencapaian sasaran dari setiap misi pada RPJMD (Rancangan Teknokratis) Kabupaten Gunung Mas.

1. Pilar Sosial

Penyempurnaan KRP pada RPJMD yang mempertimbangkan pilar sosial berfokus pada penguatan muatan dari beberapa sasaran untuk masing-masing misi berikut:

- (1) Sasaran 1 pada tujuan ke-1 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Pengembangan sistem pendidikan yang mengarah pada pembentukan kepribadian berakhlak mulia.
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan keagamaan baik dari segi sistem dan fasilitasnya.



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

- c. Peningkatan kesadaran dan peran serta orang tua dan tenaga pengajar dalam memberikan pendidikan keagamaan.
- (2) Sasaran 1 pada tujuan ke-2 di Misi ke-2 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan sikap toleransi, gotong-royong, menghargai, membantu antar pemeluk agama.
 - b. Penghapusan praktik/isu yang menggunakan atribut ajaran agama.
- (3) Sasaran 1 pada tujuan ke-2 di Misi ke-2 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Upaya peningkatan akses layanan kesehatan secara merata termasuk pada akses obat-obatan dan vaksinasi;
 - b. Upaya peningkatan akses dan informasi terkait layanan kesehatan seksual dan reproduksi;
 - c. Upaya peningkatan layanan kefarmasian dan perbekalan secara inklusif dan merata; dan
 - d. Peningkatan pengawasan obat-makanan, keamanan pangan, dan bahan berbahaya.
- (4) Sasaran 1 pada tujuan ke-3 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Upaya peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga pengajar yang berkualitas;
 - b. Pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan kualitas pendidikan sesuai standar nasional;
 - d. Perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah serta penyediaan bantuan operasional sekolah dan/ atau madrasah;
 - e. Peningkatan kualitas Program Wajib belajar pendidikan dasar (dikdas) sembilan tahun.
- (5) Sasaran 2 pada tujuan ke-3 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Pengembangan dan integrasi nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan;
 - b. Peningkatan promosi budaya dan produk lokal berbasis masyarakat;
 - c. Pengembangan nilai kebudayaan lokal dalam kegiatan masyarakat.



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

- (6) Sasaran 3 pada tujuan ke-3 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan keterampilan olahraga bagi pemuda serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- (7) Sasaran 1 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan pelayanan kesehatan dan program keluarga bencana secara merata untuk semua kalangan masyarakat.
 - b. Peningkatan akses informasi serta edukasi dan sosialisasi mengenai program keluarga berencana.
 - c. Peningkatan upaya meminimalisir jumlah penduduk yang bermigrasi ke Kabupaten Gunung Mas.
- (8) Sasaran 2 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan sistem dan perlindungan sosial bagi kaum perempuan dan anak-anak dari tindakan bahaya dan kekerasan fisik dan psikologis;
 - b. Peniadaan disparitas gender dan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam segala sektor;
 - c. Peningkatan penjaminan bagi kaum perempuan untuk mengakses pelayanan dasar dalam segala sektor;
 - d. Peningkatan jaminan dalam hal partisipasi dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat; dan
 - e. Pemberdayaan kaum perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
- (9) Sasaran 3 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan secara inklusif dan merata.
 - b. Peningkatan ketahanan masyarakat rentan terhadap bencana dengan upaya pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam.
 - c. Peningkatan pendidikan dan keterampilan kerja.
 - d. Peningkatan akses terhadap jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.



- (10) Sasaran 4 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja secara terbuka tanpa diskriminasi;
 - b. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kelembagaan serta perlindungan hak tenaga kerja; dan
 - c. Upaya pemberdayaan dan peningkatan layanan bagi masyarakat miskin, komunitas adat terpencil, penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (11) Sasaran 5 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan kualitas komunikasi dan demokrasi dalam keluarga secara berkelanjutan; dan
 - b. Peningkatan kerjasama dan saling apresiasi antar anggota keluarga.
- (12) Sasaran 6 pada tujuan ke-4 di Misi ke-1 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan upaya pencegahan dini, kesiagaan, serta layanan perlindungan terhadap gangguan ketertiban keamanan dan perlindungan masyarakat;
 - b. Penegakkan hukum yang adil dan merata bagi pelaku kejahatan dan kekerasan; dan
 - c. Upaya penyuluhan terkait ketertiban, keamanan, dan taat aturan lalu lintas.

2. Pilar Ekonomi

Penyempurnaan KRP pada RPJMD yang mempertimbangkan pilar ekonomi berfokus pada penguatan muatan dari beberapa sasaran untuk masing-masing misi berikut:

- (1) Sasaran 1 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan jumlah UMKM dalam mencapai target ideal dan mempermudah akses jasa keuangan; dan
 - b. Peningkatan daya jual dan daya saing produk unggulan lokal semua wilayah Kecamatan di Gunung Mas dalam pasar regiona /nasional/global.
- (2) Sasaran 2 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

- a. Pengembangan dan peningkatan daya saing dan kualitas ekonomi kreatif; dan
 - b. Peningkatan kemudahan perjanjian usaha/investasi dan jaminan keamanan sosial dan lingkungan serta peningkatan kepastian hukum dalam pengelolaan usaha.
- (3) Sasaran 3 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
- a. Pembuatan kebijakan pengendalian harga dan pemerataan pendapatan; dan
 - b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional.
- (4) Sasaran 4 tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
- a. Pengembangan dan peningkatan daya saing dan kualitas ekonomi kreatif.
- (5) Sasaran 5 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
- a. Pengembangan dan peningkatan potensi sektor pariwisata yang memenuhi standar nasional maupun internasional.
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha sektor pariwisata.
- (6) Sasaran 6 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
- a. Peningkatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - b. Peningkatan kemampuan produksi dan produktivitas pangan sehingga dapat menurunkan tingkat ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah; dan
 - c. Peningkatan produk pangan yang memenuhi standar halal dan aman.
- (7) Sasaran 7 pada tujuan ke-1 di Misi ke-3 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
- a. Peningkatan pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan antar sektor untuk pembangunan berkelanjutan; dan
 - b. Peningkatan kerjasama antara pihak pemerintah-swasta dan masyarakat sipil.

3. Pilar Lingkungan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Penyempurnaan KRP pada RPJMD yang mempertimbangkan pilar lingkungan berfokus pada penguatan muatan dari beberapa sasaran untuk masing-masing misi berikut:

- (1) Sasaran 1 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau untuk semua kalangan terutama kelompok masyarakat rentan; dan
 - b. Pembangunan infrastruktur kota dan permukiman yang ramah lingkungan dan tahan bencana sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Reduction 2015-2030.
- (2) Sasaran 2 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) Kabupaten Gunung Mas dengan mengintegrasikan ketahanan bencana alam
 - b. Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau untuk semua kalangan terutama kelompok masyarakat rentan.
- (3) Sasaran 3 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Pembuatan dokumen rencana pengurangan risiko bencana sebagai acuan dalam mitigasi bencana.
 - b. Pembangunan infrastruktur dan perumahan tahan gempa dan peningkatan sarana penanggulangan bencana.
 - c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana khususnya kelompok masyarakat rentan.
- (4) Sasaran 4 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan akses terhadap system transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua kalangan masyarakat terutama kelompok masyarakat rentan.
- (5) Sasaran 5 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

- a. Peningkatan akses dan layanan terhadap air minum aman dan terjangkau secara universal dan merata.
 - b. Peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan secara memadai dan merata bagi semua khususnya kelompok masyarakat rentan; dan
 - c. Optimalisasi pengelolaan dan pengolahan sanitasi baik limbah dan sampah daerah dan antar daerah dengan benar dan ramah lingkungan.
- (6) Sasaran 6 pada tujuan ke-1 di Misi ke-2 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
- a. Menjamin akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan difasilitasi dengan pelayanan dasar secara merata.
 - b. Upaya menata kembali kawasan pemukiman kumuh menjadi kawasan yang ramah lingkungan.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Penyempurnaan KRP pada RPJMD yang mempertimbangkan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan berfokus pada penguatan muatan dari beberapa sasaran untuk masing-masing misi berikut:

- (1) Sasaran 1 pada tujuan ke-1 di Misi ke-4 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Mewujudkan birokrasi bersih, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - b. Partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Sasaran 2 pada tujuan ke-1 di Misi ke-4 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu memastikan muatan mengenai:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang terukur.
- (3) Sasaran 3 pada tujuan ke-1 di Misi ke-4 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya setiap perangkat daerah perlu memastikan pemanfaatan teknologi dan informasi dengan baik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Sasaran 1 pada tujuan ke-2 di Misi ke-4 RPJMD; dalam pelaksanaan program dan kegiatannya perlu meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kajian terkait daya saing daerah dan inovasi daerah baik dari instansi pemerintah daerah maupun dari masyarakat.



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019 – 2024 dimaksudkan untuk memastikan termuatnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024, sekaligus sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS. Oleh karena itu, isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Tim Penyusun melalui proses pelaksanaan KLHS akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD. Pada penyusunan RPJMD Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2024, KLHS dilakukan terhadap dokumen utama Rencana Teknokratik Kabupaten Gunung Mas dengan dilengkapi analisis atas Visi, Misi dan Program Bupati Gunung Mas Terpilih 2019-2024 yang telah dijabarkan menjadi rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan.

Rekomendasi KLHS menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati dan seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program. Rekomendasi yang disetujui akan diinstruksikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk diintegrasikan sebagai perbaikan terhadap rancangan dokumen perencanaan yang sudah ada. Secara khusus tindak lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi yang sudah dirumuskan pada Bab 6 ini adalah sebagai berikut:

1. Revisi dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam RPJMD berdasarkan rekomendasi KLHS yang telah dirumuskan.. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan arahan kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran RPJMD memuat rekomendasi KLHS.
2. Penjabaran RPJMD ke dalam KRP dengan berpedoman pada rekomendasi KLHS yang telah dirumuskan, oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan sasaran, kegiatan dan indikator kinerja memuat rekomendasi KLHS.

Penelaahan integrasi KLHS dan RPJMD, yang menunjukkan tindak lanjut penyempurnaan kebijakan, KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024 diintegrasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Gunung Mas dengan menjadikannya pertimbangan penyusunan RPJMD Kabupaten



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Gunung Mas tahun 2019 – 2024 terutama dalam penyusunan sasaran pokok dan arah kebijakan pada setiap misi. Integrasi dimuat dalam Lampiran RPJMD dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024. Bagian yang diadaptasi dari KLHS meliputi:

1. Permasalahan di Kabupaten Gunung Mas yang sudah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD namun belum menjadi fokus dalam RPJMD.
2. Rumusan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap atau kesenjangan pada kebijakan pembangunan RPJMD.
3. Gambaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah selaras dan diakomodasi dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 – 2024.

4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka **isu strategis Kabupaten Gunung Mas** adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *values* dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

2) Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah



Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dorong yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

3) Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan *crucial problem*. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi



dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

4) Implementasi Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh



pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya. Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Gunung Mas.

5) Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah demi perekonomian berkelanjutan

Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan Aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap sumber alam yang telah diambil.



Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai di masa yang akan datang.

6) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan ini maka diperlukan kemandirian dan keberdayaan masyarakat sebagai prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Memahami kondisi dan situasi saat ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pengembangan dan peningkatan serta pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini harus disikapi dengan adanya mitigasi terhadap kerusakan lingkungan hidup (kebakaran hutan, bencana alam, polusi air, polusi udara, limbah B3), pengelolaan sampah, rencana aksi nasional penurunan emisi sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Hal ini perlu disikapi dengan serius oleh Pemerintah Daerah agar mampu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan kehidupan yang lebih dinamis.

7) Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal)

SPM merupakan kebutuhan dasar warga negara, yakni kebutuhan fisiologis yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan warga negara hidup tidak layak. Pemerintah pusat menyusun SPM untuk melindungi hal konstitusional, kepentingan nasional, ketentraman dan ketertiban umum, keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Menyikapi hal ini, implementasi SPM ini menjadi salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam hal penyelenggaraanya. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diharapkan sepenuhnya mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk seluruh lapisan masyarakat.

8) GERMAS untuk Pencegahan Stunting dan Penanganan COVID-19

GERAKAN Masyarakat Hidup Sehat atau di singkat **Germas** merupakan upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

setiap orang untuk hidup sehat agar derajat kesehatan masyarakat meningkat setinggi-tingginya dapat terwujud. Ini dilatarbelakangi transisi epidemiologi perubahan pola penyakit terkait faktor perilaku. Stunting adalah sebuah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). Penyebab terjadinya stunting karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama sejak konsepsi sampai anak usia dua tahun. Anak sering sakit, keterbatasan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan. Ketersediaan pangan di rumah tangga yang kurang, pola asuh serta pola makan.

Dampak yang ditimbulkan akibat stunting antara lain terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme tubuh. Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit serta risiko tinggi muncul penyakit menular maupun tidak menular. Adapun fokus Germas meliputi peningkatan aktivitas fisik, peningkatan pencegahan, deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan serta peningkatan edukasi hidup sehat peningkatan perilaku hidup sehat dan peningkatan pangan sehat serta percepatan perbaikan gizi yang berdampak pada penurunan angka stunting.

Beberapa penyakit berpotensi wabah/pandemi wajib menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam antisipasi penularannya. Wabah sendiri mengindikasikan peningkatan jumlah kasus penyakit yang jelas terlihat, meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang diantisipasi. Sedangkan pandemi adalah wabah yang menyebar di area geografis yang lebih luas hingga antar Negara dan menjadi kasus internasional.

Seperti yang sedang terjadi saat ini dimana dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (*Corona Virus Disease – 2019*) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Gunung Mas juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian yang berujung pada menurunnya



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

Selain itu, masalah gizi dan tumbuh kembang anak masih menjadi hambatan besar bagi Pemerintah Daerah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia, angka prevalensi stunting di Kabupaten Gunung Mas 3 tahun terakhir sudah mengalami tren penurunan hingga dari angka awal 38,21 (tahun 2018) menjadi 22,87% (tahun 2020), dan terus berusaha menekan hingga batas atas ketetapan WHO yaitu 20%.



- BAB V - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 telah dilaksanakan melalui RKPD 2020 dan 2021 yang berarti saat ini memasuki tahun ke-2 (2021). Dengan dinamika yang ada Tahun 2021 ini dilaksanakan perubahan RPJMD, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan daerah dengan perkembangan yang ada. Sehingga kebijakan-kebijakan yang direncanakan dan akan dilaksanakan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis sesuai kondisi saat ini terutama dengan adanya Covid-19 dan pemberlakuan peraturan-peraturan yang terbaru, sehingga berdampak cukup signifikan terhadap beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan kesehatan. Dalam perubahan RPJMD ini tidak merubah Visi dan Misi, sehingga hanya dilakukan penajaman-penajaman dan perubahan tujuan dan sasaran sesuai perkembangan indikator yang ada saat ini.

5.1. VISI

Visi merupakan suatu rumusan pernyataan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dimana visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunung Mas, maka Visi yang hendak dicapai dalam

**"TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU,
BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)"**



Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yakni “**Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri**”. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan.

Bermartabat adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar yang negative dalam membangun harkat kemanusiaan yang sesungguhnya dan terhormat.

Maju adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat.

Berdaya saing adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan daerah.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mandiri adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan diarahkan secara terintegrasi dan seimbang, yakni: pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat, tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; menjamin terciptanya rasa aman, nyaman dan damai untuk terwujud solidaritas yang harmonis diantara semua lapisan masyarakat dan



pemangku kepentingan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal; menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan dan produktivitas ekosistem.

Berdasarkan pernyataan visi diatas dengan beberapa elemen pokok visi yang terkait maka dapat digambarkan hubungan antar elemen visi yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1
Keterkaitan Antar Elemen Pokok Visi

5.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, Misi pembangunan sebagai berikut:



1) Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional

Melalui misi ini, pembangunan infrastruktur wilayah berupa prasarana dan sarana untuk mendukung kepentingan publik dan pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.

2) Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia (SDM)

Melalui misi ini, pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan mental dan spiritual warga, meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan kalangan swasta.

3) Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah

Melalui misi ini, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah baik yang bersifat investasi maupun ekstraktif dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas usaha.

4) Mempercepat Reformasi Birokrasi

Melalui misi ini akan diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

5) Penegakan dan jaminan kepastian hukum (*Law Enforcement*)

Melalui misi ini diwujudkan rasa aman dan nyaman bagi segenap komponen masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan berusaha atau bekerja baik di bidang pertambangan (investor dan tambang rakyat) dan bidang kehutanan (pengusaha HPH dan usaha masyarakat) dan bidang lainnya.

6) Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian tata pergaulan hidup masyarakat yang harmonis dengan tata pergaulan hidup masyarakat lain dalam bingkai Huma Betang dan falsafah belum Bahadat.

7) Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Melalui misi ini kebijakan pembangunan daerah selalu diarahkan pada keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi



8) Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Misi ini diperuntukkan untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan penegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kerangka NKRI

Berdasarkan visi dan penjelasan misi diatas maka keterkaitan antara visi dan misi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

MISI 1

Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proporsional

MISI 2

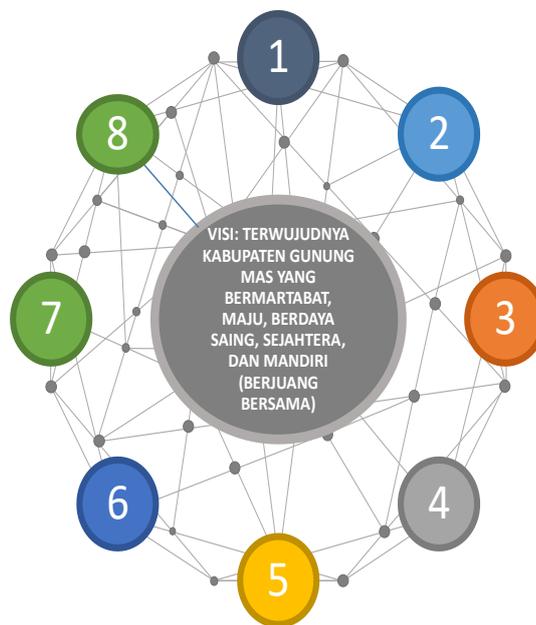
Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia (SDM)

MISI 3

Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah

MISI 4

Mempercepat Reformasi Birokrasi



MISI 5

Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)

MISI 6

Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

MISI 7

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

MISI 8

Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Gambar 5.2
Keterkaitan antara Visi dan Misi

Gambar di atas menunjukkan bahwa visi, misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas merupakan sebuah langkah baru dalam rangka percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat perkembangan, kondisi Kabupaten Gunung Mas, potensi unggulan daerah, dan merujuk pada adanya konsep SMART CITY maka terdapat 3 konsep pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang akan dilakukan yaitu

SMART AGRO

Smart agro merupakan pengembangan dalam bidang pertanian dari konvensional menjadi lebih modern. Dengan hadirnya teknologi dalam dunia pertanian, diharapkan pertanian Kabupaten Gunung Mas dapat lebih produktif.



Pengembangan Pertanian dalam arti luas terdiri dari mata rantai produksi, pengolahan dan pemasaran, serta melalui sentuhan teknologi dan pendampingan secara intens dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil pasca panen serta pengembangan industri pengolahannya untuk meningkatkan nilai tambah.

SMART HUMAN RESOURCES

Kualitas SDM merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam pembangunan daerah, kualitas SDM yang berdaya saing mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya pengelolaan sumber daya (tenaga kerja) yang dikembangkan dalam sistem yang SMART. Dengan smart human resources diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dengan smart human resources diharapkan mampu mendesign sebuah sistem Human Resources yang dapat diaplikasikan dalam industri – industri yang sedang berkembang.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (*Smart Human Resource*) guna mendukung pengembangan agrobisnis dan ekoturisme. Dengan memastikan akses terhadap pendidikan pada setiap jenjangnya yang meliputi sarana dan prasarannya tersedia secara merata, untuk meningkatkan kualitas SDM kita secara formal & Non Formal.

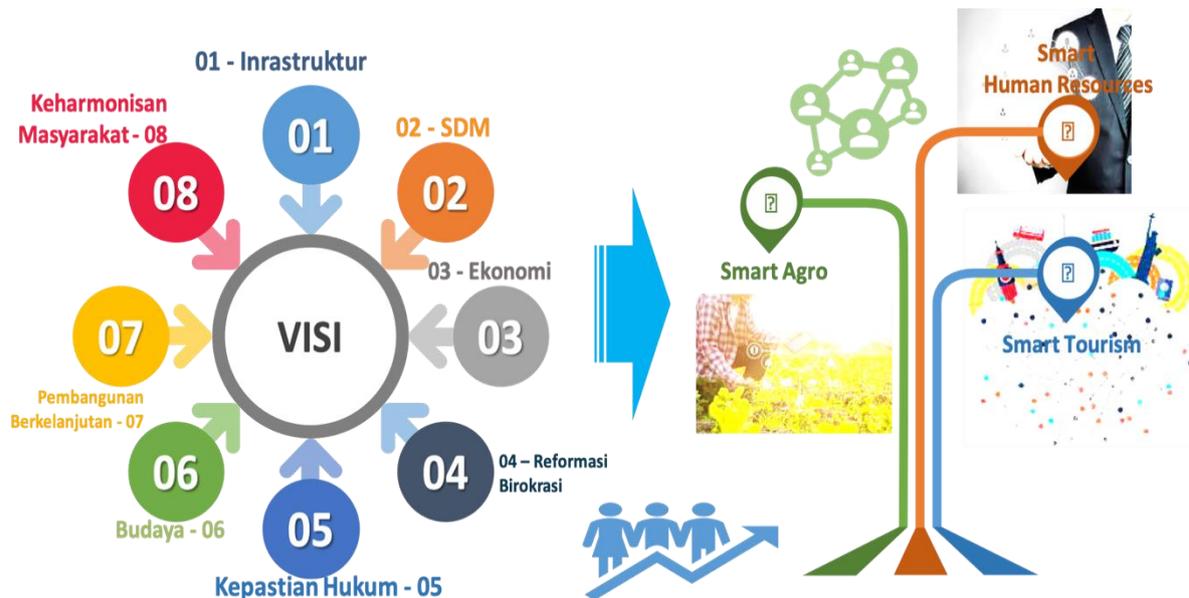
SMART TOURISM

Dengan adanya perkembangan IT yang sangat cepat maka hal ini harus mampu dimanfaatkan juga dalam pengembangan potensi-potensi pariwisata daerah. Dalam industri pariwisata telah menciptakan lingkungan baru dalam dunia pariwisata platform pariwisata ICT terintegrasi. Platform tersebut mengintegrasikan peran teknologi informasi dalam memberikan informasi dan layanan yang efisien untuk wisatawan.

Pembangunan sektor pariwisata terutama daerah wisata alam baik yang secara alami sudah ada (*By Nature*) maupun melalui pembangunan tempat wisata baru (*Artificial*) harus padukan dengan kekayaan budaya dan adat istiadat lokal yang berlaku serta teknologi informasi dengan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan sekitarnya.



Dengan ketiga (3) konsep diatas harus mampu dikaitkan dengan capaian visi dan misi, sebagai bentuk implementasi secara riil akan dilaksanakan dalam pembangunan jangka menengah. Keterkaitan 3 (tiga) konsep dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah dalam periode 2019-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 5.3
Keterkaitan antara Visi, Misi, Smart Agro, Smart Human Resources, Smart Tourism

5.3. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra OPD untuk periode 5 tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:



Tabel 5.1
Rumusan tujuan dan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)			
Misi/Tujuan	Indikator	Data Awal	Kondisi Akhir
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional			
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur	42	49,44
Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)			
Meningkatkan daya saing SDM	IPM	70,81	71,99
Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah			
Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah	LPE	3,36	6,90
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat kemiskinan	4,75	3,55
Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi			
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	na	66
Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)			
Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI			
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Angka Kriminalitas yang tertangani	76,54	80
Misi 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal			
meningkatkan pelestarian budaya daerah	Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	20	40
Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	0,5	2,5
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76	76,93

Dengan rumusan tujuan dan indikator pada tabel diatas, maka dirumuskan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Gunung Mas dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus,



terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas

Infrastruktur merupakan salah satu pendukung dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk melengkapi dan mendukung aktivitas masyarakat, terutama mendukung untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa infrastruktur yang ingin ditekankan adalah dengan pembangunan seperti pemeliharaan jalan dan jembatan, sanitasi, penyediaan air baku, perumahan dan pemukiman yang layak, dsb. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui **sasaran sebagai berikut:**

- Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan dan komunikasi, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Konektivitas Wilayah; dan
- Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Rasio rumah layak huni.

2. Tujuan 2: Meningkatnya daya saing SDM

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan perekonomian, untuk memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas. Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pendidikan.
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kesehatan.



- Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

3. Tujuan 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

Ekonomi merupakan salah satu pendukung yang cukup krusial dalam pembangunan daerah. Perekonomian Kabupaten Gunung Mas cukup mempunyai pergerakan yang baik, hal ini terlihat dengan adanya pembangunan infrastruktur ekonomi bagi masyarakat kecil. Penanaman modal atau investasi sudah diketahui bahwa memiliki peran penting bagi kemajuan daerah. Hal ini dikarenakan investasi merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya investasi turut membentuk jalannya kegiatan perekonomian sehari-hari. Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan investasi daerah, dicapai. Menindaklanjuti hal ini tujuan dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism), keberhasilan sasaran ini diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata;
- Meningkatnya kualitas dan daya saing investasi daerah, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi;

4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Kualitas hidup masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian masyarakat. Dengan kondisi saat ini perekonomian masyarakat sangat bergejolak terutama dikarenakan imbas Covid-19



yang memukul perekonomian dunia dan nasional sedikit banyak memengaruhi perekonomian daerah. Perekonomian masyarakat sangat bergantung dengan produktivitas masyarakat, apa, bagaimana dan berapa yang dapat dihasilkan sebagai pendapatan masyarakat inilah yang secara signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan ini maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, keberhasilan sasaran ini diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
- Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Gini dan Pendapatan per Kapita.

5. Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel

Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan *public* untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP; dan
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat.

6. Tujuan 6 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat

Lingkungan yang aman dan nyaman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. lingkungan yang aman dan nyaman memberikan dampak yang cukup bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan rendahnya tingkat kriminalitas mampu mengindikasikan tingkat kebahagiaan masyarakat. Mengingat pentingnya hal ini, dalam pencapaian tujuan dilaksanakan melalui sasaran sebagai berikut:



- Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Angka Kriminalitas yang tertangani.

7. Tujuan 6 : Meningkatkan pelestarian budaya daerah

Pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Gunung Mas khususnya terkait dengan pelestarian budaya adat dayak sebagai bagian kekayaan budaya nasional dan sendi-sendi tatanan pergaulan hidup masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Selain itu diharapkan hal ini dapat memperkuat kelembagaan adat untuk terpeliharanya nilai-nilai lokal masyarakat adat serta memelihara situs-situs bersejarah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah. Agar tujuan ini tercapai maka dilaksanakan melalui sasaran sebagai berikut:

- meningkatnya pengelolaan budaya daerah sebagai potensi wisata alam dan wisata sejarah, pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah

8. Tujuan 7: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Lingkungan menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia, yang perlu dijaga dan dilestarikan. Pembangunan yang dilakukan saat ini harus diiringi dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar kelangsungan dan kelestarian alam dalam keseimbangan pembangunan dapat terjaga, sehingga pembangunan tidak hanya dapat dirasakan pada saat ini namun sampai masa yang akan datang. Agar tujuan ini tercapai maka dilaksanakan melalui sasaran sebagai berikut:

- Menurunnya pencemaran lingkungan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

Dalam perubahan RPJMD ini dilakukan perbaikan, penajaman dan update penggunaan indikator yang lebih relevan terhadap tujuan, sasaran dan indikator dari RPJMD sebelum perubahan, perubahan sebelum (RPJMD Murni) dan sesudah perubahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Sandingan RPJMD sebelum dan sesudah perubahan

RPJMD MURNI		PERUBAHAN RPJMD	
Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)			
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional		Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional	
Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah	Persentase Luas Kawasan Kumuh	Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian wilayah	Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan dan komunikasi	Indeks Konektivitas Wilayah
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		
	Persentase RT yang terakses air bersih		
	Rasio elektrifikasi		
Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)		Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)	
Meningkatkan daya saing SDM	IPM IPG	Meningkatkan daya saing SDM	IPM
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan
	Harapan lama sekolah		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Angka harapan hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)		
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)
		Menurunnya prevalensi stunting	Angka Pravalensi Stunting
Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah		Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

RPJMD MURNI		PERUBAHAN RPJMD	
Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)			
Misi/Tujuan/Sasaran		Misi/Tujuan/Sasaran	
Indikator Daerah		Indikator Daerah	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah		Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah	
LPE		LPE	
Meningkatnya sektor unggulan daerah	PDRB sektor Pertanian (Milyar Rp)	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	PDRB Sektor pariwisata (Milyar Rp)		
Meningkatnya kualitas daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	Meningkatnya kualitas dan daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi
Meningkatkatnya perekonomian masyarakat	Tingkat kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Tingkat kemiskinan
Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini
			Pendapatan per Kapita
Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi		Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi	
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP
	Opini BPK		Opini BPK
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)		Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)	



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

RPJMD MURNI		PERUBAHAN RPJMD	
Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)			
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah
Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI		Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI	
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Angka Kriminalitas yang tertangani
Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat	Penurunan Jumlah Tindak Pidana
Misi 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal		Misi 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	
meningkatkan pelestarian budaya daerah	Persentase budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	Meningkatkan pelestarian budaya daerah	budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya
meningkatnya pengelolaan budaya daerah	Jumlah event penyelenggaraan budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan
		Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
		Membangun Pariwisata berkelanjutan berbasis potensi daerah	Pertumbuhan destinasi wisata daerah
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)		Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air
	Indeks Kualitas Udara		Indeks Kualitas Udara
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		Indeks Kualitas Tutupan Lahan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator diatas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel 5.3

Keterkaitan antara Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)

PERUBAHAN RPJMD		SATUAN	Realisasi	TARGET					Kondisi Akhir
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah		2020	2021	2022	2023	2024		
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional									
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur	-	42	44,82	46,36	47,90	49,44	49,44	
Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan	Indeks Konektivitas Wilayah	-	60	62,50	65,00	67,50	70,00	70,00	
Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat	Rasio rumah layak huni	%	26,56	27,14	27,72	28,3	28,88	28,88	
Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)									
Meningkatkan daya saing SDM	IPM	-	70,81	71,13	71,41	71,70	71,99	71,99	
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	-	63,19	63,25	63,43	63,62	63,80	63,80	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	77,54	77,63	77,76	77,89	78,02	78,02	



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)										
PERUBAHAN RPJMD			SATUAN	Realisasi	TARGET					Kondisi Akhir
Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Daerah		2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	%	88,22	89,58	89,90	90,15	90,45	90,45	
	Menurunnya prevalensi stunting	Angka Pravalensi Stunting	%	22,87	21,56	18,55	16,01	13,94	13,94	
Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah										
Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah		LPE	%	3,36	4,5	5,18	6,09	7,00	7,00	
	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,65	4,56	5,47	6,38	7,29	7,29	
	Meningkatnya kualitas dan daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10	20	25	30	35	35	
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		Tingkat kemiskinan	%	4,75	4,52	4,26	4	3,8	3,8	
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,37	2,25	2,12	2,00	2,00	



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)									
PERUBAHAN RPJMD		SATUAN	Realisasi	TARGET					Kondisi Akhir
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah		2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	-	0,279	0,263	0,257	0,25	0,24	0,24
		Pendapatan per Kapita	Ribu/Kapita/Tahun	10.793	11.056	11.238	11.421	11.603	11.603
Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi									
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	-	60	62	64	66	68	68
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	-	B	B	B	BB	BB	BB
		Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77,53	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)
Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)									
Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI									
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat		Angka Kriminalitas yang tertangani	-	76,54	77	78	79	80	80
	Meningkatnya rasa aman di	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	81	75	70	65	60	60



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)									
PERUBAHAN RPJMD		SATUAN	Realisasi	TARGET					Kondisi Akhir
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah		2020	2021	2022	2023	2024		
	kalangan masyarakat								
Misi 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal									
Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	%	20	25	30	35	40	40	
	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	-	NA	28	37	48	60	60	
Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	0,5	1	1,5	2	2,5	2,5	
	Membangun Pariwisata berkelanjutan berbasis potensi daerah	-	8	9	10	11	12	12	
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)									
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	76	76,90	76,91	76,92	76,93	76,93	



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)									
PERUBAHAN RPJMD		SATUAN	Realisasi	TARGET				Kondisi Akhir	
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah		2020	2021	2022	2023	2024		
	Menurunnya pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	%	46	46,69	46,70	46,71	46,72	76,72
		Indeks Kualitas Udara	%	89	89,5	89,6	89,7	89,8	89,8
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	90	90,15	90,2	90,25	90,30	90,30



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Dalam rangka mendukung pembangunan dari pusat, maka Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti dengan adanya sinkronisasi kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Gunung Mas. Konsistensi antara visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Tabel 5.4
Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas terhadap
Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah**

No	RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026	RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024
	Visi: Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis	Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (Berjuang Bersama)
1	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	Misi 1 : Meningkatkan dan mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Proposional. Misi 7 : Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
2	Misi 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global	Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah
3	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	Misi 4 : Mempercepat Reformasi Birokrasi
4	Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
5	Misi 5 : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	Misi 5 : Penegakan dan Jaminan Kepastian Hukum (law Enforcement) Misi 6 : Mengembangkan nilai-nilai Budaya kearifan Lokal. Misi 8 : Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat Dalam Kerangka NKRI.



- BAB VI -

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD Kabupaten Gunung Mas telah dilaksanakan melalui RKPД tahun 2020 dan 2021. Dengan dinamika pembangunan yang terus berkembang permasalahan dan isu strategis yang mengiringi perlu adanya strategi dan arah kebijakan yang komprehensif dan tepat untuk mengatasi dan mewaspadai permasalahan dan isu yang sedang berkembang. Menindaklanjuti hal tersebut maka dalam perubahan RPJMD ini dilakukan penajaman strategi dan arah kebijakan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini, selain itu perlu adanya penyesuaian program pembangunan daerah untuk menindaklanjuti Permendagri no. 90 tahun 2019. Dengan strategi dan arah pembangunan yang tepat maka diharapkan akan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.

6.1. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019–2024, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1
Strategi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024**

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)		
MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional		
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan dan komunikasi	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RTRW
	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat	
Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)		
Meningkatkan daya saing SDM	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak
	Menurunnya prevalensi stunting	Melaksanakan aksi konvergensi
Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah		
Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)		
MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya kualitas dan daya saing investasi daerah	
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kapasitas dan kelayakan pendapatan tenaga kerja
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	
Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi		
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Optimalisasi teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)		
Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI		
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan wilayah
Misi 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal		
Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya
Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	Membangun Pariwisata berkelanjutan berbasis potensi daerah	
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan	Mewujudkan ketahanan lingkungan hidup

Penjelasan masing-masing strategi pada perencanaan pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:



1. Strategi 1, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RTRW

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk percepatan pembangunan dan memberikan kemudahan akses masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah. Melalui infrastruktur yang memadai nantinya tidak ada lagi daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau, hal ini untuk memudahkan distribusi orang dan barang dari dan ke luar daerah. Kabupaten Gunung Mas perlu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas terutama di wilayah-wilayah terpencil agar masyarakat semakin sejahtera. Infrastruktur dasar merupakan sarana dan prasarana yang difasilitasi Pemerintah daerah untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari. Sedangkan aksesibilitas adalah suatu ukuran untuk mudahnya suatu tempat dicapai. Infrastruktur dasar terdiri atas air bersih, listrik, telekomunikasi, sampah, drainase, sanitasi, dan jalan. Sedangkan aksesibilitas terdiri atas sarana prasarana perhubungan. Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas yang dibangun dengan merata akan berdampak pada taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Interkoneksi antara wilayah yang berperan sebagai pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dilakukan melalui pengembangan jaringan jalan dan pembangunan sarana prasarana transportasi yang saling terintegrasi. Pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan tata ruang dan wilayah Kabupaten Gunung Mas agar pembangunan terlaksana secara terpadu.

2. Strategi 2, Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan

Mengenyam pendidikan menjadi hak semua warga negara. Peningkatan pelayanan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kabupaten Gunung Mas berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara membangun sarana dan prasarana penunjang seperti



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

gedung sekolah, perumahan guru dan lainnya. Selain itu juga, memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik dan pengajar khususnya di daerah terpencil. Dikarenakan akses yang sulit menuju daerah terpencil di Kabupaten Gunung Mas, sehingga fasilitas pendidikan menjadi hal pokok untuk terpenuhi.

3. Strategi 3, Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas

Kesehatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Terlebih dengan adanya Covid-19 berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk menangani dan mencegah Covid-19, bahkan pemerintah daerah perlu melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Dengan ini Kabupaten Gunung Mas juga harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di daerah terpencil. Pasalnya, hingga saat ini pelayanan kesehatan masih belum maksimal masih belum memenuhi harapan masyarakat. Perlu peningkatan akses dengan fasilitas kesehatan yang memadai, hal ini dilakukan untuk masyarakat semakin mudah dalam menjangkau fasilitas kesehatan. Dengan ini diharapkan masyarakat yang sedang sakit dapat lebih cepat ditangani oleh tenaga kesehatan.

4. Strategi 4, Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak

Perempuan mempunyai peran dalam pembangunan baik sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan. Dalam keluarga, kaum perempuan merupakan tiang keluarga, yang akan melahirkan dan mendidik generasi penerus. Kualitas generasi penerus bangsa ditentukan oleh kualitas kaum perempuan sehingga mau tidak mau kaum perempuan harus meningkatkan kualitas pribadi masing-masing. Kualitas pendidikan perempuan juga merupakan aspek yang sangat penting bagi pembangunan



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

bangsa. Kaum perempuan harus berusaha meraih jenjang pendidikan setinggi mungkin. Peningkatan derajat kesehatan perempuan juga seiring dengan upaya peningkatan akses pendidikan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan. Masih banyak peran maupun profesi perempuan yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk melibatkan perempuan dalam setiap aspek pembangunan, sebagai upaya untuk meningkatkan derajat perempuan setara dengan laki-laki.

5. Strategi 5, Pelaksanaan aksi konvergensi

Aksi Konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam pencegahan dan penurunan stunting. Aksi konvergensi sering juga disebut sebagai Aksi Integrasi. Aksi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran yaitu rumah tangga 1.000 HPK dengan lebih efektif. Aksi Konvergensi terdiri dari 8 (delapan) aksi, yaitu:

- Aksi 1- Analisis Situasi; identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi.
- Aksi 2- Rencana Kegiatan; menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan intervensi gizi.
- Aksi 3- Rembuk Stunting; menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten.
- Aksi 4- Peraturan Bupati tentang Peran Desa; memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.
- Aksi 5- Pembinaan KKPM; memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

- Aksi 6- Sistem Manajemen Data; meningkatkan system pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten.
- Aksi 7- Pengukuran dan Publikasi Stunting; melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting di kabupaten.
- Aksi 8- Reviu Kinerja Tahunan; melakukan reviu kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

6. Strategi 6, Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah

Melihat kondisi saat ini salah satu komoditi unggulan Kabupaten Gunung Mas adalah pertanian dan turunannya (perkebunan, perternakan, dan perikanan). Dengan ini diharapkan menjadikan Kabupaten Gunung Mas daerah yang mandiri pangan dan meningkatkan taraf hidup petani. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk melakukan kegiatan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan kabupaten Gunung Mas untuk dikembangkan. Pengembangan sektor tanaman pangan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sumber kehidupan bagi masyarakat Gunung Mas. Selain pertanian, salah satu sektor yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang dapat menjadi potensi ekonomi kerakyatan karena dapat melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaannya. Di Kabupaten Gunung Mas banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan antara lain wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Banyak potensi wisata yang perlu dikembang oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Pertumbuhan ekonomi dapat



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Sektor lain yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi adalah sektor industri. Seperti diketahui, sektor industri khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) dapat mewujudkan ekonomi kerakyatan karena kegiatan usaha yang menampung lapangan kerja yang cukup banyak. Selain itu pengembangan IKM dapat menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan, kecamatan, kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah. Pengembangan sentra-sentra produk unggulan dapat mempercepat pengembangan ekonomi kerakyatan yang penting dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

7. Strategi 7, Peningkatan kapasitas dan kelayakan pendapatan tenaga kerja

Dunia kerja saat ini menuntut perusahaan untuk mencari pekerja yang berkualitas dan unggul, sehingga Pemerintah kabupaten Gunung Mas berupaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Peningkatan daya saing tenaga kerja sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Sehingga pembangunan SDM perlu mendapat perhatian sedini mungkin sejak di bangku sekolah. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi.

Selain mempersiapkan dari segi SDM, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakatnya. Perluasan kesempatan kerja ini berupa menciptakan lapangan pekerjaan baru maupun mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Perluasan kesempatan kerja oleh Pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dapat memanfaatkan sektor-sektor unggulan sebagai objek kerja. Lapangan perkerjaan di sektor pertanian menampung banyak tenaga kerja di Kabupaten Gunung Mas.



8. Strategi 8, Optimalisasi teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kabupaten Gunung Mas pernah menjadi *pilot project* reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Dalam implementasinya, Kabupaten Gunung Mas dianggap berhasil dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Diharapkan reformasi birokrasi dapat dimaksimalkan oleh aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Sehingga mewujudkan Pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

9. Strategi 9, Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan wilayah

Keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk hidup dalam suatu lingkungan yang kondusif. Dalam rangka meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah dan warga masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan dengan meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilakukan dengan upaya pencegahan gangguan Kamtibmas. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

menumbuhkan kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap dilingkungannya masing-masing.

10. Strategi 10, Mewujudkan masyarakat yang berbudaya

Nilai budaya suatu daerah memiliki nilai yang begitu besar karena kebudayaan merupakan ciri khas daerah masing-masing. Pelestarian kebudayaan daerah merupakan strategi untuk menjaga nilai-nilai budaya tersebut tetap utuh agar bisa dinikmati anak cucu. Kabupaten Gunung Mas masih memiliki kebudayaan yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melestarikan kebudayaan Kabupaten Gunung Mas antara lain melalui inventarisasi cagar budaya, festival budaya dan wisata budaya.

Selain itu, Kabupaten yang masih dihuni suku Dayak ini memiliki upacara adat yang terkenal, yaitu Upacara Tiwah atau Tiwah Lale atau Magah Salumpuk liau Uluh Matei, yaitu upacara sakral terbesar untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang letaknya di langit ke tujuh. Kebudayaan ini diharapkan tetap lestari sehingga bisa menjadi kekayaan luhur masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

11. Strategi 11, Mewujudkan ketahanan lingkungan hidup

Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup merupakan kondisi yang mendukung keberlangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Jumlah manusia sampai saat ini terus bertambah dan berkembang, menjadi sebuah rangkaian ekosistem kehidupan manusia. Dengan pembangunan yang diininkan manusia dan alam sering terjadi benturan antara pembanguna yang dilakukan manusia dan daya dukung lingkungan, pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan atau ketimpangan ekologi. Untuk itu,



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

perlu adanya Keserasian, keseimbangan dan daya dukung lingkungan perlu diperhatikan untuk mendapat lingkungan hidup yang berkualitas.

Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk mengelola kualitas lingkungan hidup agar menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat yang tinggal. Peningkatan kualitas air, udara dan tanah menjadi pekerjaan rumah yang dilakukan untuk tetap lestari. Kualitas air bisa dilihat dari kualitas air sungai Kabupaten Gunung Mas yang masih masuk kategori 2 atau bisa dikonsumsi namun harus melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Kualitas udara bisa dilihat dari masih banyak kawasan hutan yang lestari sebagai penyaring udara di Kabupaten Gunung Mas. Selain itu, kawasan hutan lindung menjadi perhatian untuk dijaga ekosistemnya sehingga bisa menjadi rumah bagi flora dan fauna. Kualitas tanah bisa dilihat dari pengelolaan sampah masyarakat, bahwasanya sampah organik bisa ditimbun dalam tanah sebagai kompos alami, sedangkan sampah non organik sebaiknya dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Selain itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, dan provinsi Kalimantan Tengah termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus dan tema pertahun ini disusun agar Kepala daerah mengerti fokus permasalahan yang harus diselesaikan per tahun. Dikarenakan semua masalah tidak mungkin diselesaikan dalam satu waktu, sehingga perlu dibagi dalam lima tahun kinerja. Program dan kegiatan sesuai fokus dan tema pembangunan dilakukan setiap tahun oleh PD terkait. RPJMD Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2024 telah dilaksanakan dalam RKPD 2020 dan 2021. Pada perubahan RPJMD pembangunan difokuskan untuk tahun 2022-2024. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Gambar 6.1.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024



Gambar 6.1 Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Masing-masing tema di atas memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2024. Penjelasan dari masing-masing tema adalah sebagai berikut.

1) Arah Pembangunan Tahun 2020

Dengan melanjutkan pembangunan tahun 2019, pada tahun 2020 ini pembangunan Kabupaten Gunung Mas menitikberatkan pada pembangunan masyarakat yang berbudi luhur. Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat karena pada tahun ini terjadi wabah penyakit yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia dan Kabupaten Gunung Mas. Dampak yang cukup terasa pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam rangka menangani hal tersebut maka tema pembangunan pada tahun 2020 ini adalah



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

“Meningkatkan Pembangunan Gunung Mas yang Berkelanjutan”. Dengan tema ini beberapa fokus pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas sumberdaya masyarakat
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel
6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat yang harmonis dalam BINGKAI HUMA BETANG dan FALSAFAH BELUM BAHADAT
7. Mengedepankan keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan

2) Arah Pembangunan Tahun 2021

Pembangunan tahun 2021 ini merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2020 yang berfokus pada pembangunan di beberapa bidang yang cukup strategis dan diharapkan memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021 dampak Covid-19 masih cukup terasa. Dengan ini pembangunan akan dilakukan pada bidang SDM, Ekonomi, infrastruktur, Pemerintahan dan lingkungan hidup. Pada tahun 2021 Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu mempercepat pembangunan fisik, ekonomi, sosial. Sesuai pernyataan diatas, maka tema pembangunan tahun 2021 ini adalah **“Percepatan Pembangunan Gunung Mas yang Stabil”**. Untun menyaimbangkan pemulihan pada bidang-bidang yang terdampak Covid-19 maka Pembangunan yang stabil diperlukan dalam proses percepatan pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam percepatan



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

semua sector harus berjalan beriringan secara seimbang, sehingga percepatan pembangunan dan pemulihan sektor yang terdampak Covid-19 dapat segera pulih, dengan ini arah kebijakan/prioritas pembangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas (keterkaitan) wilayah
2. Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
3. Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu
4. Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
5. Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas
6. Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan
7. Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
8. Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian

3) Arah Pembangunan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 merupakan kelanjutan pembangunan tahun 2021, pada tahun ini pembangunan menitikberatkan pada pembangunan bidang SDM, Ekonomi dan Infrastruktur. Dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, diharapkan dampak Covid-19 sudah mereda, dan perekonomian dapat bangkit dan aktivitas masyarakat dapat lebih produktif. Dengan pembangunan ini diharapkan masyarakat Gunung Mas mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan daerah. Sesuai pernyataan diatas maka tema pembangunan pada tahun 2022 ini adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Pembangunan Gunung Mas”**. Dengan tema ini pembangunan di Kabupaten Gunung Mas diharapkan



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

mampu mengeksplorasi dan mengembangkan dan mengelola dengan maksimal segala sumber daya daerah dan potensi-potensi unggulan daerah agar mampu bersaing dengan produk-produk dari daerah lain. Dengan ini arah kebijakan/prioritas pembangunan tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas (keterkaitan) wilayah
2. Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
3. Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu
4. Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
5. Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas
6. Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya
7. Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan
8. Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
9. Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian
10. Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan

4) Arah Pembangunan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 merupakan kelanjutan pembangunan tahun 2022, pada tahun ini pembangunan menitikberatkan pada pembangunan bidang SDM, Ekonomi, Infrastruktur dan Pemerintahan. Pada tahun ini pembangunan Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sesuai pernyataan diatas tema pembangunan tahun 2023 ini adalah **“Peningkatan kualitas dan Pemerataan pembangunan Gunung Mas”**. Dengan ini diharapkan



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

pembangunan 2023 masyarakat Gunung Mas menjadi masyarakat yang lebih produktif. Sehingga pemberdayaan masyarakat diberbagai lapisan dapat dilaksanakan dengan optimal dan diharapkan perekonomian masyarakat merata terutama masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah, dengan ini arah kebijakan/prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
2. Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas
3. Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya
4. Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi
5. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat
6. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah
7. Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik
8. Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan
9. Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan

5) Arah Pembangunan Tahun 2024

Dengan pembangunan berbagai bidang telah dilaksanakan pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 maka pada tahun 2024 ini pembangunan dilakukan dengan berfokus pada beberapa bidang pembangunan yang menyeluruh. Sehingga diharapkan akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan sektor unggulan daerah, mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan pernyataan diatas maka tema pembangunan pada tahun 2024 ini adalah “**Menjadi Gunung Mas yang Bermartabat, Maju, berdaya saing, Sejahtera dan Mandiri**”. Dengan pembangunan yang dilakukan secara optimal, efektif, efisien diharapkan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

masyarakat Kabupaten Gunung Mas dapat lebih sejahtera. Dengan ini arah kebijakan/prioritas pembangunan tahun ini adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
2. Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya
3. Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi
4. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat
5. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah
6. Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik
7. Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan
8. Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan



Tabel 6.2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional						
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan dan komunikasi	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RTRW	Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas (keterkaitan) wilayah			
	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat		Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman			
Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)						
Meningkatkan daya saing SDM	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan	Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas			
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu			
			Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif			
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan keterampilan perempuan dan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)				



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024
	Menurunnya prevalensi stunting	Pelaksanaan aksi konvergensi	Mendukung 8 aksi konvergensi KP2S			
Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah						
Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas			
	Meningkatnya kualitas dan daya saing investasi daerah		Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi			
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kapasitas dan kelayakan pendapatan tenaga kerja	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan			
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat			
Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi						
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Optimalisasi teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan	Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah			
			Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah			



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)						
MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	2022	2023	2024
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik			
Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)						
Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI						
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan wilayah	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian			
Misi 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal						
Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan			
Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	Membangun Pariwisata berkelanjutan berbasis potensi daerah	Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah.	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya			
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)						
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan	Mewujudkan ketahanan lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan			



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**



6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

6.3.1. Pengembangan Potensi Prioritas di Kabupaten Gunung Mas

Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Pembangunan kewilayahan ini ditinjau berdasarkan dokumen perencanaan pada level nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, tinjauan-tinjauan dan data pendukung lainnya sebagai bagian dari proses pembangunan. Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) sangat diperlukan untuk menentukan daerah-daerah potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564 km². Pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah menjadi 14 kabupaten/kota. Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan beraneka ragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan. Potensi utama dari Kalimantan Tengah adalah sekitar 80% dari luas lahan yang tertutup hutan hujan tropis (124.118, 49 km²). Dengan berbagai macam vegetasi tropis dan kondisi geografis yang strategis, merupakan potensi bagi daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, komoditi pertanian dan pertambangan di Kalimantan Tengah masih cukup stabil, sehingga dapat dikembangkan menjadi industri hulu.

Pengembangan potensi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pembagian wilayah atau zonasi. Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan **Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah**, yang dibagi menjadi **3 Zona**. Antara lain **Zona 1 (Barat)**, **Zona 2 (Tengah)**, dan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Zona 3 (Timur), dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut:

**Tabel 6.4.
Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah**

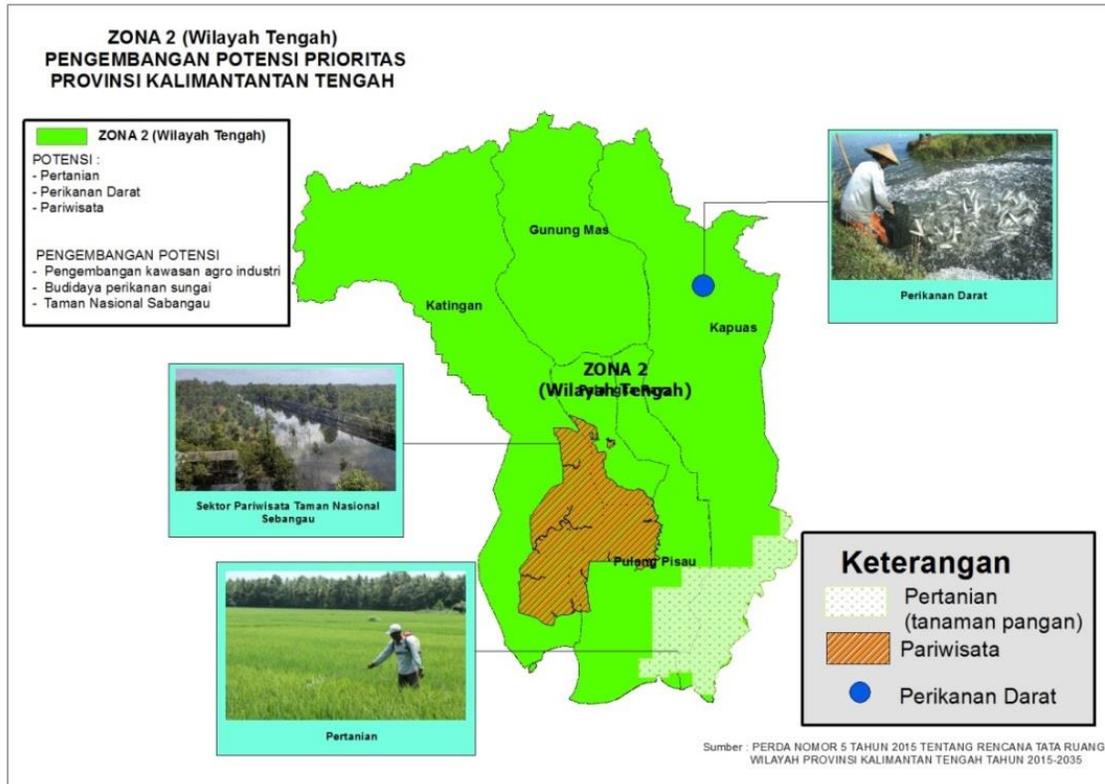
No	Zona	Kabupaten/Kota	Potensi	Pengembangan Potensi
1	Zona 1 (Barat)	<ul style="list-style-type: none"> • Sukamara • Lamandau • Kotawaringin Barat • Seruyan • Kotawaringin Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelapa Sawit (CPO) - Pertambangan (baja, nikel, lumina, dll) - Perikanan tangkap - Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Industri berbasis sawit ➤ Industri berbasis metal ➤ Industri berbasis perikanan tangkap ➤ Taman Nasional Tanjung Puting
2	Zona 2 (Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> • Katingan • Gunung Mas • Palangka Raya • Pulang Pisau • Kapuas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian (tanaman pangan) - Perikanan darat - Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan kawasan argo industri Batanjung di Kapuas) ➤ Budidaya perikanan sungai ➤ Taman Nasional Sebangau
3	Zona 3 (Timur)	<ul style="list-style-type: none"> • Murung Raya • Barito Utara • Barito Selatan • Barito Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Batubara - Hasil hutan (kayu, rotan, dll) - Karet - HOB (<i>Heart Of Borneo</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangkit tenaga listrik ➤ Industri berbasis hasil hutan ➤ Industri berbasis karet (<i>rubber industry</i>) ➤ Konservasi Hayati di pegunungan <i>Muller Schwaner</i>

Sumber: Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035

Secara spasial, pengembangan potensi prioritas dan pengembangan potensi masing-masing zona di Kalimantan Tengah melalui pembagian wilayah atau zonasi dapat dilihat pada gambar berikut:



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024



Sumber : Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalteng 2015-2035

Gambar 6.2. Pengembangan Potensi (Kabupaten Katingan, Gunung Mas, Palangka Raya, Pulang Pisau, Kapuas)

Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi daerah yaitu pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan. Perdagangan, pariwisata, dan transportasi. Kabupaten Gunung Mas memiliki sumberdaya alam yang potensial khususnya pada hasil pertambangan. Bahan tambang yang terdapat di Gunung Mas cukup potensial terdiri atas mineral logam, batubara, dan bahan galian golongan C.

Dari berbagai sektor tersebut Sektor perkebunan menjadi sektor unggulan Kabupaten Gunung Mas dengan **komoditi utama karet**. Perkebunan karet merupakan komoditi perkebunan yang banyak diusahakan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

di Kabupaten Gunung Mas. Usaha budidaya karet merupakan usaha yang turun-temurun di masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Proses perkembangan karet di Kabupaten Gunung Mas dapat dikatakan sangat bagus. Hal ini disebabkan adanya dukungan pemerintah serta pasar yang terbuka lebar. Cukup banyak lembaga keuangan/perbankan yang memfasilitasi permodalan untuk budidaya karet. Prospek budidaya karet semakin baik sebab kualitas karet Mentah Kabupaten Gunung Mas cukup bagus. Dari segi budidaya juga mudah. Para petani cukup memahami cara pengelolaan bahan baku, tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak memerlukan peralatan canggih.

Tabel 6.5.

**Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Karet
Kabupaten Gunung Mas**

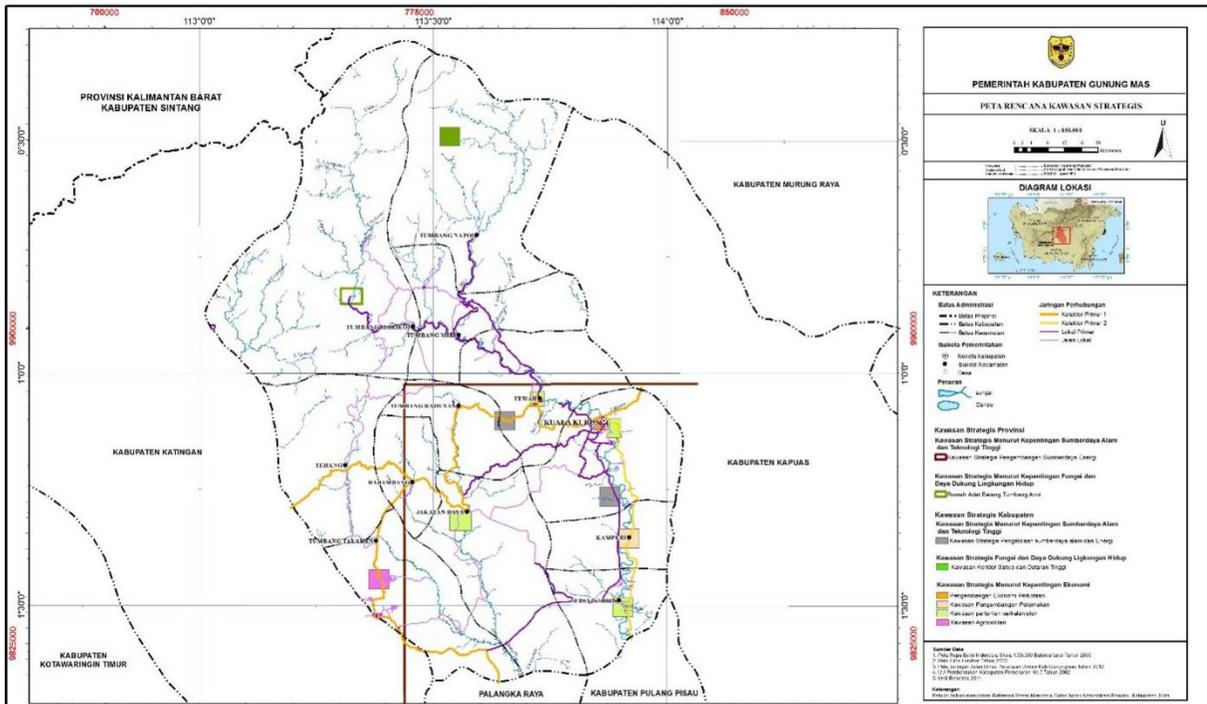
Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lahan untuk pengembangan tersedia luas. ▪ Masyarakat familiar dengan karet, karena sebagian besar masyarakat bergerak di sektor pertanian. ▪ Transportasi lancar. ▪ Dukungan pemerintah cukup tinggi. ▪ Prospek cukup bagus karena kualitas karet mentah cukup bagus. Karenanya pasar cukup mudah. ▪ Sumber permodalan sebenarnya banyak baik dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Perbankan mendukung komoditi ini 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Harga yang masih fluktuatif. ▪ Belum adanya asosiasi sebagai wadah koordinasi antar petani karet. ▪ Kualitas SDM masih rendah pengendalian harga dan mutu masih kurang. ▪ Belum terdapat industri pengolahan karet yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, sehingga mata rantai pemasaran menjadi lebih panjang.
Titik Kekuatan	Titik Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teknologi produksi/pengolahan karet yang selalu dikembangkan. ▪ Para petani memahami cara pengolahan bahan baku, tidak memerlukan keahlian khusus dan cukup mudah, juga tidak memerlukan peralatan yang canggih. ▪ Pasokan cukup banyak karena area perkebunan cukup luas. ▪ Hanya sampai pengelolaan sloop karet tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak adanya kontrol kualitas terhadap bibit lokal/tidak (bibit unggul) juga dalam hal peremajaan dari instansi terkait. ▪ Pemasaran tergantung tengkulak, dikuasai oleh jaringan-jaringan tertentu. ▪ Proses produksi yang agak lama dan dikelola secara tradisional. ▪ Kurangnya sarana distribusi seperti angkutan. ▪ Manajemen usaha yang masih sederhana.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

6.3.2. Prioritas Pembangunan Kewilayahan di Kabupaten Gunung Mas

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Gunung Mas, terdapat peta yang menggambarkan kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten di Pemerintahan Gunung Mas. Gambaran Peta adalah sebagai berikut.



Gambar 6.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Gunung Mas

Dilihat pada tabel di atas digambarkan bahwa, kawasan strategis menurut kepentingan ekonomi terbagi menjadi empat antara lain: Pengembangan ekonomi perkotaan, kawasan pengembangan peternakan, kawasan pertanian berkelanjutan, dan kawasan agropolitan. Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan mendominasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang diandai dengan warna hijau muda. Menurut peta kawasan strategis di atas, pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan terdapat pada empat titik yaitu Kuala Kurun, Jakatan Raya, Sepang Simin, dan Tewah.



6.3.3. Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Gunung Mas

Mengikuti arus jaman yang sudah memasuki era Industri 4.0. Kabupaten Gunung Mas berupaya untuk mengatur strategi dalam menyambut era tersebut. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat dalam menghadapi era Industri 4.0. diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur kelistrikan bersumber dari energi baru terbarukan yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 2 Desa yaitu Desa Bangun Sari Kecamatan Manuhing sebanyak 127 Unit, Desa T Mujai Kecamatan Rungan sebanyak 45 Unit.
2. Pengembangan kawasan dan Kegiatan Perhutanan Sosial di Kabupaten Gunung Mas yaitu:
 - a. 1 (satu) unit TAHURA TAPAK BARU luas \pm 5.000 ha.
 - b. 2 (dua) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) luas \pm 2.400 ha.
 - c. 11 (sebelas) Hutan Kemasyarakatan (HKM) luas \pm 9.354 ha.
 - d. 6 (enam) Hutan Desa (HD) luas \pm 4.296 ha.
3. Inovasi pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas. Dalam hal inovasi pelayanan diharapkan Pemerintahan Gunung Mas meluncurkan sistem pelayanan di bidang perdagangan dan industri kecil menengah. Sistem pelayanan berbasis aplikasi ini dapat memudahkan perizinan bagi pelaku usaha serta sebagai sarana promosi bagi barang-barang milik UKM.
4. Pengembangan Program untuk pembuatan TPA menggunakan metode *Sanitary landfill*.

Sanitary Landfill adalah sistem pengelolaan (pemusnahan) sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya, dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Metode ini efektif untuk mengurangi bau tidak sedap juga mencegah berkembangnya



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

bibit penyakit yang ada dalam sampah tidak sampai ke wilayah pemukiman.

6.4. Program Pembangunan Daerah Untuk Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024. Program-program pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2019-2024 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Berikut rumusan program pembangunan daerah yang dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra PD dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah (Lampiran I tabel 6.6).

TABEL 6.5
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Indikator, target dan Pagu Tahun 2020-2024

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL RPJMD	2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNGJAWAB	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Visi: Terwujudnya Kabupaten gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (BERJUANG BERSAMA)																				
Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional																				
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan dan komunikasi	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RTRW	Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan Telekomunikasi (satuan:%)	90	90	2.898.012.909	90	2.898.012.909	90	2.955.973.250	90	3.015.092.715	90	3.075.394.569	90	14.842.486.514	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	penyelenggaraan jalan (Dengan Satuan:%)	90	100	68.110.112.597	100	68.110.112.597	100	69.472.314.849	100	70.861.761.146	100	72.278.996.369	100	348.833.297.558	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat		Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni (Dengan Satuan:%)	90	100	99.977.740	100	99.977.740	100	101.977.295	100	104.016.841	100	106.097.178	100	512.046.794	DINAS PEKERJAAN UMUM	
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	90	100	1.133.932.120	100	1.133.932.120	100	1.156.610.762	100	1.179.742.978	100	1.203.337.837	100	5.807.555.817	DINAS PEKERJAAN UMUM	
Misi 2: Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)																				
Meningkatkan daya saing SDM	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan	Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Dengan Satuan:satuan)	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
					Angka Partisipasi Murni (Dengan Satuan:%)	100	100	74.477.029.440	100	74.477.029.440	100	75.966.570.029	100	77.485.901.429	100	79.035.619.458	100	381.442.149.796	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	terpenuhinya upaya kesehatan masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100	77.069.580.731	100	77.069.580.731	100	78.610.972.346	100	80.183.191.793	100	81.786.855.628	100	394.720.181.229	DINAS KESEHATAN
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	adanya pemberdayaan masyarakat (Dengan Satuan:%)	90	90	570.770.760	90	570.770.760	90	582.186.175	90	593.829.899	90	605.706.497	90	2.923.264.091	DINAS KESEHATAN
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan keterampilan perempuan	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (Satuan:%)	20	20	493.852.570	20	493.852.570	20	503.729.611	20	513.804.204	20	524.080.287	20	2.529.319.222	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Misi 3: Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah																				
Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (satuan:%)	90	90	2.964.396.397	90	2.964.396.397	90	3.023.684.325	90	3.084.158.011	90	3.145.841.172	90	15.182.476.302	DINAS PERTANIAN	
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (satuan:%)	90	90	4.976.995.801	90	4.976.995.801	90	5.076.535.717	90	5.178.066.431	90	5.281.627.760	90	25.490.221.510	DINAS PERTANIAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok nelayan	90	90	3.702.500.438	90	3.702.500.438	90	3.776.550.447	90	3.852.081.456	90	3.929.123.085	90	18.962.755.864	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	

	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)		Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan wisata (satuan: orang/tahun)	1000	1000	1.600.906.012	1000	1.600.906.012	1000	1.632.924.132	1000	1.665.582.615	1000	1.698.894.268	1000	8.199.213.039	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	Meningkatnya kualitas dan daya saing investasi daerah		Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan penanaman modal (satuan: %)	100	100	450.849.160	100	450.849.160	100	459.866.143	100	469.063.466	100	478.444.735	100	2.309.072.664	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kapasitas dan kelayakan pendapatan tenaga kerja	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (satuan: orang/tahun)	100	100	162.518.030	100	162.518.030	100	165.768.391	100	169.083.758	100	172.465.434	100	832.353.643	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (satuan:%)	100	100	596.500.600	100	596.500.600	100	608.430.612	100	620.599.224	100	633.011.209	100	3.055.042.245	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan administrasi pemerintah desa (satuan:%)	90	90	3.312.806.446	90	3.312.806.446	90	3.379.062.575	90	3.446.643.826	90	3.515.576.703	90	16.966.895.996	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Misi 4: Mempercepat reformasi birokrasi																					
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Optimalisasi teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan	Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (satuan:%)	90	100	8.459.377.160	100	8.459.377.160	100	8.628.564.703	100	8.801.135.997	100	8.971.158.717	100	43.325.613.737	SEKRETARIAT DAERAH		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (satuan:satuan)	10	10	101.000.000	10	202.000.000	10	303.000.000	10	404.000.000	10	505.000.000	10	1.515.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN			
				Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (satuan: sdasd)	0	0		0		0		0		0		0					
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (satuan:fgd)	0	0		0		0		0		0		0					
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100	100	2.145.610.909	100	2.145.610.909	100	2.188.523.210	100	2.232.293.673	100	2.276.939.548	100	10.988.978.411	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	OPINI BPK (satuan: jenis)	WTP	WTP	1.033.512.112	WTP	1.033.512.112	WTP	1.054.182.354	WTP	1.075.266.001	WTP	1.096.771.321	WTP	5.293.243.900	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian target pendapatan asli daerah (satuan:%)	100	100	2.303.334.816	100	2.303.334.816	100	2.349.401.512	100	2.396.389.543	100	2.444.317.333	100	11.796.778.020	BADAN PENDAPATAN DAERAH
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindaklanjut temuan (satuan: %)	100	100	2.270.791.400	100	2.270.791.400	100	2.316.207.228	100	2.362.531.372	100	2.409.782.000	100	11.630.103.400	INSPEKTORAT		
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (satuan:%)	100	100	1.559.105.840	100	1.559.105.840	100	1.590.287.957	100	1.622.093.716	100	1.654.535.590	100	7.985.128.943	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan aplikasi informatika (satuan:buah)	10	10	3.164.314.015	10	3.164.314.015	10	3.227.600.295	10	3.292.152.301	10	3.357.995.347	10	16.206.375.973	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Misi 5: Penegakan dan jaminan kepastian hukum (law Enforcement)																			
Misi 8: Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI																			
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Meningkatnya rasa aman di kalangan masyarakat	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan wilayah	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (Dengan Satuan:%)	90	100	2.761.508.990	100	2.761.508.990	100	2.816.739.170	100	2.873.073.953	100	2.930.535.432	100	14.143.366.535	SATPOL PP
Misi 6: Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal																			
Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan budaya daerah	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (satuan : jenis)	5	5	681.610.710	5	681.610.710	5	695.242.924	5	709.147.783	5	723.330.738	5	3.490.942.865	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)																			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya pencemaran lingkungan	Mewujudkan ketahanan lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (Satuan : dokumen)	1	1	160.626.200	1	160.626.200	1	163.838.724	1	167.115.498	1	170.457.808	1	822.664.430	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
						TOTAL P2		43.710.370.025		#####		44.784.537.580		45.775.148.330		46.777.551.299		#####	



- BAB VII -

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang berisi indikasi program serta pagu indikatif program pada Perubahan RPJMD Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPJMD ini, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Indikasi Program merupakan program-program prioritas yang telah dirumuskan dalam Bab sebelumnya, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program tahunan. Indikasi rencana program telah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang mendasari dilakukannya perubahan RPJMD ini serta telah menyesuaikan dengan OPD. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain.

Perumusan indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Program pembangunan dan program OPD dalam perubahan ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target sasaran dan program serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikasi program pada penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2021-2024 sudah berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



7.1. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam satu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah yang masih tersisa selama empat tahun ke depan.

Meskipun mengalami perubahan, RPJMD ini tetap mempunyai arah dan tujuan besar yang sama yaitu selain sebagai penjabaran visi dan misi kepada daerah terpilih, yang tentu juga tetap memedomani RPJPD, RTRW, RPJMN maupun RPJMD Provinsi. Program pembangunan dan program perangkat daerah dalam perubahan ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target sasaran dan program serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pagu indikatif merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Selanjutnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang kemudian dituangkan dalam rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019–2024 secara rinci tercantum pada tabel berikut ini :



Tabel VII.1
Realisasi Tahun 2020 dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2021-2024

No	Uraian	Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
	Kapasitas Riil Keuangan	455.294,3	464.399,8	473.688,0	483.162,4
1	Belanja Operasi	263.450,8	268.719,8	274.094,2	279.576,1
	1.1. Belanja Barang dan Jasa	263.450,8	268.719,8	274.094,2	279.576,1
2	Belanja Modal	191.843,0	195.679,8	199.593,3	203.585,2

Pada tahun 2020, Kerangka APBD masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan pada tahun 2021-2024 sudah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2020, Kapasitas Riil Keuangan Daerah berjumlah Rp 371.129 juta berdasarkan Perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020.

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam perubahan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Rincian program yang mencakup semua urusan adalah sebagai berikut :

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024

2021-09-30

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
				K	Rp	K	Rp									
01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			590.481.373.790		586.163.555.123		602.105.842.770		607.024.192.746		613.961.441.148		2.999.736.405.577		
01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			284.743.761.870		284.743.761.870		288.965.948.525		288.965.948.525		288.965.948.525		1.436.385.369.315		
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			284.743.761.870		284.743.761.870		288.965.948.525		288.965.948.525		288.965.948.525		1.436.385.369.315		
010101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100	210.266.723.430	100	210.266.723.430	100	214.450.889.483	100	214.450.889.483	100	214.450.889.483	100	1.063.886.115.309	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
010102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	terlaksananya pembangunan pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP (Dengan Satuan:%)	100	100	74.477.038.440	100	74.477.038.440	100	74.515.059.042	100	74.515.059.042	100	74.515.059.042	100	372.499.254.006	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
010103	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
010104	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan (Dengan Satuan:%)	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
010105	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
010106	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
01.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			156.398.232.853		150.949.677.026		159.041.756.421		162.279.524.372		165.482.579.108		794.151.769.780		
	DINAS KESEHATAN			156.398.232.853		150.949.677.026		159.041.756.421		162.279.524.372		165.482.579.108		794.151.769.780		
010201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:%)	72,27	76,22	67.054.025.781	77,16	61.368.303.624	78,11	67.145.766.409	79,05	68.434.423.348	80,00	72.749.143.508	80,00	336.751.662.670	DINAS KESEHATAN
010202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular (Dengan Satuan:%)	100	100	77.069.580.731	100	83.437.875.432	100	76.904.477.412	100	78.853.588.424	100	77.741.923.000	100	394.007.444.999	DINAS KESEHATAN
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar (Dengan Satuan:%)	44,54	50,54		60		65		70		75		75	DINAS KESEHATAN	
		Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		100	DINAS KESEHATAN	
		Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:%)	38,21	33,37		29		23,68		18,84		14		19	DINAS KESEHATAN	
010203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	64,42	64,42	11.039.719.691	70	5.339.839.170	80	12.952.262.870	85	12.952.262.870	90	12.952.262.870	90	55.236.347.471	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
010204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UOMT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	64,42	100	664.135.890	100	204.117.560	100	193.447.660	100	193.447.660	100	193.447.660	100	1.448.596.430	DINAS KESEHATAN
010205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan (Dengan Satuan:Kebijakan)	1	3	570.770.760	4	599.541.240	4	1.845.802.070	4	1.845.802.070	4	1.845.802.070	4	6.707.718.210	DINAS KESEHATAN
01.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			115.034.263.178		115.034.263.178		118.334.948.443		119.681.647.411		123.075.280.360		591.160.402.570		
	DINAS PEKERJAAN UMUM			115.034.263.178		115.034.263.178		118.334.948.443		119.681.647.411		123.075.280.360		591.160.402.570		
010301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	8.210.480.225	100	8.210.480.225	100	8.374.689.830	100	8.542.183.626	100	8.713.027.299	100	42.050.861.205	DINAS PEKERJAAN UMUM
010302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (Dengan Satuan:Ha)	90	100	14.749.120.830	100	14.749.120.830	100	16.044.103.247	100	15.344.985.312	100	16.651.885.018	100	77.539.215.237	DINAS PEKERJAAN UMUM
010303	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	pengembangan sistem penyediaan air minum (Dengan Satuan:%)	90	100	8.457.061.900	100	8.457.061.900	100	8.626.203.138	100	8.798.727.201	100	8.974.701.745	100	43.313.755.884	DINAS PEKERJAAN UMUM
010305	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	pengembangan sistem air limbah (Dengan Satuan:%)	90	100	2.869.180.500	100	2.869.180.500	100	2.926.564.110	100	2.985.095.392	100	3.044.797.300	100	14.694.817.802	DINAS PEKERJAAN UMUM
010307	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	tersusunnya NSPK (Dengan Satuan:%)	90	90	1.948.000.000	90	1.948.000.000	90	1.986.960.000	90	2.026.699.200	90	2.067.233.184	90	9.976.892.384	DINAS PEKERJAAN UMUM
010308	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	penataan bangunan gedung (Dengan Satuan:%)	90	100	5.605.433.099	100	5.605.433.099	100	5.717.541.761	100	5.831.892.596	100	5.948.530.448	100	28.708.831.003	DINAS PEKERJAAN UMUM
010309	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	penataan bangunan dan lingkungannya (Dengan Satuan:%)	90	100	3.085.921.867	100	3.085.921.867	100	3.147.640.304	100	3.210.593.110	100	3.274.804.973	100	15.804.882.121	DINAS PEKERJAAN UMUM
010310	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	penyelenggaraan jalan (Dengan Satuan:%)	90	100	68.110.112.597	100	68.110.112.597	100	69.472.314.849	100	70.861.761.146	100	72.278.996.369	100	348.833.297.558	DINAS PEKERJAAN UMUM
010311	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	pengembangan jasa konstruksi (Dengan Satuan:%)	90	100	885.443.780	100	885.443.780	100	903.152.656	100	921.215.709	100	939.640.023	100	4.534.895.948	DINAS PEKERJAAN UMUM
010312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	penyelenggaraan penataan ruang (Dengan Satuan:%)	90	100	1.113.508.380	100	1.113.508.380	100	1.135.778.548	100	1.158.494.119	100	1.181.664.001	100	5.702.953.428	DINAS PEKERJAAN UMUM
01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.609.389.810		7.609.389.810		7.761.577.606		7.916.809.159		8.075.145.342		38.972.311.727		
010402	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni (Dengan Satuan:%)	90	100	99.977.740	100	99.977.740	100	101.977.295	100	104.016.841	100	106.097.178	100	512.046.794	DINAS PEKERJAAN UMUM
010403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pemukiman yang tertata (Dengan Satuan:%)	90	100	1.133.932.120	100	1.133.932.120	100	1.156.610.762	100	1.179.742.978	100	1.203.337.837	100	5.807.555.817	DINAS PEKERJAAN UMUM
010405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (Dengan Satuan:%)	90	100	6.375.479.950	100	6.375.479.950	100	6.502.989.549	100	6.633.049.340	100	6.765.710.327	100	32.652.709.116	DINAS PEKERJAAN UMUM
01.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			21.323.414.721		22.454.151.881		22.616.037.901		22.781.161.639		22.949.587.852		112.124.353.994		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			13.149.619.390		14.280.356.550		14.400.160.849		14.522.361.233		14.647.005.624		70.999.503.646		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
010501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran(%); Persentase Realisasi Pengadaan Pakaian Dinas(%); Persentase Aparatur Terampil(%); Persentase P (Dengan Satuan:Person)	100	100	4.989.203.260	100	4.989.203.260	100	4.989.203.260	100	4.989.203.260	100	4.989.203.260	100	24.946.016.300	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
010502	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Kebisingan dari Kegiatan Masyarakat; Persentase Pendataan Anggota Linmas pada Seluruh Kecamatan/Desa Se Kab. Gunung Mas (Dengan Satuan:Person)	100	100	4.931.710.200	100	4.931.710.200	100	4.986.940.380	100	5.043.275.163	100	5.100.736.642	100	24.994.372.585	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
010503	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Capaian Kebutuhan Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Person)	100	100	100.229.680	100	100.229.680	100	102.234.274	100	104.278.959	100	106.364.538	100	513.337.131	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
010504	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Person)	100	100	3.128.476.250	100	4.259.213.410	100	4.321.782.935	100	4.385.603.851	100	4.450.701.184	100	20.545.777.630	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				8.173.795.331		8.173.795.331		8.215.877.052		8.258.800.406		8.302.582.228		41.124.850.348		
010501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	0100	3.502.344.765	100	3.502.344.765	100	3.544.426.486	100	3.587.349.840	100	3.631.131.662	100	17.767.597.518	B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
010503	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan pelayanan bencana daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.671.456.291	100	2.671.456.291	100	2.671.456.291	100	2.671.456.291	100	2.671.456.291	100	13.357.281.455	B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
010504	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Dengan Satuan:%)	100	100	1.999.994.275	100	1.999.994.275	100	1.999.994.275	100	1.999.994.275	100	1.999.994.275	100	9.999.971.375	B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			5.372.311.358		5.372.311.358		5.385.573.874		5.399.101.640		5.412.899.961		26.942.198.191		
	DINAS SOSIAL			5.372.311.358		5.372.311.358		5.385.573.874		5.399.101.640		5.412.899.961		26.942.198.191		
010601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	3.207.691.718	100	3.207.691.718	100	3.207.691.718	100	3.207.691.718	100	3.207.691.718	100	16.038.458.590	DINAS SOSIAL
010602	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	50	60	787.228.400	60	787.228.400	60	787.228.400	60	787.228.400	60	787.228.400	60	3.936.142.000	DINAS SOSIAL
010604	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani (Dengan Satuan:%)	50	60	377.923.560	60	377.923.560	60	377.923.560	60	377.923.560	60	377.923.560	60	1.889.617.800	DINAS SOSIAL
010605	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Dengan Satuan:%)	50	60	753.174.730	60	753.174.730	60	766.437.246	60	779.965.012	60	793.763.333	60	3.846.515.051	DINAS SOSIAL
010606	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (Dengan Satuan:%)	90	100	246.292.950	100	246.292.950	100	246.292.950	100	246.292.950	100	246.292.950	100	1.231.464.750	DINAS SOSIAL
02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			71.893.816.172		88.924.024.621		92.457.184.682		89.311.164.001		93.471.168.137		436.057.357.613		
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			427.600.930		427.600.930		436.152.949		444.876.007		453.773.528		2.190.004.344		
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			427.600.930		427.600.930		436.152.949		444.876.007		453.773.528		2.190.004.344		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
020703	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja (Dengan Satuan:%)	100	100	162.518.030	100	162.518.030	100	165.768.391	100	169.083.758	100	172.465.434	100	832.353.643	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
020704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS (Dengan Satuan:%)	100	100	96.499.770	100	96.499.770	100	98.429.765	100	100.398.361	100	102.406.328	100	494.233.994	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
020705	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pelaksanaan data dan sarana hubungan industrial (Dengan Satuan:%)	100	100	168.583.130	100	168.583.130	100	171.954.793	100	175.393.888	100	178.901.766	100	863.416.707	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			307.111.700		803.499.990		1.843.000.000		2.849.000.000		2.633.000.000		8.435.611.690		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			307.111.700		803.499.990		1.843.000.000		2.849.000.000		2.633.000.000		8.435.611.690		
020802	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Dengan Satuan:%)	5	5	30.171.700	5	75.343.400	5	283.000.000	5	800.000.000	5	425.000.000	5	1.613.515.100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Dengan Satuan:%)	92,09	92,34		92,49		92,54		92,65		92,70		92,70		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100	0	100	200.000.000	100	365.000.000	100	364.000.000	100	373.000.000	100	1.302.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020804	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Dengan Satuan:%)	88,91	88,22	40.000.000	89,58	120.000.000	89,90	160.000.000	90,15	200.000.000	90,45	160.000.000	90,45	680.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020805	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak (Dengan Satuan:%)	36	40	0	45	100.000.000	50	160.000.000	54	160.000.000	59	160.000.000	59	580.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
020806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Kabupaten Layak Anak (Dengan Satuan:%)	0	0	177.940.000	0	190.267.910	0	540.000.000	0	605.000.000	0	695.000.000	0	2.208.207.910	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
020807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100	59.000.000	100	117.888.680	100	335.000.000	100	720.000.000	100	820.000.000	100	2.051.888.680	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Dengan Satuan:%)	0	0		47,82		55,17		62,52		69,87		69,87		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.525.301.553		2.525.301.553		2.575.807.584		2.627.323.735		2.679.870.210		12.933.604.635		
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN			2.525.301.553		2.525.301.553		2.575.807.584		2.627.323.735		2.679.870.210		12.933.604.635		
020902	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (Dengan Satuan:ton)	1000	1000	1.814.005.603	1000	1.814.005.603	1000	1.850.285.715	1000	1.887.291.429	1000	1.925.037.258	1000	9.290.625.608	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
020903	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	penyediaan dan penyaluran pangan pokok (Dengan Satuan:jenis)	9	9	660.119.530	9	660.119.530	9	673.321.921	9	686.788.359	9	700.524.126	9	3.380.873.466	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
020904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	penanganan kerawanan pangan (Dengan Satuan:%)	90	90	51.176.420	90	51.176.420	90	52.199.948	90	53.243.947	90	54.308.826	90	262.105.561	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			2.358.725.100		4.922.500.000		2.935.000.000		0		0		10.216.225.100		
	SEKRETARIAT DAERAH			2.358.725.100		4.922.500.000		2.935.000.000		0		0		10.216.225.100		
021009	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (Dengan Satuan:%)	80	90	2.358.725.100	90	4.922.500.000	90	2.935.000.000	90	0	90	0	90	10.216.225.100	SEKRETARIAT DAERAH
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			13.540.921.476		13.634.971.036		13.907.568.457		14.185.719.826		14.469.434.223		69.738.615.018		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN			13.540.921.476		13.634.971.036		13.907.568.457		14.185.719.826		14.469.434.223		69.738.615.018		
021101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	7.012.395.178	90	7.106.444.738	90	7.248.471.633	090	7.393.441.065	090	7.541.309.888	90	36.302.062.502	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	1	1	160.626.200	1	160.626.200	1	163.838.724	1	167.115.498	1	170.457.808	1	822.664.430	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	90	90	3.129.154.535	90	3.129.154.535	90	1.691.737.626	90	1.755.572.378	90	1.820.683.826	90	11.526.302.900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021104	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan) (Dengan Satuan:skor)	70,28	70,28	0	73,82	0	74,41	1.500.000.000	75	1.500.000.000	75,75	1.500.000.000	75,75	4.500.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
021105	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (Dengan Satuan:%)	90	90	162.738.260	90	162.738.260	90	165.993.025	90	169.312.886	90	172.699.143	90	833.481.574	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PU (Dengan Satuan:%)	90	90	110.738.060	90	110.738.060	90	112.952.821	90	115.211.878	90	117.516.115	90	567.156.934	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021107	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA (Dengan Satuan:%)	90	90	33.874.000	90	33.874.000	90	34.551.480	90	35.242.510	90	35.947.360	90	173.489.350	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021108	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Dengan Satuan:%)	90	90	32.292.300	90	32.292.300	90	32.938.146	90	33.596.909	90	34.268.847	90	165.388.502	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021109	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	% Penghargaan Lingkungan Kepada Masyarakat (Dengan Satuan:Person)	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya (Dengan Satuan:%)	90	90	107.797.940	90	107.797.940	90	109.953.899	90	112.152.977	90	114.396.036	90	552.098.792	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani (Dengan Satuan:%)	90	90	2.791.305.03	90	2.791.305.03	90	2.847.131.103	90	2.904.073.725	90	2.962.155.200	90	14.295.970.034	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.466.015.550		10.855.015.550		11.380.135.860		11.968.148.578		12.513.611.549		57.182.927.087	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.466.015.550		10.855.015.550		11.380.135.860		11.968.148.578		12.513.611.549		57.182.927.087	
021201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	6.468.838.010	100	6.777.838.010	100	7.166.014.769	100	7.615.945.065	100	8.017.163.967	100	36.045.799.821	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (Dengan Satuan:%)	100	100	1.844.105.840	100	1.854.105.840	100	1.895.287.957	100	1.937.093.716	100	1.979.535.590	100	9.510.128.943	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio pasangan berakte nikah (Dengan Satuan:%)	100	100	844.368.850	100	854.368.850	100	875.956.227	100	897.775.351	100	924.830.858	100	4.397.300.136	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021204	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Dengan Satuan:%)	100	100	1.297.721.500	100	1.357.721.500	100	1.431.675.930	100	1.505.909.449	100	1.580.427.638	100	7.173.456.017	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
021205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (Dengan Satuan:%)	100	100	10.981.350	100	10.981.350	100	11.200.977	100	11.424.997	100	11.653.496	100	56.242.170	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.260.948.325		8.243.732.543		11.468.778.453		7.701.328.453		8.937.708.453		41.612.496.227	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.260.948.325		8.243.732.543		11.468.778.453		7.701.328.453		8.937.708.453		41.612.496.227	
021301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase aparatu (Dengan Satuan:%)	100	95	3.967.090.431	95	3.986.630.633	95	6.688.812.633	95	3.888.812.633	95	3.888.812.633	95	22.420.158.963	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
021302	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa (Dengan Satuan:%)	80	80	0	80	109.999.100	80	40.000.000	80	70.000.000	80	0	80	219.999.100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
021304	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah BUMDes aktif; Status klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase pelay (Dengan Satuan:jenis)	75 Persen	39 Jenis	684.488.494	45 Jenis	3.115.115.350	45 Jenis	3.707.510.520	45 Jenis	2.686.060.520	45 Jenis	3.989.140.520	75 Persen	14.182.315.404	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
021305	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah kelompok usaha perempuan aktif; Jumlah kelompok usaha aktif; Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG; Status perkembangan Desa di Kabypat (Dengan Satuan:jenis)	26	26	609.369.400	26	1.031.987.460	26	1.032.455.300	27	1.056.455.300	27	1.059.755.300	27	4.790.022.760	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			11.043.652.401		8.820.409.570		9.189.663.290		9.513.663.290		9.982.663.290		48.550.051.841		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			11.043.652.401		8.820.409.570		9.189.663.290		9.513.663.290		9.982.663.290		48.550.051.841		
021401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	4.166.664.913	100	4.761.009.810	100	4.748.159.810	100	5.148.159.810	100	5.541.159.810	100	24.365.154.153	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
021402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (Dengan Satuan:%)	1,86	1,81	390.099.900	1,76	338.396.280	1,71	704.500.000	1,66	644.500.000	1,63	704.500.000	1,63	2.781.996.180	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
021403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate (TFR) (Dengan Satuan:%)	2,76	2,57	4.924.887.588	2,50	2.921.003.480	2,45	2.937.003.480	2,40	2.921.003.480	2,35	2.937.003.480	2,35	16.640.901.508	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Dengan Satuan:Nilai)	0	0		0		56,76		58,40		60,13		60,13		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (Dengan Satuan:%)	76,78	78,52		79,10		79,35		80,12		80,53		80,53		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Unmeet Need (Dengan Satuan:%)	14,70	13,23		11,90		11,90		11,55		10,68		10,68		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
021404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prevalensi Stunting (Dengan Satuan:buah)	32,83	22,87	1.562.000.000	20,65	800.000.000	18,43	800.000.000	16,21	800.000.000	13,99	800.000.000	13,99	4.762.000.000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (Dengan Satuan:Per 1000)	67	62		57		56		55		54		54		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			791.907.360		791.907.360		807.745.507		823.900.418		840.378.425		4.055.839.070		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN			791.907.360		791.907.360		807.745.507		823.900.418		840.378.425		4.055.839.070		
021502	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (Dengan Satuan:%)	0	2	572.327.690	2	572.327.690	2	583.774.244	2	595.449.729	2	607.358.723	2	2.931.238.076	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
021503	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Menurunnya angka kecelakaan transportasi sungai (Dengan Satuan:%)	0	0	219.579.670	0	219.579.670	0	223.971.263	0	228.450.689	0	233.019.702	0	1.124.600.994	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			0		10.438.848.848		10.295.426.389		10.501.396.118		10.711.406.038		41.947.077.393		
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK			0		10.438.848.848		10.295.426.389		10.501.396.118		10.711.406.038		41.947.077.393		
021601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	0	100	4.486.338.843	100	4.344.478.048	100	4.431.428.811	100	4.520.057.384	100	17.782.303.086	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
021602	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Sasaran Layanan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik (Dengan Satuan:%)	20%	20%	0	20%	2.780.477.990	20%	2.912.166.790	20%	2.970.410.126	20%	3.029.818.328	100%	11.692.873.234	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
021603	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi, Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi, Per (Dengan Satuan:%)	20%	20%	0	20%	3.172.032.015	20%	3.038.781.551	20%	3.099.557.181	20%	3.161.530.326	100%	12.471.901.073	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
02.17	BURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			5.468.855.800		5.468.855.800		5.578.232.916		5.689.797.574		5.803.593.526		28.009.335.616		
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			5.468.855.800		5.468.855.800		5.578.232.916		5.689.797.574		5.803.593.526		28.009.335.616		
021701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	4.529.090.200	100	4.529.090.200	100	4.619.672.004	100	4.712.065.444	100	4.806.306.753	100	23.196.224.601	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
021702	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatkan pengetahuan tentang izin usaha simpan pinjam (Dengan Satuan:%)	90	90	45.675.000	90	45.675.000	90	46.588.500	90	47.520.270	90	48.470.675	90	233.929.445	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
021703	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif (Dengan Satuan:%)	65	65	83.110.000	69	83.110.000	73	84.772.200	77	86.467.644	80	88.196.997	80	425.656.841	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
021705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya pengetahuan tentang perkoperasian (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	53.470.000	1	53.470.000	1	54.539.400	1	55.630.188	1	56.742.792	1	273.852.380	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
021706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terlindungnya koperasi yang sehat dan aktif (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	51.500.000	1	51.500.000	1	52.530.000	1	53.580.600	1	54.652.212	1	263.762.812	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
021707	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM (Dengan Satuan:%)	95	95	596.500.600	95	596.500.600	95	608.430.612	95	620.599.224	95	633.011.209	95	3.055.042.245	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
021708	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan perekonomian UMKM dan UKM (Dengan Satuan:%)	90	90	109.510.000	92	109.510.000	94	111.700.200	96	113.934.204	98	116.212.888	98	560.867.292	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.851.063.253		4.850.986.333		4.948.000.151		5.046.966.180		5.147.905.509		24.844.921.426		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			4.851.063.253		4.850.986.333		4.948.000.151		5.046.966.180		5.147.905.509		24.844.921.426		
021801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	3.108.675.433	100	3.108.675.433	100	3.170.846.032	100	3.234.265.918	100	3.298.951.243	100	15.921.414.059	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021802	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	pengembangan iklim penanaman modal (Dengan Satuan:%)	90	90	221.001.150	90	451.610.500	90	460.639.710	90	469.855.565	90	479.252.676	90	2.082.359.601	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021803	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PM DN/PMA) (Dengan Satuan:investor)	10	10	483.510.740	10	252.824.470	10	257.880.960	10	263.038.579	10	268.299.350	10	1.525.554.099	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	pelayanan penanaman modal (Dengan Satuan:%)	100	100	450.849.160	100	450.849.160	100	459.866.143	100	469.063.466	100	478.444.736	100	2.309.072.665	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
021805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Dengan Satuan:%)	90	90	440.246.480	90	440.246.480	90	449.051.410	90	458.032.438	90	467.193.086	90	2.254.769.894	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
021806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	pengelolaan data dan sistem informasi (Dengan Satuan:%)	90	90	146.780.290	90	146.780.290	90	149.715.896	90	152.710.214	90	155.764.418	90	751.751.108	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA			2.873.652.199		2.873.652.199		2.883.652.197		2.893.852.195		2.904.256.193		14.429.064.983		
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA			2.873.652.199		2.873.652.199		2.883.652.197		2.893.852.195		2.904.256.193		14.429.064.983		
021902	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	jumlah pemuda berpotensi, terampil dan terlatih (Dengan Satuan:%)	100	100	1.444.144.558	100	1.444.144.558	100	1.444.144.558	100	1.444.144.558	100	1.444.144.558	100	7.220.722.790	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA
021903	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah olahragawan berbakat (Dengan Satuan:%)	100	100	929.507.741	100	929.507.741	100	929.507.741	100	929.507.741	100	929.507.741	100	4.647.538.705	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA
021904	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	presentase pelaksanaan pengembangan kapasitas kepramukaan yang terasilitasi (Dengan Satuan:%)	100	100	499.999.900	100	499.999.900	100	509.999.898	100	520.199.896	100	530.603.894	100	2.560.803.488	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAH RAGA
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			345.531.960		345.531.960		352.442.599		359.491.451		366.681.280		1.769.679.250		
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK			345.531.960		345.531.960		352.442.599		359.491.451		366.681.280		1.769.679.250		
022002	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (Dengan Satuan:%)	95	100	345.531.960	100	345.531.960	100	352.442.599	100	359.491.451	100	366.681.280	100	1.769.679.250	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			211.775.070		211.775.070		216.010.571		220.330.783		224.737.398		1.084.628.892		
022102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	211.775.070	90	211.775.070	90	216.010.571	90	220.330.783	90	224.737.398	100	1.084.628.892	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			8.773.028.683		8.371.045.551		8.693.206.967		8.885.089.187		9.075.609.053		43.797.979.441		
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			8.773.028.683		8.371.045.551		8.693.206.967		8.885.089.187		9.075.609.053		43.797.979.441		
022201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya berbagai kegiatan yang berhubungan dengan layanan administrasi pemerintahan umum; Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana penunjang p (Dengan Satuan:Dokumen)	35	7	5.450.683.929	7	5.450.683.929	7	5.530.960.617	7	5.612.842.837	7	5.696.362.703	35	27.741.534.015	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
022202	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksananya Pelestarian, Pemanfaatan, Pelindungan, dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	0	2.184.505.164	3	1.604.523.179	3	1.710.000.000	3	1.790.000.000	3	1.930.000.000	3	9.219.028.343	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
022203	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah pelaku kesenian lokal yang didata dan dibina (Dengan Satuan:Orang)	0	3	380.000.000	3	311.937.568	5	450.000.000	8	480.000.000	10	500.000.000	29	2.121.937.568	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Jumlah Sanggar Seni yang Didata dan Dibina (Dengan Satuan:Unit)	0	34		2		2		2		2		40		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
022204	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Yang Dicatat (Dengan Satuan:Buah)	1	0	192.246.350	10	192.246.350	12	192.246.350	15	192.246.350	20	192.246.350	57	961.231.750	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
022205	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (Dengan Satuan:Buah)	15	15	565.593.240	1	681.610.710	1	660.000.000	1	660.000.000	1	607.000.000	19	3.174.203.950	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Dengan Satuan:Buah)	25	9		4		5		6		7		31		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
022206	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah museum yang dikelola (Dengan Satuan:buah)	1	1	0	1	130.043.815	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	580.043.815	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				2.555.897.202		5.036.061.562		4.767.185.430		5.166.198.410		6.285.976.030		23.811.318.634	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				2.555.897.202		5.036.061.562		4.767.185.430		5.166.198.410		6.285.976.030		23.811.318.634	
022301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	2.538.147.202	90	4.405.780.536	90	4.132.953.730	90	4.301.517.930	90	5.055.295.550	90	20.433.694.948	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
022302	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (Dengan Satuan:%)	1	1	17.750.000	1	630.281.026	1	536.609.230	1	669.680.480	1	940.680.480	1	2.795.001.216	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
022303	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (Dengan Satuan:kegiatan)	0	0	0	0	0	59.906.320	97.622.470	95.000.000	195.000.000	150.000.000	290.000.000	582.622.470	582.622.470	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				91.827.610		302.328.766		179.175.362		434.081.796		440.563.432		1.447.976.966	
022402	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	pengelolaan arsip (Dengan Satuan:%)	90	90	20.622.500	90	233.051.946	90	88.905.070	90	270.000.000	90	250.000.000	90	862.579.516	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
022403	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	perlindungan dan penyelamatan arsip (Dengan Satuan:%)	90	90	71.205.110	90	69.276.820	90	90.270.292	90	124.081.796	90	140.563.432	90	495.397.450	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
022404	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terlayannya jumlah perizinan dalam penggunaan arsip (Dengan Satuan:pedoman)	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	90.000.000	50.000.000	0	90.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				54.490.448.549		61.724.172.697		66.057.888.690		66.261.958.136		69.129.504.668		317.663.972.740	
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.996.079.346		7.996.079.346		8.156.000.934		8.319.120.952		8.485.503.370		40.952.783.948	
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN				7.996.079.346		7.996.079.346		8.156.000.934		8.319.120.952		8.485.503.370		40.952.783.948	
032501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	4.087.736.033	100	4.087.736.033	100	4.169.490.754	100	4.252.880.569	100	4.337.938.180	100	20.935.781.569	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
032503	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan kelompok nelayan (Dengan Satuan:%)	90	90	98.297.875	90	98.297.875	90	100.263.833	90	102.269.109	90	104.314.491	90	503.443.183	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
032504	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok nelayan (Dengan Satuan:%)	90	90	3.702.500.438	90	3.702.500.438	90	3.776.550.447	90	3.852.081.456	90	3.929.123.085	90	18.962.755.864	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
032506	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan (Dengan Satuan:%)	90	90	107.545.000	90	107.545.000	90	109.695.900	90	111.889.818	90	114.127.614	90	550.803.332	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2.237.039.066		2.237.039.066		2.273.987.658		2.311.675.223		2.350.116.539		11.409.857.552	
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				2.237.039.066		2.237.039.066		2.273.987.658		2.311.675.223		2.350.116.539		11.409.857.552	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
032602	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisata (Dengan Satuan:Orang)	25915	12.093	1.833.991.846	7.200	1.833.991.846	8.150	1.866.009.966	9.100	1.898.668.449	10.000	1.931.980.102	46.543	9.364.642.209	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
032603	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD sektor pariwisata (Dengan Satuan:rupiah)		45.810.000	403.047.220	50.000.000	403.047.220	50.000.000	407.977.692	50.000.000	413.006.774	50.000.000	418.136.437	245.810.000.000	2.045.215.343	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			35.421.170.245		35.772.774.635		38.887.074.742		38.602.153.619		41.132.510.496		189.815.683.737		
	DINAS PERTANIAN			35.421.170.245		35.772.774.635		38.887.074.742		38.602.153.619		41.132.510.496		189.815.683.737		
032701	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	18.276.925.554	90	18.276.925.554	90	18.792.864.066	90	19.017.116.163	90	19.243.606.065	90	93.607.437.402	DINAS PERTANIAN
032702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	5.705.909.974	90	5.705.909.974	90	7.381.717.166	90	7.962.162.782	90	8.799.317.874	90	35.555.017.70	DINAS PERTANIAN
032703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	8.946.179.802	90	9.260.706.302	90	10.021.873.397	90	8.902.646.662	90	10.314.342.281	90	47.445.748.444	DINAS PERTANIAN
032704	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (Dengan Satuan:%)	90	90	792.511.480	90	792.511.480	90	808.361.711	90	820.051.425	90	837.760.819	90	4.051.196.915	DINAS PERTANIAN
032705	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	314.683.300	90	220.451.290	90	320.976.966	90	326.103.229	90	333.003.199	90	1.515.217.984	DINAS PERTANIAN
032706	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	perizinan usaha pertanian (Dengan Satuan:%)	90	90	574.175.680	90	574.175.680	90	585.659.194	90	594.894.144	90	607.516.186	90	2.936.420.884	DINAS PERTANIAN
032707	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani (Dengan Satuan:%)	90	90	810.784.455	90	942.094.355	90	975.622.242	90	979.179.214	90	996.964.072	90	4.704.644.338	DINAS PERTANIAN
03.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			8.398.210.542		8.398.210.542		8.566.174.753		8.737.498.248		8.812.248.213		42.912.342.298		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN			8.398.210.542		8.398.210.542		8.566.174.753		8.737.498.248		8.812.248.213		42.912.342.298		
032804	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Dengan Satuan:%)	90	90	8.398.210.542	90	8.398.210.542	90	8.566.174.753	90	8.737.498.248	90	8.812.248.213	90	42.912.342.298	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			100.000.000		1.227.492.880		2.356.763.728		2.203.803.728		2.171.438.635		8.059.498.971		
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			100.000.000		1.227.492.880		2.356.763.728		2.203.803.728		2.171.438.635		8.059.498.971		
033002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perizinan Pelaku Usaha dan Masyarakat yang menjalankan usahanya pada bidang perdagangan (Dengan Satuan:buah)	10	10	0	10	135.414.680	10	397.569.860	10	367.569.860	10	367.569.860	10	1.268.124.260	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan (Dengan Satuan:buah)	5	5	0	5	37.660.000	5	268.493.210	5	178.493.210	5	233.493.210	5	718.139.630	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033004	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Pelaku Usaha dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Dengan Satuan:kali)	3	3	0	3	360.856.580	3	573.081.190	3	573.081.190	3	573.081.190	3	2.080.100.150	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033005	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	jumlah promosi dagang melalui pameran (Dengan Satuan:kegiatan)	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	102.000.000	3	104.040.000	3	106.120.800	3	512.160.800	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033006	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tercapainya pelayanan Tera / Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrotologi (Dengan Satuan:%)	90	90	0	90	459.993.320	90	832.051.168	90	797.051.168	90	684.051.168	90	2.773.146.824	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
033007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah keikutsertaan Kabupaten Gunung Mas dalam kegiatan promosi penggunaan produk dalam negeri (Dengan Satuan:kali)	4	4	0	4	133.568.300	4	183.568.300	4	183.568.300	4	207.122.407	4	707.827.307	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			0		5.754.626.878		5.473.178.538		5.736.103.862		5.819.052.862		22.782.962.140		
033101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya urusan penunjang pemerintahan daerah pada perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	0	90	3.532.135.20	90	4.287.638.713	90	4.325.722.694	90	4.408.671.694	90	16.554.168.621	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku IKM dan tersedianya Informasi Industri Kerajinan dan pangan di Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:buah)	4	4	0	4	2.162.621.788	4	836.526.605	4	1.061.367.948	4	1.061.367.948	4	5.121.884.289	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	pengawasan dan pembinaan IKM di 12 Kecamatan dalam memenuhi ketentuan/aturan perizinan IUI (Dengan Satuan:%)	90	90	0	90	0	90	148.015.990	90	148.015.990	90	148.015.990	90	444.047.970	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
033104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pemutakhiran, evaluasi dan publikasi Data Informasi IKM di Kabupaten Gunung Mas (Dengan Satuan:%)	90	90	0	90	59.869.570	90	200.997.230	90	200.997.230	90	200.997.230	90	662.861.260	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
03.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			337.949.350		337.949.350		344.708.337		351.602.504		358.634.553		1.730.844.094		
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			337.949.350		337.949.350		344.708.337		351.602.504		358.634.553		1.730.844.094		
033202	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tersedianya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi (Dengan Satuan:%)	80	80	195.558.300	82	195.558.300	84	199.469.466	86	203.458.855	88	207.528.032	88	1.001.572.953	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
033203	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya Pelatihan Bagi Warga Transmigrasi (Dengan Satuan:%)	80	80	105.307.250	82	105.307.250	84	107.413.395	86	109.561.663	88	111.752.896	88	539.342.454	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
033204	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Terlaksananya kegiatan penguatan kegiatan SDM (Dengan Satuan:%)	80	80	37.083.800	82	37.083.800	84	37.825.476	86	38.581.986	88	39.353.625	88	189.928.687	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			48.390.529.850		67.815.557.968		73.868.670.039		71.679.259.283		71.729.865.813		333.483.882.953		
04.01	SEKRETARIAT DAERAH			16.888.911.415		35.394.154.757		40.877.819.128		38.988.408.372		38.810.371.982		170.959.665.654		
	SEKRETARIAT DAERAH			16.888.911.415		35.394.154.757		40.877.819.128		38.988.408.372		38.810.371.982		170.959.665.654		
040101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	12.808.021.910	100	24.250.574.737	100	26.814.115.823	100	24.458.134.302	100	23.943.029.542	100	112.273.876.314	SEKRETARIAT DAERAH
040102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:%)	90	100	2.860.315.000	100	8.764.202.800	100	11.151.066.640	100	11.376.066.640	100	11.440.646.640	100	45.592.297.720	SEKRETARIAT DAERAH
040103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	pengembangan perekonomian dan pembangunan (Dengan Satuan:%)	90	100	1.220.574.05	100	2.379.377.20	100	2.912.636.65	100	3.154.207.430	100	3.426.695.800	100	13.093.491.20	SEKRETARIAT DAERAH
04.02	SEKRETARIAT DPRD			31.501.618.435		32.421.403.211		32.990.850.911		32.690.850.911		32.919.493.831		162.524.217.299		
	SEKRETARIAT DPRD			31.501.618.435		32.421.403.211		32.990.850.911		32.690.850.911		32.919.493.831		162.524.217.299		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
040201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	90	100	21.455.189.035	100	21.462.611.081	100	21.762.611.081	100	21.462.611.081	100	21.462.611.081	100	107.605.633.359	SEKRETARIAT DPRD
040202	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (Dengan Satuan:%)	90	100	10.046.429.400	100	10.958.792.130	100	11.228.239.830	100	11.228.239.830	100	11.456.882.750	100	54.918.583.940	SEKRETARIAT DPRD
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			196.309.253.532		208.768.157.021		214.342.117.221		223.355.647.918		229.222.563.155		1.071.997.738.847		
05.01	PERENCANAAN			7.635.464.772		7.635.464.772		7.788.174.069		7.993.937.548		8.152.816.300		39.205.857.461		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN			7.635.464.772		7.635.464.772		7.788.174.069		7.993.937.548		8.152.816.300		39.205.857.461		
050101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	93	96	4.721.937.462	97	4.721.937.462	98	4.816.376.213	99	4.912.703.735	100	5.010.957.810	100	24.183.912.682	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
050102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan, Rasio Dokumen Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang selesai tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	1.502.215.100	100	1.502.215.100	100	1.532.259.402	100	1.612.904.589	100	1.644.162.682	100	7.793.756.873	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
050103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase capaian kinerja dokumen renstra PD bidang sosial budaya dan bidang ekonomi (Dengan Satuan:%)	95	95	1.411.312.210	95	1.411.312.210	95	1.439.538.454	95	1.468.329.224	95	1.497.695.808	95	7.228.187.906	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
05.02	KEUANGAN			178.477.379.747		190.300.415.827		195.628.230.549		203.780.494.643		209.354.878.128		977.541.398.894		
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			178.477.379.747		180.580.510.843		185.618.325.565		192.668.766.743		198.212.833.228		935.557.816.126		
050201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	5.093.845.659	100	6.743.509.932	100	6.704.166.007	100	7.809.129.071	100	8.004.357.296	100	34.355.007.965	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
050202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD (Dengan Satuan:%)	100	100	172.488.840.096	100	172.745.635.329	100	177.819.757.372	100	183.569.025.227	100	188.914.641.955	100	895.537.899.979	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
050203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK terhadap laporan keuangan (Dengan Satuan:jenis)	WTP	WTP	894.693.992	WTP	1.091.365.582	WTP	1.094.402.186	WTP	1.290.612.445	WTP	1.293.833.977	WTP	5.664.908.182	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			0		9.719.904.984		10.009.904.984		11.111.727.900		11.142.044.900		41.983.582.768		
050201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	0	100	7.353.424.069	100	7.629.444.774	100	8.575.352.130	100	8.585.352.130	100	32.143.573.103	BADAN PENDAPATAN DAERAH
050203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	0	100	0	100	15.917.000	100	0	100	15.917.000	100	31.834.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
050204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	0	100	2.366.480.915	100	2.364.543.210	100	2.536.375.770	100	2.540.775.770	100	9.808.175.665	BADAN PENDAPATAN DAERAH
05.03	KEPEGAWAIAN			6.321.485.103		6.957.352.512		7.030.755.863		7.565.533.211		7.626.688.561		35.501.815.250		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6.321.485.103		6.957.352.512		7.030.755.863		7.565.533.211		7.626.688.561		35.501.815.250		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
050301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	4.411.895.503	100	4.703.681.532	100	4.933.431.343	100	5.184.402.871	100	5.245.558.221	100	24.478.969.470	B A D A N KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	100	1.909.589.600	100	2.253.670.980	100	2.097.324.520	100	2.381.130.340	100	2.381.130.340	100	11.022.845.780	B A D A N KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi (Dengan Satuan:Persen)	95	95		95		95		95		95		95		B A D A N KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dan Penilaian, dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Persen)	95	95		95		95		95		95		95		B A D A N KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.482.482.400	2.482.482.400	2.482.482.400	2.482.482.400	2.482.482.400	2.482.482.400	2.582.774.689	2.582.774.689	2.634.430.183	2.634.430.183	12.664.652.072		
050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	terlaksananya pengembangan sumber daya pegawai negeri sipil (Dengan Satuan:orang)	150	150	2.482.482.400	150	2.482.482.400	150	2.482.482.400	150	2.582.774.689	150	2.634.430.183	150	12.664.652.072	B A D A N KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.392.441.510	1.392.441.510	1.392.441.510	1.392.441.510	1.412.474.340	1.412.474.340	1.432.907.827	1.432.907.827	1.453.749.983	1.453.749.983	7.084.015.170		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN			1.392.441.510	1.392.441.510	1.392.441.510	1.392.441.510	1.412.474.340	1.412.474.340	1.432.907.827	1.432.907.827	1.453.749.983	1.453.749.983	7.084.015.170		
050502	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rasio hasil penelitian dan inovasi yang dikembangkan/ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	100	100	1.392.441.510	100	1.392.441.510	100	1.412.474.340	100	1.432.907.827	100	1.453.749.983	100	7.084.015.170	B A D A N PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
06	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			9.118.991.377	9.118.991.377	9.118.991.377	9.118.991.377	9.782.519.350	9.782.519.350	9.977.197.211	9.977.197.211	10.176.731.975	10.176.731.975	48.174.431.290		
06.01	INSPEKTORAT DAERAH			9.118.991.377	9.118.991.377	9.118.991.377	9.118.991.377	9.782.519.350	9.782.519.350	9.977.197.211	9.977.197.211	10.176.731.975	10.176.731.975	48.174.431.290		
	INSPEKTORAT KABUPATEN			9.118.991.377	9.118.991.377	9.118.991.377	9.118.991.377	9.782.519.350	9.782.519.350	9.977.197.211	9.977.197.211	10.176.731.975	10.176.731.975	48.174.431.290		
060101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	6.614.426.967	100	6.900.645.517	100	7.387.666.910	100	7.534.447.722	100	7.685.127.496	100	36.122.314.612	INSPEKTORAT KABUPATEN
060102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan (Dengan Satuan:%)	100	100	2.270.791.400	100	1.975.755.250	100	2.161.079.430	100	2.204.301.019	100	2.248.387.039	100	10.860.314.138	INSPEKTORAT KABUPATEN
060103	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelanggaran pegawai (Dengan Satuan:%)	10	10	233.773.010	10	242.590.610	10	233.773.010	10	238.448.470	10	243.217.440	10	1.191.802.540	INSPEKTORAT KABUPATEN
07	UNSUR KEWILAYAHAN			48.081.684.101	48.081.684.101	50.127.105.906	50.127.105.906	50.040.485.852	50.040.485.852	50.740.520.907	50.740.520.907	50.924.137.072	50.924.137.072	249.913.933.838		
	KECAMATAN KURUN			6.761.999.900	6.761.999.900	6.202.544.883	6.202.544.883	5.739.026.293	5.739.026.293	6.157.701.353	6.157.701.353	6.088.701.353	6.088.701.353	30.949.973.782		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintah (Dengan Satuan:%)	100	99	4.053.431.900	99	4.377.267.976	99	3.757.327.513	99	4.039.195.453	99	3.966.195.453	100	20.193.418.295	KECAMATAN KURUN
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	95	2.708.568.000	96	1.619.706.467	97	1.748.411.340	97	1.881.221.900	98	1.884.221.900	100	9.842.129.607	KECAMATAN KURUN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:%)	100	0	0	99	168.286.440	99	146.704.440	99	150.000.000	99	150.000.000	100	614.990.880	KECAMATAN KURUN
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	0	0	95	37.284.000	97	86.583.000	97	87.284.000	97	88.284.000	100	299.435.000	KECAMATAN KURUN
KECAMATAN TEWAH				3.250.802.574		4.625.218.882		4.154.295.394		4.176.545.394		4.186.086.754		20.392.948.998		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	99	98	2.796.031.574	98	3.610.330.287	98	3.009.768.364	98	3.053.708.384	98	3.048.622.764	98	15.518.461.373	KECAMATAN TEWAH
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0	0	0	0	98	2.270.000	98	2.270.000	98	4.540.000	KECAMATAN TEWAH
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	98	98	446.511.000	98	757.039.032	98	938.045.410	98	950.174.790	98	956.507.770	98	4.048.278.002	KECAMATAN TEWAH
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	0	0	0	98	84.941.163	98	35.189.000	98	15.147.400	0	0	98	135.277.563	KECAMATAN TEWAH
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0	0	98	32.891.400	98	16.450.000	98	32.891.400	98	82.232.800	KECAMATAN TEWAH
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	98	8.260.000	98	172.908.400	98	138.401.220	98	138.794.820	98	145.794.820	98	604.159.260	KECAMATAN TEWAH
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA				2.438.218.288		3.702.300.844		3.574.744.102		3.693.023.867		3.668.378.372		17.076.665.473		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	97%	97	1.879.636.538	97	2.739.887.669	97	2.310.839.057	97	2.454.868.822	97	2.276.723.327	11.661.955.413		KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:91 %)	91 %	91 %	491.063.750	91 %	736.693.490	91 %	888.337.345	91 %	923.641.545	91 %	1.077.141.545	91 %	4.116.877.675	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Pencegahan Penyakit Menular Covid 19 di Kecamatan Kahayan Hulu utara (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	Kegiatan	59.258.000	Kegiatan	60.304.125	Kegiatan	61.054.200	0	0	0	0	0	180.616.325	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Kegiatan)	100	100	0	100	4.996.860	Kegiatan	74.999.680	Kegiatan	74.999.680	Kegiatan	74.999.680	100	229.995.900	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:12 Bulan)	100	12 Bulan	8.260.000	12 Bulan	160.418.700	12 Bulan	239.513.820	12 Bulan	239.513.820	12 Bulan	239.513.820	100	887.220.160	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
KECAMATAN SEPANG				4.211.010.722		4.210.213.902		4.341.866.997		4.351.365.904		4.470.710.119		21.585.167.644		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	97	97	2.936.767.842	97	2.935.971.022	97	3.045.191.112	98	3.024.643.613	98	3.116.421.528	98	15.058.995.117	KECAMATAN SEPANG
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	100	70.823.180	100	70.823.180	100	72.239.644	100	73.684.436	100	75.158.125	100	362.728.565	KECAMATAN SEPANG
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	897.358.000	100	897.358.000	100	915.305.160	100	933.611.263	100	952.283.488	100	4.595.915.911	KECAMATAN SEPANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	76.329.640	100	76.329.640	100	74.804.380	100	80.413.357	100	83.053.478	100	390.930.495	KECAMATAN SEPANG
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	229.732.060	100	229.732.060	100	234.326.701	100	239.013.235	100	243.793.500	100	1.176.597.556	KECAMATAN SEPANG
KECAMATAN MANUHING				5.547.674.127		4.677.242.008		4.192.659.736		4.782.470.682		4.782.470.682		23.982.517.235		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	5.133.746.024	100	3.427.873.922	100	3.694.760.884	100	3.883.466.702	100	3.883.466.702	100	20.023.314.234	KECAMATAN MANUHING
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	312.494.263	100	1.123.332.086	100	396.241.812	100	772.967.980	100	772.967.980	100	3.378.004.121	KECAMATAN MANUHING
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	TERWUJUDNYA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DITINGKAT KELURAHAN (Dengan Satuan:%)	100%	61400000	61.400.000	61400000	61.400.000	61400000	61.400.000	61400000	61.400.000	61400000	61.400.000	100%	307.000.000	KECAMATAN MANUHING
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:KEGIATAN)	34	34	40.033.840	34	64.636.000	34	40.257.040	34	64.636.000	34	64.636.000	34	274.198.880	KECAMATAN MANUHING
KECAMATAN RUNGAN				4.877.218.197		5.062.718.197		5.079.742.561		5.477.697.412		5.383.111.360		25.880.487.727		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.478.583.305	100	3.604.083.305	100	3.602.434.971	100	3.756.343.671	100	3.777.330.544	100	18.218.775.796	KECAMATAN RUNGAN
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	100	27.884.120	100	27.884.120	100	28.441.802	100	29.010.638	100	29.590.851	100	142.811.531	KECAMATAN RUNGAN
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	1.070.510.192	100	1.120.510.192	100	1.135.920.396	100	1.201.638.804	100	1.217.671.580	100	5.746.251.164	KECAMATAN RUNGAN
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban umum di masyarakat (Dengan Satuan:%)	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	270.000.000	KECAMATAN RUNGAN
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksana Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	233.097.880	100	233.097.880	100	235.759.838	100	288.475.034	100	291.244.535	100	1.281.675.167	KECAMATAN RUNGAN
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	17.142.700	100	17.142.700	100	17.185.554	100	152.229.265	100	17.273.850	100	220.974.069	KECAMATAN RUNGAN
KECAMATAN MIHING RAYA				2.690.834.716		4.074.177.519		3.744.986.251		3.912.763.331		3.933.369.837		18.356.131.654		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.136.419.716	100	3.151.551.253	100	2.720.073.079	100	2.862.422.405	100	2.856.965.465	100	13.727.431.918	KECAMATAN MIHING RAYA
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	76.478.000	100	712.402.246	100	801.630.551	100	821.671.315	100	842.213.097	100	3.254.395.209	KECAMATAN MIHING RAYA
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Porsentase Tercapainya Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100%	100%	404.749.000	100%	61.499.140	100%	63.036.619	100%	64.612.534	100%	66.227.847	100%	660.125.140	KECAMATAN MIHING RAYA
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	40.695.000	100	99.457.880	100	101.944.327	100	104.492.935	100	107.105.258	100	453.695.400	KECAMATAN MIHING RAYA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100%	100%	32.493.000	100%	49.267.000	100%	58.301.675	100%	59.564.142	100%	60.858.170	100%	260.483.987	KECAMATAN MIHING RAYA
KECAMATAN RUNGAN HULU				3.652.531.969		3.652.531.969		3.725.582.609		3.800.094.262		3.876.096.146		18.706.836.955		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.569.840.539	100	2.569.840.539	100	2.621.237.350	100	2.673.662.097	100	2.727.135.339	100	13.161.715.864	KECAMATAN RUNGAN HULU
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dengan Satuan:%)	100	100	66.484.840	100	66.484.840	100	67.814.537	100	69.170.828	100	70.554.244	100	340.509.289	KECAMATAN RUNGAN HULU
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	767.151.650	100	767.151.650	100	782.494.683	100	798.144.577	100	814.107.468	100	3.929.050.028	KECAMATAN RUNGAN HULU
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	249.054.940	100	249.054.940	100	254.036.039	100	259.116.760	100	264.299.095	100	1.275.561.774	KECAMATAN RUNGAN HULU
KECAMATAN DAMANG BATU				4.718.354.370		4.158.006.860		5.319.007.404		4.313.251.312		4.391.968.195		22.900.588.141		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kebutuhan dalam pelayanan administrasi Kantor ;Persentase sarana dan prasarana terawat dengan baik; Persentase kesiapan pegawai; Persenta (Dengan Satuan:%)	80	80	3.443.034.370	85	3.178.256.860	90	4.110.323.037	95	3.307.501.305	100	3.377.218.188	100	17.416.333.760	KECAMATAN DAMANG BATU
070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan (Dengan Satuan:%)	80	80	0	85	37.000.000	90	87.912.900	95	40.000.000	100	45.000.000	100	209.912.900	KECAMATAN DAMANG BATU
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	80	80	1.226.900.000	85	869.250.000	90	998.776.427	95	875.250.007	100	875.250.007	100	4.845.426.441	KECAMATAN DAMANG BATU
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat umum (Dengan Satuan:%)	20	20	0	15	0	10	17.998.800	5	3.000.000	0	3.000.000	0	23.998.800	KECAMATAN DAMANG BATU
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	80	80	34.920.000	85	33.500.000	90	38.150.000	95	34.500.000	100	34.500.000	100	175.570.000	KECAMATAN DAMANG BATU
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	80	80	13.500.000	85	40.000.000	90	65.846.240	95	53.000.000	100	57.000.000	100	229.346.240	KECAMATAN DAMANG BATU
KECAMATAN MANUHING RAYA				2.994.038.565		2.994.038.565		3.053.919.337		3.114.997.722		3.177.297.678		15.334.291.867		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.015.950.235	100	2.015.950.235	100	2.056.269.240	100	2.097.394.624	100	2.139.342.517	100	10.324.906.851	KECAMATAN MANUHING RAYA
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	914.998.130	100	914.998.130	100	933.298.093	100	951.964.054	100	971.003.336	100	4.686.261.743	KECAMATAN MANUHING RAYA
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	29.699.960	100	29.699.960	100	30.293.959	100	30.899.838	100	31.517.835	100	152.111.552	KECAMATAN MANUHING RAYA
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	33.390.240	100	33.390.240	100	34.058.045	100	34.739.206	100	35.433.990	100	171.011.721	KECAMATAN MANUHING RAYA
KECAMATAN MIRI MANASA				2.971.104.855		2.971.104.855		3.030.526.953		3.091.137.491		3.152.960.241		15.216.834.395		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		K	Rp	
				K	Rp											
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.076.481.985	100	2.076.481.985	100	2.118.011.625	100	2.160.371.857	100	2.203.579.294	100	10.634.926.746	KECAMATAN MIRI MANASA
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	764.999.630	100	764.999.630	100	780.299.623	100	795.905.615	100	811.823.727	100	3.918.028.225	KECAMATAN MIRI MANASA
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	35.390.240	100	35.390.240	100	36.098.045	100	36.820.006	100	37.556.406	100	181.254.937	KECAMATAN MIRI MANASA
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	56.619.800	100	56.619.800	100	57.752.196	100	58.907.240	100	60.085.385	100	289.984.421	KECAMATAN MIRI MANASA
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	37.613.200	100	37.613.200	100	38.365.464	100	39.132.773	100	39.915.429	100	192.640.066	KECAMATAN MIRI MANASA
KECAMATAN RUNGAN BARAT				3.967.895.818		3.797.007.422		4.084.128.215		3.869.472.177		3.812.986.335		19.531.489.967		
070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	2.902.494.766	100	2.683.281.412	100	3.011.358.522	100	2.796.228.222	100	2.753.636.572	100	14.146.999.494	KECAMATAN RUNGAN BARAT
070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	952.590.092	100	946.562.270	100	869.516.570	100	860.231.570	100	836.625.110	100	4.465.525.612	KECAMATAN RUNGAN BARAT
070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100	100	6.000.000	100	8.915.580	100	16.790.000	100	23.780.000	100	25.340.000	100	80.825.580	KECAMATAN RUNGAN BARAT
070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100	97.210.960	100	126.382.060	100	128.909.701	100	131.487.895	100	134.117.653	100	618.108.269	KECAMATAN RUNGAN BARAT
070106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	9.600.000	100	31.866.100	100	57.553.422	100	57.744.490	100	63.267.000	100	220.031.012	KECAMATAN RUNGAN BARAT
08	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			5.742.776.117		6.464.712.689		6.468.712.689		6.481.712.689		6.482.712.689		31.640.626.873		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.742.776.117		6.464.712.689		6.468.712.689		6.481.712.689		6.482.712.689		31.640.626.873		
080101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	3.572.777.948	100	3.979.991.070	100	3.983.991.070	100	3.996.991.070	100	3.997.991.070	100	19.531.742.28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
080102	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mengerti tentang Wawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)	90	100	330.540.000	100	310.010.000	100	310.010.000	100	310.010.000	100	310.010.000	90	1.570.580.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
080103	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Nilai/Angka) (Dengan Satuan:%)	80	100	960.588.229	100	960.588.109	100	960.588.109	100	960.588.109	100	960.588.109	90	4.802.940.665	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
080104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Dengan Satuan:%)	90	100	135.390.040	100	235.390.030	100	235.390.030	100	235.390.030	100	235.390.030	90	1.076.950.160	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
080105	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Dengan Satuan:%)	90	100	391.489.800	100	479.953.860	100	479.953.860	100	479.953.860	100	479.953.860	90	2.311.305.240	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
080106	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi terjadinya gangguan keamanan yang terdeteksi (Dengan Satuan:%)	90	100	351.990.100	100	498.779.620	100	498.779.620	100	498.779.620	100	498.779.620	90	2.347.108.580	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL:				1.024.508.873.488		1.079.106.277.402		1.115.123.421.293		1.124.831.652.891		1.145.098.124.657		5.488.668.349.731		



- BAB VIII - KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan.

8.1.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel VIII.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024**

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2020	Target				Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	
1	IPM	-	70,81	71,132	71,418	71,70	71,99	71,99
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,75	4,52	4,26	4,00	3,80	3,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,37	2,25	2,12	2,00	2,00
4	Indeks Gini	-	0,279	0,263	0,257	0,25	0,24	0,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,36	4,5	5,18	6,09	7,00	7,00
6	Pendapatan Per Kapita	Ribu/ Kapita /Tahun	10.793	11.056,6	11.238,8	11.421	11.603,2	11.603,2



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas tahun 2020-2024 yang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel VIII.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI 2020	TARGET				KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	-	42	44,82	46,36	47,90	49,44	49,44
2	Indeks Konektivitas Wilayah	-	60	62,50	65,00	67,50	70,00	70,00
3	Rasio rumah layak huni	%	26,56	27,14	27,72	28,3	28,88	28,88
4	IPM	-	70,81	71,13	71,41	71,70	71,99	71,99
5	Indeks Pendidikan	-	63,19	63,25	63,43	63,62	63,80	63,80
6	Indeks Kesehatan	-	77,54	77,63	77,76	77,89	78,02	78,02
7	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	-	88,2	89,58	89,90	90,15	90,45	90,45
8	Angka Pravalensi Stunting	%	22,87	21,56	18,55	16,01	13,94	13,94
9	LPE	%	3,36	4,27	5,18	6,09	7,00	7,00
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,65	4,56	5,47	6,38	7,29	7,29
11	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10	20	25	30	35	35
12	Tingkat kemiskinan	%	4,75	4,52	4,26	4	3,8	3,8
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,37	2,25	2,12	2,00	2,00



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI 2020	TARGET				KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	
14	Indeks Gini	-	0,279	0,263	0,257	0,25	0,24	0,24
15	Pendapatan per Kapita	Ribu/ Kapita/ Tahun	11.238	12.919	13.492	14.064	14.636	14.636
16	Indeks Reformasi Birokrasi	-	60	62	64	66	68	68
17	Nilai SAKIP	-	B	B	B	BB	BB	BB
18	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	77,53	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)
20	Angka Kriminalitas yang tertangani	-	76,54	77	78	79	80	80
21	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	81	75	70	65	60	60
22	Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	%	20	25	30	35	40	40
23	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	-	na	28	37	48	60	60
24	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	0,5	1	1,5	2	2,5	2,5
25	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	-	8	9	10	11	12	12
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	76	76,90	76,91	76,92	76,93	76,93
27	Indeks Kualitas Air	%	46	46,69	46,70	46,71	46,72	76,72
28	Indeks Kualitas Udara	%	89	89,5	89,6	89,7	89,8	89,8
29	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	90	90,15	90,2	90,25	90,30	90,30

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.



PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci pada program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan capaian pembangunan Tahun 2019-2024 yang berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan Indikator Kinerja tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Penetapan indikator kinerja daerah dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam Tabel VIII.3 sebagai berikut:



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel VIII.3

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 (berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	ASPEK KESEJAHTERAAN							
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Sosial, Serta Budaya dan Olahraga							
1	Laju Inflasi	(%)	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
2	PDRB atas dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	5.738.100,00	6.565.900,35	7.334.875,20	8.193.909,65	9.153.551,15	10.000.000,00
3	Tingkat kemiskinan	(%)	4,91	4,75	4,52	4,26	4	3,8
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	(%)	2,62	2,49	2,37	2,25	2,12	2
5	Indeks Pembangunan Manusia	(%)	70,65	70,81	71,132	71,418	71,704	71,99
6	Jumlah Pendapatan Perkapita/Tahun	Ribu Rp	1.181.810	10.793	11.056	11.238	11.421	11.603
7	Indeks Gini		0,296	0,27	0,263	0,257	0,25	0,24
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi		6,93	3,36	4,5	5,18	6,09	7
9	Jumlah PDRB Perkapita/Tahun	Juta Rp	29,22	51,25	51,922	55,357	58,792	62,22
II	ASPEK PELAYANAN UMUM							
A	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan							
01.01	Angka melek huruf (%)	(%)	99,67	100	100	100	100	100
01.02.01	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	(%)	79,65	90	92,5	95	97,5	100
01.02.02	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	(%)	113,77	116	117	118	119	120
01.02.03	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	(%)	87,21	101	100	100	100	100
01.04.01	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	(%)	96,42	100	100	100	100	100



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.04.02	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	(%)	94,72	84,78	88,34	92,56	94,78	99,12
01.05	SD/MI :							
01.05.01	Perbandingan Siswa dan Guru SD/Mts		20	1:12	1:10	1:10	1:10	1:10
01.05.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	94,72	108	106	104	102	100
01.05.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		1:97,08	1:130	1:130	1:120	1:115	1:120
01.06	SMP/MTs							
01.06.01	Perbandingan siswa dan guru SMP/Mts		1:12	1:11	1:11	1:11	1:11	01.11
01.06.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	102,54	102	101,5	101	100,5	100
01.06.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		NA	1:130	1:125	1:125	1:120	0,125
01.07	Pendidikan Menengah							
01.07.01	Rasio siswa terhadap guru		12	1:20	1:20	1:20	1:20	01.20
01.07.02	Angka Partisipasi Sekolah (%)	(%)	61,64	55	60	65,00	70,00	75
01.07.03	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah		263,78	50	55	60	70	80
01.08	Fasilitas Pendidikan							
01.08.01	Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	80,96	27,5	30	32,5	35	40
01.08.02	Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM	(%)	76,45	35	40	45	50	60
01.09	Angka Harapan Lama Sekolah		11,77	12,41	12,57	12,72	12,87	13
01.10	Rata-rata Lama Sekolah		9,03	9,26	9,33	9,39	9,46	10,406
01.11.01	Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	88,72	83,00	84,00	85,00	86,00	88



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.11.02	Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(%)	93,19	94,00	95,00	96,00	97,00	98
01.12	Angka Kelulusan							
01.12.01	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(%)	98,06	100	100	100	100	100
01.12.02	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(%)	96,81	100	100	100	100	100
01.12.04	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(%)	88,08	100	100	100	100	100
2	Kesehatan							
02.01	Angka Usia Harapan Hidup	tahun	70,32	70,91	71,09	71,28	71,46	72,17
02.02	Angka kematian ibu	per 100.000 LH	148	117	94,87	92,94	91,05	90
02.03	Angka Kematian Bayi	per 1.000 LH	7,8	7	7	7	7	7
02.04	Angka Stunting	(%)	32,83	22,87	21,10	18,40	16,00	14,00
02.05	Angka Gizi Buruk	(%)	1	1	1	1	1	1
02.06	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	(%)	100	100	100	100	100	100
02.07	Persentase anggaran Kesehatan terhadap APBD	(%)	9,83	11,16	10	10	10	10
02.08	Persentase Puskesmas terakreditasi	(%)	100	100	100	100	100	100
02.09	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	(%)	100	100	100	100	100	100
02.10	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada FKTP	(%)	47,99	61,69	60	65	70	75
02.11	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada RS milik Pemerintah Daerah	(%)	66,18	46,16	60	65	70	75
02.12	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	(%)	60,18	77,23	95	95	95	95
02.13	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	(%)	85,71	94,12	90	92	94	96



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal		Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
02.14	Rasio Dokter Spesialis	per 100.000 penduduk	6	9	9	9	9	9
02.15	Rasio Dokter	per 100.000 penduduk	25	28	28	28	28	28
02.16	Rasio Dokter Gigi	per 100.000 penduduk	2	2	2	2	2	2
02.17	Rasio Perawat	per 100.000 penduduk	339	332	332	332	332	332
02.18	Rasio Bidan	per 100.000 penduduk	192	185	185	185	185	185
02.19	Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat	per 100.000 penduduk	23	7	7	7	7	7
02.20	Rasio Tenaga Sanitasi Lingkungan	per 100.000 penduduk	7	10	10	10	10	10
02.21	Rasio Nutrisionis	per 100.000 penduduk	19	19	19	19	19	19
02.22	Rasio Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	per 100.000 penduduk	14	20	20	20	20	20
02.23	Rasio Ahli Teknologi Laboratorium Medik	per 100.000 penduduk	14	21	21	21	21	21
02.24	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	(%)	28,57	38,10	64	68	72	76
02.25	Persentase keluarga dengan akses sanitasi yang layak	(%)	86,40	89,36	67	77	82	94
02.26	Persentase desa yang melaksanakan STBM	(%)	100	100	100	100	100	100
02.27	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	(%)	47,24	47,24	67	77	82	94
02.28	Jumlah Rumah Tangga yang ber-PHBS	rumah tangga	1497	4495	4720	4956	5204	5464
02.29	Pelayanan kesehatan ibu hamil	(%)	90,78	84,06	100	100	100	100
02.30	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	(%)	86,73	30,00	100	100	100	100



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
02.31	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	(%)	97,31	91,93	100	100	100	100
02.32	Pelayanan kesehatan balita	(%)	80,97	74,21	100	100	100	100
02.33	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	(%)	95,99	77,66	100	100	100	100
02.34	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	(%)	18,97	30,49	100	100	100	100
02.35	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	(%)	52,43	78,59	100	100	100	100
02.36	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	(%)	85,71	46,06	100	100	100	100
02.37	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	(%)	886,21	238,89	100	100	100	100
02.38	Pelayanan Kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	(%)	128,57	125,56	100	100	100	100
02.39	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	(%)	106,55	78,53	100	100	100	100
02.40	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	(%)	76,15	52,55	100	100	100	100
02.41	Angka kesakitan akibat Demam Berdarah Dengue (DBD)	per 100.000 penduduk	134	34	84	73	62	49
02.42	Angka Kesakitan API (<i>annual Parasite Incidence</i>) Malaria	per 1.000 penduduk	0,84	0,19	> 1	> 1	> 1	> 1
02.43	Jumlah kasus kronis filariasis	kasus	0	0	>2	>2	>2	>2
02.44	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam	(%)	100	0	100	100	100	100
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	(%)	86,61	86,61	90	90	90	90
02.46	Persentase penerapan KTR	(%)	43	59	65	70	75	80
02.47	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	unit	2 RS & 17 Puskesmas					



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
02.48	Cakupan kunjungan rawat jalan	(%)	31,09	15,35	15	15	15	15
02.49	Cakupan kunjungan rawat inap	(%)	3,48	1,79	3	3	3	3
02.50	Jumlah RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada)	unit	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD
02.51	Angka kematian umum/ <i>Gross Death Rate</i> (GDR) di RS	per 1.000 pasien keluar	18,47	18,23	<45	<45	<45	<45
02.52	Angka kematian murni/ <i>Nett Death Rate</i> (NDR) di RS	per 1.000 pasien keluar	3,4	3,4	<25	<25	<25	<25
02.53	Tingkat Keterisian Tempat Tidur/ <i>Bed Occupation Rate</i> (BOR) di RS	%	49,76	15,72	60-85	60-85	60-85	60-85
02.54	Angka Penggunaan Tempat Tidur/ <i>Bed Turn Over</i> (BTO) di RS	Kali	53,23	26,55	40-50	40-50	40-50	40-50
02.55	Tenggang Perputaran Tempat Tidur/ <i>Turn of Interval</i> (TOI) di RS	Hari	3,44	11,59	1-3	1-3	1-3	1-3
02.56	Rata-rata Lama Pasien Dirawat/ <i>Average Length of Stay</i> (ALOS) di RS	Hari	2,50	3,17	6-9	6-9	6-9	6-9
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
03.01	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)	Juta HA	0,123	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565
03.02	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	HA	40	20	20	20	20	20
03.03	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	HA	7,983	7,492	7,506	7,52	7,534	7,55
03.04	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	23,32	37,75	42,17	46,58	50,99	55



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
03.05	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal	(%)	79	78	78	78	78	78
03.06	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	(%)	38	55,6	60	64,4	68,8	72,5
03.07	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	(%)	1,89	23,37	25,91	28,45	30,99	33,5
03.08	Persentase penanganan sampah (%)	(%)	30,45	20	25	30	35	40
03.09	Rasio Rumah Layak Huni	(%)	27,73	33,65	36,47	39,3	42,12	45
03.10	Pemukiman Layak Huni (Ha)	HA	6,909	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
03.11	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	KM	738,992	737,935	737,935	737,935	737,935	737,935
03.12	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	(%)	23,319	27	28	29	30	31
03.13	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik	(%)	-	6	7	8,5	10	11,5
03.14	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan	Desa	6	3 Desa				
03.15	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	Desa	6	3 Desa				
03.16	Persentase Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) Dalam Kondisi Baik	(%)	15	20	25	30	35	40
3.17	Persentase desa yg terhubung dg jalan pusat kecamatan dalam kondisi baik	(%)	NA	55	60	65	70	75
3.18	Rasio elektrifikasi		56,36 (2013)	77,19		82,4	85	88
4	Perumahan dan Pemukiman							
04.01	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	jiwa	25.464	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
04.02	Rumah Tangga mempunyai akses Sanitasi Layak	%	80,8	80,8	81,2	82,2	83,6	85



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
04.02	Rumah Tangga mempunyai akses Sanitasi Aman	%	1,8	1,8	1,80	1,85	2,40	3,00
04.03	Rumah Layak Huni	%	50,2	50,2	55,33	60,65	65,97	71,29
04.04	Persentase Desa yang Memiliki Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Layak Huni	(%)	-	27,50	30,00	32,50	35,00	37,5
04.05	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan	(%)	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.06	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)	(%)	0	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
04.07	Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik	(%)	0	15	15	15	15	15
04.08	RT mempunyai akses air minum jaringan perpipaan	%	19,65	19,65	19,74	19,83	19,91	20,00
04.09	RT mempunyai akses air minum bukan jaringan perpipaan	%	55,08	55,08	61,31	67,54	73,77	80,00
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum							
05.01	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan	NA	2 Kegiatan				
05.02	Kegiatan Pembinaan politik daerah	kegiatan	NA	1 Kegiatan				
05.03	Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda	%	NA	50	40	30	20	10
05.04	Persentase penyelesaian tindak pidana	%	89	91,2	93,4	95,6	97,8	100
05.05	Jumlah tindak pidana		69	55	50	45	40	35
6	Sosial							
06.01	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	(%)	6,02	58,12%	68,45	78,34%	88,91%	100%
06.02	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	(%)	0,86	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
B	Fokus Layanan Urusan Wajib Non-Dasar							
1	Ketenagakerjaan							
01.01	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	(%)	72,29	90	90,00	90,00	90,00	90
01.02	Tingkat pengangguran terbuka (%)	(%)	1,98	1,11	1,09	1,07	1,05	1,03
01.03	Jumlah lulusan S1/S2/S3	orang	1.390	1.402	1.407	1.413	1.418	1.425
01.04	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	(%)	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92	98,92
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
02.01	Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan (%)	(%)	3,43	15,00	16,00	16,00	17,00	17
02.02	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	(%)	1,3	22,50	25,00	27,50	30,00	32,5
02.03	Rasio KDRT	kasus	1	0 kasus				
02.04	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak Tindakan Kekerasan (%)	(%)	NA	100	100	100	100	100
02.05	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	89,10	89,33	89,58	89,90	90,15	90,45
02.06	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,09	92,34	92,49	92,54	92,65	92,70
3	Ketahanan Pangan							
03.01	Regulasi Ketahanan Pangan (Perbup/KepBup)	Dokumen	1	1	1	1	1	1
4	Pertanahan							
04.01	Persentase Pembebasan Tanah yang Diselesaikan Tepat Waktu	sertifikat	75	65	70	73,5	77	80
04.02	Jumlah Pengusulan Sertifikat Milik Pemerintah Daerah Pertahun	sertifikat	14	29	44	59	74	89



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
04.03	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan Pertahun Bagi Masyarakat Miskin Tepat Waktu	sertifikat	13	28	43	58	73	88
04.04	Jumlah desa lokasi Prona	desa	20	20	20	20	20	20
5	Lingkungan Hidup							
05.01	Jumlah duta lingkungan (orang)	orang	2	2	2	2	2	2
05.02	Jumlah adiwiyata (sekolah)	sekolah	10	11	12	13	14	15
05.03	Pencemaran status mutu air	(%)	46,67	32,5	31,9	31,02	30,14	30
05.04	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	(%)	79	85,00	87,50	90,00	92,50	95
05.05	Penegakan Hukum Lingkungan	(%)	100	100	100	100	100	100
05.06	Persentase Perusahaan /Wajib Usaha yang Menerapkan Aturan Penanganan Limbah	(%)	73,3	80,00	85,00	90,00	95,00	100
05.07	Persentase Standar Baku Mutu Udara	(%)	88,99	85	87	89	91	92
5.8	Status pencemaran air sungai (Indeks Kualitas Air)		NA	65	66	67	68	69
5.9	Status pencemaran udara (Indeks Kualitas Udara)		NA	93,25	93,5	94	94,5	95
5.10	Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)		NA	66,5	68	70	72,5	73,225
6	Kependudukan dan Catatan Sipil							
06.01	Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
06.02	Persentase Keluarga yang memiliki akta perkawinan	(%)	14,24	26,39	38,54	50,70	62,85	75,00
06.03	Persentase jumlah penduduk dengan KK Nasional	(%)	63,04	65,43	67,82	70,22	72,61	75,00



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
06.04	Persentase jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik (e-KTP)	(%)	79,45	78,56	77,67	76,78	75,89	75,00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
07.01	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	desa/kel	114	114	114	114	114	114
07.02	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	desa/kel	72	72	72	72	72	72
07.03	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	kali	1	1	1	1	1	1
07.04	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	jiwa	373	373	373	373	373	373
07.05	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel	4	5	6	6	7	8
8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
08.01	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	(%)	2,729	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
08.02	Rasio Akseptor KB	(%)	76,23	79,00	80,5	82,00	83,50	85
08.03	Cakupan Peserta KB Aktif	(%)	85,33	88,50	90,00	91,50	93,00	95
08.04	Jumlah PLKB Aktif (orang)	orang	18	18	20	20	22	22
08.05	Terpadunya program Kerja KB (program)	program	2	2	2	2	2	2
08.06	tersedianya alokon KB di Klinik (buah)	buah	90	100	105	110	115	120
08.07	Jumlah sarana dan prasarana KB (unit)	unit	28	28	30	30	32	32
08.08	Tingkat ketahanan Ekonomi keluarga (kelompok)	kelompok	49	60	65	70	75	80
08.09	Jumlah kelompok tribina (kelompok)	kelompok	60	60	62	62	64	65



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
08.10	Cakupan perempuan & Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam P2TP2A (kasus)	kasus	15	100	100	100	100	100
08.11	Jumlah PIK-R di SMP/SMA/organisasi kepemudaan	unit	68	25	27	27	29	29
08.12	Jumlah Grand Design Pengendalian Penduduk (buku)	buku	0	1	1	1	1	1
08.13	Jumlah Kebijakan Sektor Pembangunan berwawasan Kependudukan (kelompok)	kelompok	2	2	2	2	2	2
08.14	Pengembangan Anak Usia Dini (Holistik Integratif) (Kelompok)		37	59	81	104	127	127
08.15	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	(%)	1,86	1,81	1,76	1,71	1,66	1,63
08.16	Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (%)	(%)	67	62	57	52	42	36
08.17	Total Fertility Rate (TFR) (%)	(%)	2,83	2,79	2,76	2,73	2,72	2,71
08.18	Contraceptive Prevalence Rate (CPR) (%)	(%)	68,78	69,3	70,5	71,5	72,5	73
08.19	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	(%)	11,75	12,79	13,68	14,44	15,09	15,69
08.20	Usia Kawin Pertama (UKP) (Usia)	usia	19	19	20	20	21	21
08.21	Peserta KB Baru (%)	(%)	2,459	2,359	2,259	2,259	2,159	2,059
08.22	Kesejahteraan Keluarga (Kelompok)							
08.22.01	Tribina Keluarga :							
	Bina Keluarga Balita (BKB HI)		34	52	70	88	106	127
	2. Bina Keluarga Remaja (BKR)		11	35	59	83	107	127



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal		Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	3. Bina Keluarga Lansia (BKL)		16	34	57	80	103	127
08.22.02	UPPKS		66	78	90	102	114	127
08.22.03	Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)		34	39	44		54	68
08.23	Pembinaan Kampung KB Oleh Instansi Mitra (Desa)	desa	5	10	15	20	23	23
08.24	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	(%)	14,7	13,23	11,90	10,78	9,70	8,73
08.25	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	orang	1932	2046	2159	2273	2386	2500
08.26	Jumlah KDRT (orang)	orang	5	4	4	3	2	1
08.27	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (kasus)	kasus	13	12	11	10	9	8
9	Perhubungan							
09.01	Jumlah Pelabuhan Udara	buah	1	1	1	1	1	1
10	Komunikasi dan Informatika							
10.01	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	17	17	19	20	22	25
10.02	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Km2	4.508	4.508	5.000	5.400	5.500	6.000
10.05	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	72,57	72,57	80	85	88	90
10.06	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	42,86	42,86	55	60	65	70
10.08	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	72,57	72,57	80	85	88	90
11	Koperasi dan UMKM							
11.01	Koperasi Aktif (%)	(%)	52%	65	69	73	77	80



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.02	Jumlah UMKM	unit	2.943	2.985	2.999	3.013	3.027	3.050
11.03	Jumlah Industri	industri	257	325	350	375	400	425
11.04	Jumlah Pasar Desa/Kecamatan	desa/kelurahan	3	4	4	4	4	4
11.05	Persentase Koperasi Yang Modal dan SHU Meningkat	(%)	27%	36%	39%	42%	45%	47,50%
11.06	Persentase UMKM Yang Modal dan Omzet Meningkat	(%)	63,40%	67,5	70	72	73,5	75
12	Penanaman Modal							
12.01	Jumlah Investor PMDN dan PMA	investor	42	55	60	65	70	75
12.02	Persentase Pengajuan perizinan dan non perizinan yang Diselesaikan Tepat Waktu	(%)	100	80%	80%	80%	80%	80%
12.03	Lamanya hari proses perizinan	hari	10	9	9	8	8	7
12.04	Indeks Kepuasan Masyarakat	(%)	79,06	83,00	85,00	87,00	88,50	90
12.05	Persentase penyelesaian penangan pengaduan	(%)	100%	100	100	100	100	100
12.06	Nilai Investasi Daerah	Triliun Rp	4,8 T	5,2	5,4	5,6	5,8	6
12.07	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	NA	15	20	25	30	35
13	Kepemudaan dan Olahraga							
13.01	Jumlah Klub Olahraga (buah)	buah	1	2	2	3	3	3
13.02	Jumlah Gedung Olahraga (Unit)	unit	1	1	1	2	2	2
13.03	Jumlah Organisasi Pemuda	buah	86	86	86	86	86	86
13.04	Jumlah Organisasi Olahraga	buah	1	1	1	1	1	1
13.05	Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	unit	1	1	1	1	1	1
13.06	Jumlah Lapangan Olahraga	buah	211	211	211	211	211	211
13.07	Jumlah Mendali	buah	94	98	102	106	110	114



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal		Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
14	Statistik							
14.01	Buku "Gunung Mas dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.02	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.03	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
15	Persandian							
15.01	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	12,11	12,11	12,66	13,49	13,84	14,18
15	Kebudayaan							
15.01	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kali)	kali	1	3	4	4	5	5
15.02	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	buah	1	1	1	1	1	1
15.03	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang dilestarikan	buah	26	25	25	25	25	25
15.04	Jumlah Grup Kesenian (Buah)	buah	26	26	26	26	26	26
15.05	Jumlah Gedung Kesenian (Unit)	unit	1	1	1	1	1	1
15.06	Jumlah penghargaan kebudayaan	buah	NA	3	4	4	4	5
16	Perpustakaan							
16.01	Jumlah perpustakaan daerah	buah	1	1	1	1	1	1
16.01.01	Jumlah Perpustakaan umum	buah	40	40	40	40	40	40
16.01.02	Jumlah perpustakaan sekolah :							



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal		Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
16.1.2.1	-. SD/MI	buah	166	166	166	166	166	166
16.1.2.2	-. SMP/MTs	buah	56	56	56	56	56	56
16.1.2.3	-. SMA/MA	buah	13	13	13	13	13	13
16.01.03	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	buah	50	50	52	52	54	54
16.01.04	Jumlah perpustakaan rumah ibadah	buah	0	1	2	2	2	2
16.02	Jumlah anggota	buah	1.478	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
16.03	Jumah penguinjung	buah	4.028	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500
16.04	Jumlah koleksi bahan perpustakaan	buah	30.130	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
17	Kearsipan							
17.01	Pengelolaan arsip secara baku :							
17.01.01	a. Umum	buah	98	110	115	120	125	130
17.01.02	b. Pemerintahan	buah	100	110	115	120	125	130
17.01.03	c. Politik	buah	60	75	80	85	90	95
17.01.04	d. Keamanan dan ketertiban	buah	60	75	80	85	90	95
17.01.05	e. Kesejahteraan rakyat	buah	50	65	70	75	80	85
17.01.06	f. Perekonomian	buah	73	85	90	95	100	105
17.01.07	g. Pekerjaan umum	buah	86	95	100	105	110	115
17.01.08	h. Pengawasan	buah	89	105	110	115	120	125
17.01.09	i. Kepegawaian	buah	92	105	110	115	120	125
17.01.10	j. Keuangan	buah	120	125	130	135	140	145
C	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1	Pariwisata							
01.01	Kunjungan Wisata	jiwa	24.948	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
01.02	Jumlah objek wisata daerah	buah	27	27	28	28	29	29
01.03	PDRB Sektor Pariwisata	(%)	0,32	14,5	15,5	17,0	18,5	20
1.4	PDRB Sektor Pariwisata	(Milyar Rp)	NA	30	35	42,5	50	55
2	Pertanian							
02.01	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(%)	28,83	33,50	34,00	34,50	35,00	36



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.2	Persentase PDRB Sektor Pertanian	(Milyar Rp)	1.526,09	1.982,68	2.100,80	2.218,92	2.337,04	2.570,74
13.08	Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura :							
	a. Padi	ton	2,775	2,775	3,189	4,337	4,925	5,603
	-Padi Sawah	ton	1,556	1,556	1,697	1,995	2,114	2,236
	-Padi Ladang	ton	1,219	1,219	1,492	2,342	2,811	3,367
	b. Jagung	ton	1,470	1,470	891	1,960	2,778	5,100
	c. Ubi Kayu	ton	156	156	170	2,367	5,700	8,000
	Tanaman Hortikultura :							
	a. Cabe Rawit	ton	16	16	22	28	34	40
	b. Kacang Panjang	ton	6	6	6	8	10	12
	c. Durian	ton	255	255	282	413	495	594
	d. Pisang	ton	6	6	8	11	14	16
	e. Rambutan	ton	10	10	12	15	19	22
	h. Nenas	ton	11	11	16	25	31	37
	Produktivitas Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura							
	a. Padi	Kwintal/Ha	23	23	27	31	32	34
	-Padi Sawah	Kwintal/Ha	25	25	28	32	33	35
	-Padi Ladang	Kwintal/Ha	21	21	26	30	31	32
	b. Jagung	Kwintal/Ha	30	30	30	40	41	50
	c. Ubi Kayu	Kwintal/Ha	32	32	35	40	38	40
	Tanaman Hortikultura :							
	a. Cabe Rawit	Kwintal/Ha	5	5	6	7	7	8
	b. Kacang Panjang	Kwintal/Ha	1	1	1	1	1	1
	c. Durian	Kwintal/Ha	44	44	46	52	55	57
	d. Pisang	Kwintal/Ha	29	29	29	34	35	37
	e. Rambutan	Kwintal/Ha	5	5	5	6	6	6
	h. Nenas	Kwintal/Ha	76	76	79	91	94	98
	Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura							
	a. Padi	Ha	1,059	1,059	1,225	1,440	1,570	1,718
	-Padi Sawah	Ha	457	457	630	640	650	660



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal		Target			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
-Padi Ladang	Ha	602	602	595	800	920	1,058
b. Jagung	Ha	500	500	300	500	700	1,000
c. Ubi Kayu	Ha	50	50	50	600	1,000	1,500
Tanaman Hortikultura :							
a. Cabe Rawit	Ha	33	33	36	41	48	55
b. Kacang Panjang	Ha	61	61	64	74	85	97
c. Durian	Ha	59	59	70	81	93	106
d. Pisang	Ha	2	2	3	3	4	5
e. Rambuatan	Ha	19	19	23	26	30	35
h. Nenas	Ha	2	2	3	3	3	4
Populasi Ternak							
Sapi (ekor)	Ekor	4.919	4.919	5.165	5.423	5.695	5.979
Kerbau (ekor)	Ekor	198	198	213	228	243	258
Kambing (ekor)	Ekor	530	530	543	556	569	582
Babi (ekor)	Ekor	39.463	39.463	41.436	43.508	45.684	47.968
Ayam buras (ekor)	Ekor	86.894	86.894	91.238	95.800	100.590	105.620
Ayam ras pedaging (ekor)	Ekor	101.485	101.485	106.559	111.887	117.481	123.355
Ayamraspetelur (ekor)	Ekor	8.510	8.510	10.510	12.510	14.510	16.510
Itik (ekor)	Ekor	3.241	3.241	3.305	3.369	3.433	3.497
Produksi Ternak							
Sapi (Ton)	Ton	98	98	103	108	113	118
Kerbau (Ton)	Ton	5	5	5,3	5,6	5,9	6,2
Kambing (ekor)	Ton	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Babi (Ton)	Ton	255	255	268	281	294	307
Ayam buras (Ton)	Ton	49	49	51	54	57	59
Ayam ras pedaging (Ton)	Ton	426	426	440	454	468	482
Itik (ekor)	Ton	2	2	2	2	2	2
Produksi Telur							
Ayam buras (Ton)	Ton	31	31	33	34	36	38
Ayampetelur (Ton)	Ton	16,55	16,55	17,11	17,67	18,23	18,79
Pengembangan/perluasan area perkebunan							
Karet (Ha)	HA	68.378	68.378	68.393	68.405	68.417	68.429



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal		Target			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa Sawit (Ha)	HA	72.760	72.760	72.846	72.860	72.874	72.889
Produksi Komoditi Perkebunan							
Karet (Ton)	Ton	20.263	20.263	20.297	20.309	20.321	20.333
Kelapa Sawit (Tbs) Ton	Ton	100.334	100.334	102.152	102.254	102.363	102.512
Produktivitas Komoditi Perkebunan							
Karet (ton/ha)	ton/ha	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34
Kelapa Sawit	ton/ha	1,45	1,45	1,50	1,52	1,58	1,64
3 Kehutanan							
03.04 Hutan Rakyat dan Lahan Terbuka Hijau (Ha)	Ha	2	2.750	3.000	3.250	3.500	4.000
03.05 Pembangunan KPHP (unit)	unit	-	1	1	1	1	1
03.06 Pembangunan TAHURA	unit	1	1	1	1	1	1
03.07 Pembangunan Hutan Desa dan HKM (Unit)	unit	0	1	1	1	1	1
03.08 Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat /HTR (unit)	unit	1	1	1	1	1	1
03.09 Luas Kawasan Tahura yang Tertata dan Terjaga Kelestariannya	HA	201,61	12	12	12	12	12
5 Perdagangan							
05.01 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	(%)	10,02	8,95	9,05	9,15	9,25	9,35
6 Perindustrian							
06.01 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	(%)	8,8	10,50	11,00	11,50	12	12,5
06.02 Pertumbuhan Industri (jumlah)	unit	14	50	60	70	80	90
06.03 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (jumlah)	buah	362	300	300	300	300	300



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kelautan dan Perikanan							
07.01	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	5.200,63	4.718	5.057	5.396	5.734	6.000
07.02	Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg)	Kg	41	43,33	44,83	46,33	47,83	49,33
07.03	Peningkatan produksi benih ikan (ribek)	Ribek	165.757	220	230	240	250	260
07.04	Peningkatan produksi hasil pengolahan (ton)	Ton	30,1	60	70	80	90	100
8	Transmigrasi							
08.01	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi (%)	(%)	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22	93,22
9	Penanggulangan Bencana							
09.01	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	4	4	4	5	5	5
09.02	Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	jam	2	2	2	2	2	2
09.03	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	(%)	100	100	100	100	100	100
10	Energi dan Sumber Daya Mineral							
10.01	Kontribusi sektor pertambangan dari PNBPD dan PAD (Rp)	Rp	598.500.000.000	658.350.000.000	718.200.000.000	778.050.000.000	837.900.000.000	897.750.000.000
10.02	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	(%)	74,43	79,54	84,66	89,77	94,89	100,00
10.03	Jumlah Desa berlistrik	Desa	108	108	108	108	108	108
D	Urusan Penunjang							
1	Perencanaan Pembangunan							



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Kondisi Awal		Target			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01	Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.02	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.03	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.04	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.05	Persentase kesesuaian antara muatan Renstra SKPD dengan RPJMD		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
01.06	Persentase kesesuaian antara muatan RKPD dengan muatan RPJMD	(%)	100	100	100	100	100	100
01.07	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab (RTRWK) dan turunannya	(%)	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan							
02.01	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Indeks Persepsi Korupsi		NA	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6
3	Reformasi Birokrasi							
03.02	Nilai Reformasi Birokrasi		NA	62,5	63	64	65	66
03.03	Nilai Sakip							
03.04	Level Kapabilitas		Level 2	Level 3				
03.05	Level Maturitas		Level 2	Level 3				
03.06	IKM		79,06 (Baik)	82,45 (Baik)	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)
3.7	Predikat Akuntabilitas Kinerja		B	BB	BB	A	A	A



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal		Target				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
III	Aspek Daya Saing Daerah							
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	1.353.548,00	1.240.309	1.275.697	1.311.084	1.346.472	1.381.860
01.02	Nilai Tukar Petani							
01.03	Pengeluaran konsumsi RT non pangan	Rp	636.007,00	532.256	554.920	577.583	600.247	622.911
2	Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur							
02.02	Luas wilayah produktif	HA	123.808	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
3	Fokus Iklim berinvestasi							
03.01	lama proses perijinan	hari	10	9	8	8	7	7
4	Fokus Sumber Daya Manusia							
04.02	Rasio ketergantungan	(%)	45,84	51,50	51,00	50,50	50,00	50



8.1.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gunung Mas disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel VIII.4
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM	TINGKAT	Kondisi Awal 2020	Target			
				2021	2022	2022	2024
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		100	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan		95,20	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		68,97	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel VIII.5
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	Persen	84,06	100	100	100	100
2	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan	Persen	30	100	100	100	100
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	91,93	100	100	100	100
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	74,21	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	77,66	100	100	100	100
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	30,49	100	100	100	100



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	78,59	100	100	100	100
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	46,06	100	100	100	100
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	238,89	100	100	100	100
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Persen	125,56	100	100	100	100
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	78,53	100	100	100	100
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Persen	52,55	100	100	100	100

Tabel VIII.6
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Sosial



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	65	100	100	100	100
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	12	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persentase	4	100	100	100	100
4	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persentase	68,45	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	0,2	100	100	100	100

Tabel VIII.7
Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	56,49	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	21,99	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100	100	100	100
4	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100	100	100



Tabel VIII.8

Target Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang TRANTIBUMLINMAS

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
6	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	%	100	100	100	100	100



8.1.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan Dokumen dengan muatan tujuan dan sasaran Global.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahteraan masyarakat yang mencakup 17 (tujuh belas) tujuan. Oleh karenanya, upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga ke depannya dapat menerapkan pembangunan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan masa mendatang.

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pembangunan manusia (*human development*), di antaranya pendidikan, kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial (*social economic development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah maka dirumuskanlah target indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan pada tabel berikut.



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Tabel VIII.11

Penetapan Target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD	
				2020	2021	2022	2023	2024		
1:02 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1 *	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	4,75	4,52	4,26	4,00	3,8	Sosial	
1:03 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	100	100	100	100	100	Kesehatan	
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS	%	100	100	100	100	100	Tenaga Kerja
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	45	65	85	95	100	Sosial
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (anak/balita terlantar, lansia miskin/terlantar)	%	58,12	68,45	78,34	88,91	100	Sosial



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD	
				2020	2021	2022	2023	2024		
1:04 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (a)	Persentase Perempuan Pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 Kelahiran	%	96,84	94,87	92,94	91,05	90	Kesehatan
	1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	100	100	100	100	100	Kesehatan
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,81	1,76	1,71	1,66	1,63	dalduk&KB
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	jiwa	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	DPU
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	51	55	57	60	63	DPU
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Jumlah Rumah layak Huni	unit	39.274	42.052	44.831	47.610	50.000	DPU
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.		%	100	100	100	100	100	Pendidikan
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.		%	84,78	88,34	92,56	94,78	99,12	Pendidikan
	1.4.1. (j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran		%	100	100	100	100	100	Dukcapil



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD	
				2020	2021	2022	2023	2024		
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Rasio elektrifikasi	%	77,19		82,4	85	88	SOSIAL
1:05	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah Korban Yang Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana	Orang	0	0	0	0	0	BPBD
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	Kelompok	4	4	5	5	5	BPBD
	1:05:03	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana Tingkat Nasional dan Daerah		Dokumen	0	1	1	1	1	BPBD

TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD	
				2020	2021	2022	2023	2024		
2:01	2:01:01	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Angka Kematian Balita/ 1000 Kelahiran	Per 1.000 kelahiran	5	4	3	2	1	Kesehatan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
2:02 pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2:02:01	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/Balita	Angka Stunting						Kesehatan
	2:02:02	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe							Kesehatan
	2.2.2 .(a)	Prevalensi Anemia pada ibu hamil	%	0	0	0	0	0	Kesehatan
	2.2.2 .(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	100	100	100	100	100	Kesehatan

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
3:01 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3:01:01	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup		96,84	94,87	92,94	91,05	90	Kesehatan
	3.1.2. (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (SAMA DENGAN 1.4.1 (a))	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	96,84	94,87	92,94	91,05	90	Kesehatan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD		
				2020	2021	2022	2023	2024			
3:02	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3:02:01	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.		5	4	3	2	1	Kesehatan	
		3:02:02	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Jumlah kematian Neonatal						Kesehatan	
		3.2.2. (a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.		5	4	3	2	1	Kesehatan	
3:03	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3:03:01	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	38,67	46,12	55	74,34	85,00	Kesehatan
		3.3.1. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 1000 penduduk	Persentase orang dengan TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	%	69,00	79,00	89,00	99,0	100	Kesehatan
		3.3.4. (a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		%	100	100	100	100	100	Kesehatan
		3.3.5. *	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Jumlah Kasus Baru Kusta	Orang	0	0	0	0	0	Kesehatan
3:04	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka	3.4.1 (a)	Persentase merokok pada		%	2	2	1,5	1	1	Kesehatan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD		
				2020	2021	2022	2023	2024			
kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.		penduduk umur ≤18 tahun									
	3.4.1 (b)	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi		%						Kesehatan	
	3.4.1 ©	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun		%						Kesehatan	
3:07	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3:07:01	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Cakupan Peserta KB Aktif	%	88,50	90,00	91,50	93,00	95	Dalduk& KB
3:07	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Rasio Akseptor KB	%	69,30	70,50	71,50	72,50	73,00	Dalduk& KB
		3.7.1. (b)	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara modern	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	12,79	13,68	14,44	15,09	15,69	Dalduk& KB
		3:07:02	Angka kelahiran pada perempuan		%	62	57	52	42	36	Dalduk& KB



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD	
				2020	2021	2022	2023	2024		
	umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).									
	3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).		%	2,79	2,76	2,73	2,72	2,71	Dalduk&KB	
3:08	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3:08:02 Unmet need pelayanan kesehatan.	%	0	0	0	0	0	Kesehatan	
		3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	100	100	100	100	100	Kesehatan	
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1 (a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	98	98,5	98,5	99	99,5	Kesehatan	



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c. 1 *	Rasio Dokter/ 1000 Penduduk	Per 1.000 penduduk						Kesehatan

TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG ADIL DAN INKLUSIF SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEUMUR HIDUP UNTUK SEMUA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
4:01 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.d	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	116	117	118	119	120	Pendidikan
	4.1.1.e	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	101	100	100	100	100	Pendidikan
	4.1.1.g	rata-rata lama sekolah penduduk usia ≥ 15 tahun	tahun	9,26	9,33	9,39	9,46	10,406	Pendidikan
4:02 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4:02:02	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	90	92,5	95	97,5	100	Pendidikan



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

4:05	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4:05:01	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/ MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	94	94	94,67	95	95	95	Pendidikan
4:06	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.a	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	100	100	100	100	100	100	Pendidikan
		4.6.1. b	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	100	100	100	100	100	100	Pendidikan
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang berpendidik.	Persentase Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	90,56	92,67	95,12	98,5	100,00	Pendidikan
				Persentase Di setiap SMP/MTs tersedia guru	%	72,17	84,39	91,45	96,29	100,00	Pendidikan



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

				dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD		
				2020	2021	2022	2023	2024			
5:01	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5:01:01	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		88,22	89,58	89,90	90,15	90,45	PPPA
5:02	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.a	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		Kasus	0	0	0	0	0	PPPA
		5.2.2.a	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		%	100	100	100	100	100	PPPA
5:03	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5:03:01	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.		Kasus	0	0	0	0	0	PPPA
5:05	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan	5:05:01	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen	Presentase Partisipasi Perempuan di	%	15,00	16,00	16,00	17,00	17	PPPA



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD	
				2020	2021	2022	2023	2024		
untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		daerah dan pemerintah daerah.	Lembaga Pemerintahan (%)							
	5.5.2 *	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (%)	%	22,50	25,00	27,50	30,00	32,5	PPPA
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.							
				%	87	88,00	89,00	90,00	91	kominfo

TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD		
				2020	2021	2022	2023	2024			
6:01	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase penduduk berakses air minum	%	55	65	75	85	100	DPU/BPS
		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih	desa	3	3	3	3	3	DPU/BPS
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Cakupan Pelayanan Air Minum Perpipaan	%	55	65	75	85	100	DPU
6:02	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci							Kesehatan	



PERUBAHAN RPJMD

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD		
				2020	2021	2022	2023	2024			
kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		tangan dengan sabun dan air.									
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Rumah Tangga Bersanitasi	%	51	55	57	60	63	DPU	
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	55,60	60,00	64,40	68,80	72,50	Kesehatan	
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).								Kesehatan	
6:03	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global	6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	%	65	66	67	68	69	LH	
6:05	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di	6.5.1.(e)	Luas Pengembangan hutan serta peningkatan Hasil	Tutupan Lahan	%	66,5	68	70	72,5	73,225	LH



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat	Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk memulihkan kesehatan DAS								

TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	SATUAN	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan 46 nergy yang terjangkau, andal dan modern	7:01:01 Rasio Elektrifikasi		%	77,19		82,4	85	88	DPU
	7.1.1. (a) Konsumsi listrik per kapita		kWh perkapita	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	DPU

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	SATUAN	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
8:01 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1 (a) PDB per kapita	PDRB Per Kapita	Rp	1.649.347,00	1.766.231,00	1.883.116,00	2.000.000,00	2.200.000,00	Perdagangan
8,2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8:02:01 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	Perdagangan



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	SATUAN	Target					PD		
				2020	2021	2022	2023	2024			
8:03	Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan.	8.3.1 (a)	Persentase tenaga kerja formal.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	75,76	90	90,00	90,00	90,00	Tenaga Kerja
8:05	Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8:05:01	Upah rata-rata per jam pekerja.	Upah Minimum Kota	Rp. (Juta)						Tenaga Kerja
		8:05:02	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,11	1,09	1,07	1,05	1,03	Tenaga Kerja
8:08	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1 (a)	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma K3		%	100	100	100	100	100	Tenaga Kerja
		8:08:02	Peningkatan Kepatuhan atas Hak-Hak Pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif berdasarkan sumber		%	100	100	100	100	100	Tenaga Kerja



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	SATUAN	Target					PD	
				2020	2021	2022	2023	2024		
8:09	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang						Pariwisata
	8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	Pariwisata	
8:10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10 (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	km	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Perdagangan
		8.10 *	Jumlah Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang disalurkan Bank Umum dan BPR untuk sektor industri dan perdagangan	RP. (juta)						Perdagangan

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD		
				2020	2021	2022	2023	2024			
9:01	Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus	9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan Nasional	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik	%	27	28	29	30	31	DPU
	9:01:02	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi.	Jumlah Angkutan umum Darat							Perhubungan	



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
						2020	2021	2022	2023	2024	
	pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua										
9:03	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar.	9:03:01	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	Perdagangan
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI) broadband	unit	2	2	2	2	2	Kominfo
		9.c.1.b	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Jumlah Mobil Internet Kecamatan (MPLIK)	unit	7	7	7	7	7	kominfo

TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	SATUAN	Target					PD
						2019	2020	2021	2022	2024	
10:01	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di	10:01:01	Koefisien Gini		%	0,27	0,263	0,257	0,25	0,24	SOSIAL
		10.1.1.a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis	Tingkat kemiskinan	%	4,78	4,52	4,26	4	3,8	SOSIAL



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

	bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional		kelamin dan kelompok umur.								
		10.1.1.d	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG	desa/kel	5	6	6	7	8	PMD
10:04	Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.b	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan		%	100	100	100	100	100	Tenaga Kerja

TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD		
				2019	2020	2021	2022	2024			
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase Rumah Layak Huni	%	33,65	36,47	39,30	42,12	45,00	DPU
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Cakupan Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%						Perhubungan



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2019	2020	2021	2022	2024	
jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.									
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara	11.3.2.(a)	Jumlah institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	PD	15	15	15	15	15	Bappeda
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan	11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	orang	0	0	0	0	0	BPBD
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	4	4	5	5	5



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD	
				2019	2020	2021	2022	2024		
fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.										
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	%	20	25	30	35	40	LH	
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Persentase ruang terbuka hijau (RTH)	%	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	LH

TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU	usaha / kegiatan	2	3	4	5	5	LH



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD	
				2020	2021	2022	2023	2024		
ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	ton (m3)	1	1	1	1	1	LH	
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Persentase fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	%	50	55	60	65	70	SETDA



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
gaya hidup yang selaras dengan alam									

TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara	13.1.1	Dokumen Strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1	BPBD
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	orang	0	0	0	0	0	BPBD
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1.a	Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi GRK	IKL	Dokumen	1	1	1	1	LH

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
15.1 Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.	15.b.1.(a).	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	%	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
16.1 Secara signifikan mengurangi Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2 (a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan)	%	100	100	100	100	100	KESBANG, SATPOL
	16.1.3 (a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	%	100	100	100	100	100	KESBANG, SATPOL
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua	16.3.1 (a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.		%	100	100	100	100	100	KESBANG, SATPOL
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Persepsi Korupsi	-	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	INSPEKTOR AT
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	KEUANGAN



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).								
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Nilai Akuntabilitas Pemerintah	-	BB	BB	A	A	A	SETDA
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan.								SETDA
	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Nilai Reformasi Birokrasi	%	62,5	63	64	65	66	SETDA
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Cakupan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	SETDA



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
						2020	2021	2022	2023	2024	
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		%	15,00	16,00	16,00	17,00	17	PPPA
		16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).								PPPA
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran	16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		%	100	100	100	100	100	DUKCAPIL
		16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		%	100	100	100	100	100	DUKCAPIL
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan	16.10.2 (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Website milik pemerintah daerah (buah)	instansi	33	33	33	33	33	KOMINFO



**PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024**

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	Satuan	Target					PD
						2020	2021	2022	2023	2024	
	kesepakatan internasional	16.10.2 (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		orang						KOMINFO

TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Target TPB		Indikator TPB		Indikator Proxy	SATUAN	Target					PD
						2020	2021	2022	2023	2024	
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Keuangan
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persentase Desa Yang Terhubung Dengan Jaringan Telekomunikasi	%	2	2	2	2	2	KOMINFO



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Target TPB	Indikator TPB	Indikator Proxy	SATUAN	Target					PD	
				2020	2021	2022	2023	2024		
kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global										
17,8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Jumlah akses broadband (Hotspot WIFI) unit	2	2	2	2	2	KOMINFO	



- BAB 9 - PENUTUP

RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan ini penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPJMD, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa transisi, agar RPJMD ini mampu menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gunung Mas yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gunung Mas, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD tahun 2024 hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi Bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 2024, menyusun dokumen:



a. RPJMD Teknokratik

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pada tahun 2024 tepat pada saat selesainya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan Kepala daerah. Dengan ini penyusunan RPJMD teknokratik dilakukan dengan pendekatan teknokratis dengan berpedoman pada RPJPD, hasil analisis capaian kinerja RPJMD periode lalu (2019-2024), RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah serta RPJMN, untuk keselarasan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Kemudian RPJMD teknokratik ini selanjutnya bisa dijadikan acuan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum serentak Bulan November 2024. Penekanan dokumen teknokratik dimaksud adalah analisis capaian kinerja RPJMD periode lalu (2019-2024), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. RPJMD teknokratik ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD setelah Bupati dan wakil Bupati terpilih di lantik.

b. RKPD Tahun 2025

Penyusunan RKPD tahun 2025 disusun mengacu pada RPJMD Teknokratik periode 2025-2030. Diharapkan pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD tahun 2025 selanjutnya dijadikan sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD tahun 2025-2030. RKPD sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS tahun 2025 serta APBD tahun anggaran 2025.



9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2020 hingga 2024.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunung Mas



PERUBAHAN RPJMD
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019-2024

- berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja PD.
5. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap indikator kinerja sasaran.
 6. RPJMD ini akan menjadi dasar Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
 7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.
 8. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Tuhan YME, kita semua berharap penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas di masa yang akan datang.


BUPATI GUNUNG MAS,
JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si